



#2023
#KKP THRIVE

LAPORAN KINERJA LPSPL SORONG



Pengarah :
Rosmini, S.Pi.

Penyusun :
Hendrik Sombo, S.Pi, M.Si
Arief Reza Fahlevi, S.St.Pi., M.Si.
Ahmad Sabilul Muttaqin, S.T
Bagus Luserius Marpaung, S.T
Milka Sherly Chatrin Makanuai, S.Pi.

2023

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2023 Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong. Laporan Kinerja (LKj) LPSPL Sorong Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kontrak kinerja yang telah disepakati. Pada LKj Tahun 2023 ini kami sampaikan capaian indikator kinerja pada Tahun 2023, perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022, perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah, analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya, analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi, kegiatan pendukung, rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan I tahun 2024, realisasi anggaran yang terserap pada Triwulan IV Tahun 2023, dan rencana penarikan dana pada Triwulan IV Tahun 2023. Laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan program/kegiatan LPSPL Sorong selama Bulan Januari sampai dengan Desember 2023.



Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk secara bersama-sama berupaya mencapai target kinerja sesuai yang telah disepakati di Tahun 2023 ini. Semoga LKj ini dapat menjadi salah satu masukan bagi organisasi yang lebih luas sebagai upaya perbaikan demi kemajuan pengelolaan ruang laut. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporan ini, karenanya kami mohon maaf dan masukan serta kritik maupun evaluasi yang membangun akan kami terima dengan senang hati sebagai perbaikan di masa mendatang.

Sorong, 15 Januari 2024

Kepala LPSPL Sorong



Rosmini, S.Pi



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di Kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja disusun secara periodik baik triwulanan (LKj Interim) dan tahunan (LKj Tahunan). Penyusunan laporan kinerja meliputi pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja. Pelaporan kinerja dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Hasil capaian kinerja yang dituangkan pada LKj Tahun 2023 ini telah mendukung pelaksanaan rencana strategis DJPKRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan kinerja (Lkj) LPSPL Sorong Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan LPSPL Sorong dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dari Bulan Januari sampai Bulan Desember 2023. Pada pelaporan LKj Tahun 2023 data capaian dan target LPSPL Sorong telah disampaikan secara lengkap dan disertai dokumen data dukung yang tersimpan dalam folder bit.ly/SAKIPDjPRL serta sesuai dengan format Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen KP No. 68/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP. Pada tahun 2023 LPSPL Sorong memiliki 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 10 Indikator Kinerja Mandatory (IKM). Pada tahun 2023 terdapat 10 indikator kinerja yang capaiannya melebihi target kinerja yang ditetapkan, 5 indikator kinerja yang capaiannya sama dengan target yang ditetapkan, dan 1 indikator kinerja yang tidak tercapai. Capaian indikator kinerja diantaranya IKU 1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong tercapai 3 dokumen dari target 3 dokumen, IKU 2 Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong tercapai 2 daerah dari target 2 daerah, IKU 3 Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong tercapai 3 kelompok dari target 3 kelompok, IKU 4 Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan,

Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong tercapai 7 jenis dari target 4 jenis, IKU 5 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong tercapai 5 jenis dari target 2 jenis, IKU 6 Nilai PNBP LPSPL Sorong tercapai Rp. 1.647.742,751 dari target Rp. 718.180,000, IKM 7 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong tercapai 91,83 dari target nilai 93,75, IKM 8 Nilai kinerja anggaran lingkup LPSPL Sorong tercapai 92,11 dari target nilai 82, IKM 9 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LPSPL Sorong tercapai 81,64 dari target nilai 75, IKM 10 Indeks Profesionalitas ASN lingkup LPSPL Sorong tercapai 89,17 dari target 85, IKM 11 Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong tercapai 82,70 dari target nilai 75, IKM 12 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LPSPL Sorong tercapai 4 dokumen dari target 4 dokumen, IKM 13 Persentase Unit Kerja Lingkup LPSPL Sorong yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar tercapai 133,3% dari target 92%, IKM 14 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup LPSPL Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan tercapai 100% dari target 75%, IKM 15 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LPSPL Sorong tercapai 100% dari target 100%, IKM 16 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPL Sorong tercapai 100% dari target 77,5%.

Dalam rangka mendukung kinerja LPSPL Sorong pada tahun anggaran 2023, anggaran yang diberikan Rp. 12.053.366.000 sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja tanggal 9 Januari 2023. Hal ini juga sesuai dengan DIPA Petikan pagu definitif (pagu awal) tahun 2023 dengan Nomor: SP DIPA-032.07.2.477440/2023 tanggal 30 November 2022. Namun anggaran tersebut tidak bisa dicairkan secara keseluruhan, hal ini dijabarkan pada halaman IV A DIPA Petikan terkait blokir. Jumlah anggaran yang tidak dapat dicairkan yaitu Rp. 1.965.000.000 yang terdiri dari belanja barang (52) sebesar Rp. 1.630.000.000 dan belanja modal (53) sebesar Rp. 335.000.000. Pada triwulan III, LPSPL Sorong mendapatkan pemanfaatan PNBP dari perolehan PNBP pelayanan jenis ikan di wilayah kerja LPSPL Sorong dan pemanfaatan PNBP dari pelayanan pemanfaatan ruang laut yang diberikan dari perolehan PNBP Direktorat Perencanaan Ruang Laut. LPSPL Sorong mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 2.338.638.000. Sehingga total Pagu LPSPL Sorong pada triwulan III menjadi Rp. 14.392.004.000. Pada Bulan November terdapat realokasi anggaran yang terdampak *automatic adjustment* dari DIPA LPSPL Sorong ke Bendahara Umum Negara, sehingga pagu anggaran LPSPL Sorong menjadi Rp. 12.593.004.000. Namun, pada DIPA LPSPL Sorong masih

terdapat blokir pada kegiatan perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut sebesar Rp. 375.000.000 karena ketidaksesuaian rincian output. Realisasi anggaran pada tahun 2023 yang berdasarkan aplikasi OMSPAN yaitu Rp. 11.950.139.298 atau 94,90% dari anggaran Rp. 12.592.004.000.

Pengukuran Kinerja capaian kinerja LPSPL Sorong dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian dengan realisasi indikator kinerja utama atau indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan yang tercantum di Perjanjian Kinerja (PK). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Tahun 2023 yaitu **110,01** (kategori Biru=Istimewa) (*kinerjaku.kkp.go.id*).

Guna meningkatkan capaian kinerja LPSPL Sorong pada triwulan berikutnya perlu dilakukan beberapa perbaikan diantaranya perlu dilakukan penyusunan rencana penarikan dana pada level subkomponen pada setiap triwulan dengan waktu yang telah ditentukan DJPB Kementerian Keuangan.

Lindungi
Kami Yuk



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Isu Strategis (<i>Strategic Issues</i>)	1
1.4 Tugas dan Fungsi	6
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis 2020-2024	10
2.2 Indikator dan Target Kinerja LPSPL Sorong Tahun 2023	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Sasaran Kegiatan 1 Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	20
3.2 Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Kawasan Konservasi yang Ditetapkan di Tingkat Daerah di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	31
3.3 Sasaran Kegiatan 3 Meningkatkan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	39
3.4 Sasaran Kegiatan 4 Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	56
3.5 Sasaran Kegiatan 5 Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	71
3.6 Sasaran Kegiatan 6 Meningkatkan Nilai PNBPLPSPL Sorong	83
3.7 Sasaran Kegiatan 7 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LPSPL Sorong	87
3.8 Akuntabilitas Anggaran	139
3.9 Tindaklanjut Atas Rekomendasi Triwulan III Tahun 2023	140
3.10 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya	142

BAB IV. PENUTUP	145
4.1 Kesimpulan	145
4.2 Rekomendasi	146
LAMPIRAN		



Lindungi Kami Yuk



DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1	Lokasi satuan kerja dan wilayah kerja LPSPL Sorong	8
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai LPSPL Sorong	9
Tabel 2.1	Indikator dan Target Kinerja LPSPL Sorong Tahun 2023	16
Tabel 3.1	IKU, IKM, Target dan Realisasi Kinerja LPSPL Sorong Tahun 2023	18
Tabel 3.2	Capaian IKU 1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong	21
Tabel 3.3	Realisasi Anggaran IKU 1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (dokumen) bersumber dari Rupiah Murni	27
Tabel 3.4	Realisasi Anggaran IKU 1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (dokumen) bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak	27
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran pada Komponen Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak	28
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran pada Komponen Petugas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang Ditingkatkan Kompetensinya bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak	28
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran pada Komponen Pemerintah Daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak	28
Tabel 3.8	Rencana Penarikan Dana IKU 1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (dokumen)	29
Tabel 3.9	Rencana Penarikan Dana IKU 1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (dokumen) bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak	29
Tabel 3.10	Rencana Penarikan Dana pada Komponen Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak	30
Tabel 3.11	Rencana Penarikan Dana pada Komponen Petugas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang Ditingkatkan Kompetensinya bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak	30
Tabel 3.12	Rencana Penarikan Dana pada Komponen Pemerintah Daerah	



	yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak	30
Tabel 3.13	Capaian IKU 2 Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Daerah)	31
Tabel 3.14	Realisasi Anggaran IKU 2 Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Daerah)	38
Tabel 3.15	Rencana Penarikan Dana IKU 2 Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Daerah)	39
Tabel 3.16	Capaian IKU 3 Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kelompok)	40
Tabel 3.17	Sarana Prasarana Kelompok Nusa Matan	44
Tabel 3.18	Daftar Barang yang Diserah Terimakan ke Pokmaswas Nusa Matan	46
Tabel 3.19	Daftar Barang yang Diserah Terimakan ke Pokmaswas Sugiraja Watulu	50
Tabel 3.20	Daftar Barang yang Diserah Terimakan ke Pokmaswas Tanjung Ngolopopo	53
Tabel 3.21	Realisasi Anggaran IKU 3 Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kelompok)	55
Tabel 3.22	Rencana Penarikan Dana IKU 3 Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diserahkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kelompok)	55
Tabel 3.23	Capaian IKU 4 Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	57
Tabel 3.24	Hasil pemantauan ikan hiu berjalan di KKD Kaimana	61
Tabel 3.25	Realisasi Anggaran IKU 4 Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	70
Tabel 3.26	Rencana Penarikan Dana IKU 4 Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	71



Tabel 3.27	Capaian IKU 5 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	72
Tabel 3.28	Realisasi Anggaran IKU 5 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis) bersumber dari Rupiah Murni	80
Tabel 3.29	Realisasi Anggaran IKU 5 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis) bersumber dari PNBP	80
Tabel 3.30	Realisasi Anggaran IKU 5 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis) bersumber dari PNBP dan Rupiah Murni	81
Tabel 3.31	Rencana Penarikan Dana IKU 5 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis) bersumber dari Rupiah Murni	81
Tabel 3.32	Rencana Penarikan Dana IKU 5 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis) bersumber dari PNBP	82
Tabel 3.33	Rencana Penarikan Dana IKU 5 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis) bersumber dari PNBP dan Rupiah Murni	82
Tabel 3.34	Capaian IKU 6 Nilai PNBP LPSPL Sorong (Rp.000)	84
Tabel 3.35	Realisasi Anggaran IKU 6 Nilai PNBP LPSPL Sorong (Rp.000)	87
Tabel 3.36	Capaian IKM 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	88
Tabel 3.37	Realisasi Anggaran IKM 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	91
Tabel 3.38	Rencana Penarikan Dana IKM 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	92
Tabel 3.39	Capaian IKM 8 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	93
Tabel 3.40	Realisasi Anggaran IKM 8 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	96
Tabel 3.41	Rencana Penarikan Dana IKM 8 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	96
Tabel 3.42	Capaian IKM 9 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LPSPL Sorong (Nilai)	97
Tabel 3.43	Realisasi Anggaran IKM 9 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LPSPL Sorong (Nilai)	100



Tabel 3.44	Rencana Penarikan Dana IKM 9 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LPSPL Sorong (Nilai)	100
Tabel 3.45	Kualifikasi tingkat Pendidikan	102
Tabel 3.46	Indikator riwayat pengembangan kompetensi	103
Tabel 3.47	Indikator penilaian prestasi	103
Tabel 3.48	Indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin	104
Tabel 3.49	Kategori penilaian IP ASN	105
Tabel 3.50	Capaian IKM 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)	105
Tabel 3.51	Realisasi Anggaran IKM 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)	109
Tabel 3.52	Rencana Penarikan Dana IKM 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)	110
Tabel 3.53	Kategori Nilai PM SAKIP Tahun 2023.	110
Tabel 3.54	Capaian IKM 11 Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	111
Tabel 3.55	Realisasi Anggaran IKM 11 Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	114
Tabel 3.56	Rencana Penarikan Dana IKM 11 Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	115
Tabel 3.57	Capaian IKM 12 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)	116
Tabel 3.58	Realisasi Anggaran IKM 12 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)	118
Tabel 3.59	Capaian IKM 13 Persentase Unit Kerja Lingkup LPSPL Sorong yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	120
Tabel 3.60	Keaktifan Pejabat LPSPL Sorong Posting pada laman aplikasi <i>collaboration office</i>	122
Tabel 3.61	Realisasi Anggaran IKM 13 Persentase Unit Kerja Lingkup LPSPL Sorong yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	122
Tabel 3.62	Capaian IKM 14 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup LPSPL Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	123
Tabel 3.63	Realisasi Anggaran IKM 14 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup LPSPL Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	126
Tabel 3.64	Capaian IKM 15 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LPSPL Sorong (%)	127
Tabel 3.65	Realisasi Anggaran IKM 15 Persentase Penyelesaian Temuan		



	LHP BPK Lingkup LPSPL Sorong (%)	129
Tabel 3.66	Capaian IKM 15 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%)	130
Tabel 3.67	Realisasi Anggaran IKM 16 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%)	138
Tabel 3.68	Rencana Penarikan Dana IKM 16 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%)	138
Tabel 3.69	Membandingkan capaian kinerja LPSPL Sorong dengan Unit Pelaksana Teknis lain pada tahun 2023	142
Tabel 4.1	Tindaklanjut dari rekomendasi pada periode sebelumnya	147

Lindungi
Kami Yuk



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Struktur Organisasi LPSPL Sorong	7
Gambar 1.2 Wilayah Kerja LPSPL Sorong	8
Gambar 3.1 NKO LPSPL Sorong Tahun 2023	18
Gambar 3.2 Dokumentasi dan Komposisi Peserta Sosialisasi	23
Gambar 3.3 Dokumentasi Pendampingan Pra Permohonan dan Verifikasi Teknis	24
Gambar 3.4 Dokumentasi Kegiatan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	25
Gambar 3.5 Dokumentasi Peningkatan Kapasitas SDM LPSPL Sorong	26
Gambar 3.6 Dokumentasi Pendampingan CKKD Buru	34
Gambar 3.7 Peta Usulan CKKD Buru	35
Gambar 3.8 Dokumentasi Pendampingan CKKD Biak Numfor	36
Gambar 3.9 Peta Kawasan Konservasi di Perairan Biak Numfor	37
Gambar 3.10 Identifikasi Calon Kelompok Penerima Bantuan	42
Gambar 3.11 Verifikasi Calon Kelompok Penerima Bantuan	43
Gambar 3.12 Struktur Organisasi Pokmaswas Nusa Matan	44
Gambar 3.13 Serah Terima Bantuan Kepada Pokmaswas Nusa Matan	45
Gambar 3.14 Struktur Organisasi Pokmaswas Sugiraja Watulu	48
Gambar 3.15 Serah Terima Bantuan Kepada Pokmaswas Sugiraja Watulu	49
Gambar 3.16 Struktur Organisasi Pokmaswas Tanjung Ngolopopo	51
Gambar 3.17 Serah Terima Bantuan Kepada Pokmaswas Tanjung Ngolopopo	52
Gambar 3.18 Target Jenis LPSPL Sorong Tahun 2023	59
Gambar 3.19 Kegiatan Monitoring Penyu	60
Gambar 3.20 Kegiatan Monitoring Hiu Berjalan	61
Gambar 3.21 Kegiatan Monitoring Napoleon	62
Gambar 3.22 Kegiatan Transplantasi Karang	63
Gambar 3.23 Kegiatan Monitoring Kuda Laut	64
Gambar 3.24 Kegiatan Penanganan Mamalia Terdampar	64
Gambar 3.25 Workshop Pengelolaan Hiu Paus	76
Gambar 3.26 Sosialisasi Sidat di Negeri Larike	67
Gambar 3.27 Dokumentasi Monitoring Dugong dan Lamun	68
Gambar 3.28 Jenis yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja LPSPL	



	Sorong	74
Gambar 3.29	Jumlah Pelaku Usaha Teregister di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	75
Gambar 3.30	Jumlah Surat Rekomendasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	76
Gambar 3.31	Kegiatan Koordinasi Persiapan Pendaatan di Provinsi Maluku	77
Gambar 3.32	Bimbingan Teknis ISO 9001:2025	79
Gambar 3.33	Grafik Perolehan PNBP Triwulan Tahun 2023	86
Gambar 3.34	Nilai IKPA Tahun 2023	89
Gambar 3.35	Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023	94
Gambar 3.36	Nilai WBK LPSPL Sorong	98
Gambar 3.37	Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023	106
Gambar 3.38	Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Pegawai LPSPL Sorong	108
Gambar 3.39	Dokumentasi Evaluasi AKIP	113
Gambar 3.40	Kegiatan Pendukung Penyelenggaraan SPIP Triwulan IV Tahun 2023	118
Gambar 3.41	Screenshot aplikasi SIDAK per 31 Desember 2023	124
Gambar 3.42	Monitoring Evaluasi pada Pokmaswas Tafamutu	133
Gambar 3.43	Monitoring Evaluasi pada Pokmaswas Pulau Ay	134
Gambar 3.44	Monitoring Evaluasi pada Pokmaswas Knasaimos	135
Gambar 3.45	Monitoring Evaluasi Pokdar Makimi	135
Gambar 3.46	Nilai Kinerja Anggaran LPSPL Sorong Tahun 2023	141
Gambar 3.47	Nilai IKPA LPSPL Sorong Tahun 2023	141



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan Data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong juga menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini adalah untuk menyampaikan capaian kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan LPSPL Sorong pada Tahun 2023.

1.3 Isu Strategis (*Strategic Issues*)

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia yang sangat strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia sangat kaya akan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan karena dari 7,7 juta km² luas wilayahnya, 5,8 juta km² merupakan perairan laut (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas ZEE Indonesia 2,55 juta km²), dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia (\pm 108.000 km). Indonesia juga

sangat kaya akan sumberdaya wilayah pesisir karena memiliki 17.504 pulau dengan 16.671 pulau diantaranya telah terdaftar di PBB. Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata - Laut DKI - Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi - Selat Makassar - Lautan Flores - Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik - Selat Maluku, Laut Seram - Laut Banda). Keberadaan 3 (tiga) alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia. Kekayaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan hayati Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 bahwa potensi sumberdaya ikan di 11 WPPNRI mencapai 12,01 juta ton per tahun dengan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan 8,6 juta ton per tahun. Ditunjang dengan ekosistem terumbu karang seluas 25.000 km² yang tersebar di 985 titik (namun, terumbu karang yang masih dalam kondisi sangat baik hanya sekitar 5,48% dan kondisi baik 25,48%). Sumberdaya perikanan di Indonesia juga sangat bervariasi, karena sekitar 37 % dari spesies ikan di dunia berada di Indonesia, yang terdiri dari sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, diantaranya tuna, cakalang, tongkol, udang, cumi-cumi, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut. Indonesia mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan non-hayati yang besar. Setidaknya 10 sektor jasa-jasa kelautan dapat membangkitkan ekonomi maritim Indonesia, yakni Energi, Perhubungan Laut, Bioteknologi Kelautan, Industri Kelautan, Bangunan Laut, Pariwisata Bahari, Energi dan SDM, Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil, dan Hutan Bakau. Diperkirakan potensi nilai ekonomi 10 sektor kelautan (termasuk perikanan) ini dapat mencapai lebih dari USD 1,2 triliun per tahunnya. Dengan potensi hayati dan non hayati yang sedemikian kaya merupakan tantangan yang teramat besar bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk mampu memanfaatkannya secara optimal demi kesejahteraan masyarakat, namun tetap menjaga kelestariannya secara berkelanjutan.

LPSPL Sorong berkedudukan di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya dengan wilayah kerja yang meliputi Provinsi Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Dalam melaksanakan tugasnya



dalam upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan. LPSPL Sorong sejak tahun 2011 telah memiliki 2 (dua) satker definitif yang berkedudukan di Kota Ambon dan Kabupaten Merauke (Permen-KP No. 65/PERMEN-KP/2020 jo Permen-KP No. PER-23/MEN/2011 tentang Perubahan Kedua atas Permen-KP No. PER-22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut).

Luas wilayah laut di wilayah kerja LPSPL Sorong diperkirakan mencapai $\pm 2.014.400,68$ km² (estimasi), panjang garis pantai $\pm 36.500,49$ km (BIG, 2021), terdapat ± 7.235 pulau (43,14%) dari jumlah pulau yang ada di Indonesia (Dit. P4K-DJPRL, 2021), dengan 32 pulau diantaranya merupakan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar (28,8% dari 111 PPKT di Indonesia), serta berbagai potensi sumberdaya kelautan dan perairan lautnya yang belum dikelola dengan maksimal.

Pulau-Pulau Kecil Terluar memiliki arti yang strategis yaitu sebagai 1) titik dasar dari garis pangkal lurus kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah perairan Indonesia; 2) zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan landas kontinen Indonesia; 3) sebagai beranda depan Negara Republik Indonesia; dan 4) sebagai kawasan lalu lintas pelayaran internasional. Lebih dari itu, karena geo-strategis dan geo-politis Indonesia di tengah persilangan Benua Asia dan Benua Australia serta menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, maka posisi tersebut rawan dalam permasalahan penegakan kedaulatan, khususnya di wilayah laut (Dahuri 2000). Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian di PPKT antara lain adalah : 1. Penutupan akses masyarakat dan nelayan lokal oleh investor di pulau-pulau kecil, seperti Gili Gede, di Lombok Barat, Pulau Nikoi di Tanjung Pinang, dan beberapa pulau di Wakatobi; 2. Konflik pemanfaatan tanah dan alih fungsi hutan di antara investor dan masyarakat, seperti di Pulau Romang di Pulau Maluku Barat Daya; 3. Aktivitas ilegal di pulau-pulau kecil, seperti penyelundupan orang dan barang, perbudakan, illegal fishing, illegal logging, narkoba, seperti di Pulau Benjina di Kabupaten Kepulauan Aru; 4. Pelanggaran peraturan pertanahan, pemberian hak atas tanah (SHM) secara perorangan yang mencapai 20 hektar per orang dalam satu hamparan, seperti Pulau Maratua di Berau; 5. Pemanfaatan pulau-pulau kecil belum memberikan PNPB secara optimal bagi negara;



LPSPL Sorong memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut mulai dari target rutin tahunan hingga tantangan yang diturunkan melalui Nawacita Presiden Republik Indonesia, yaitu:

1. Perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi, dan implementatif melalui:
 - a. Fasilitasi Penyusunan materi teknis ruang dalam perumusan RTR Provinsi/RZ KAW dan RTR KSN/T dan Integrasi Dukungan penyusunan materi teknis ruang laut yang disusun oleh Direktorat Perencanaan Ruang Laut di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - b. Pendampingan Integrasi antara rencana tata ruang wilayah provinsi dengan RZWP3K, Integrasi antara rencana tata ruang KSN dengan rencana zonasi KSN/T di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - c. Pendampingan dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang didelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - d. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang/ rencana zonasi di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - e. Dukungan pemberian KKPRL dan/atau insentif pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - f. Pengelolaan data KKPRL.
2. Pengelolaan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati Laut yang lestari dan berkelanjutan melalui:
 - a. Pendampingan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - b. Evaluasi Efektivitas Pengelolaan KKPD di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - c. Penyediaan data sebaran dan status populasi jenis ikan dilindungi/terancam punah di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - d. Pemulihan populasi/ Pengayaan jenis ikan di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - e. Inisiasi daerah perlindungan habitat penting jenis ikan di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - f. Rehabilitasi Habitat kritis jenis ikan dilindungi/terancam punah di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - g. Penanganan Biota Dilindungi di wilayah kerja LPSPL Sorong;

- h. Pelayanan perizinan/peredaran pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - i. Inisiasi jejaring dan Kerjasama konservasi Kawasan dan keanekaragaman Hayati Laut di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - j. Pemberian Bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja LPSPL Sorong.
3. Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan mandiri melalui:
- a. Identifikasi dan Pendampingan Bantuan Sarana dan Prasarana di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - b. Dukungan Identifikasi dalam rangka fasilitasi KKPRL untuk masyarakat lokal dan tradisional di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - c. Dukungan dalam rangka Pemanfaatan PPK/T di wilayah kerja LPSPL Sorong.
4. Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui:
- a. Identifikasi Kawasan Mangrove di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - b. Penanaman Mangrove di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - c. Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan ekosistem Pesisir di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - d. Identifikasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang akan ditanggulangi pencemarannya di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - e. Identifikasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah kerja LPSPL Sorong.
5. Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dalam rangka Optimalisasi Potensi Ekonomi Kelautan melalui:
- a. Pemetaan potensi biota laut non komersil yang dapat dimanfaatkan di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - b. Pengelolaan Biofarmakologi/desa pangan laut di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - c. Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata Bahari di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - d. Identifikasi kesesuaian teknis Bangunan dan Instalasi Laut di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - e. Identifikasi dan verifikasi pelaksanaan reklamasi di wilayah kerja LPSPL Sorong.



6. Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PRL melalui:
 - a. Pengelolaan SDM Aparatur dan tata laksana di LPSPL Sorong;
 - b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja di LPSPL Sorong;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik di LPSPL Sorong;
 - d. Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Negara, Pengadaan Barang Jasa dan Umum di LPSPL Sorong;

1.4 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Permen KP Nomor 65/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL). Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut (UPT PRL) tersebut dipimpin oleh kepala. UPT PRL terdiri atas UPT KKPN dan UPT PSPL. Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri atas: Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) dan Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL). Klasifikasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut tersebut didasarkan pada analisis beban kerja.

LPSPL Sorong sebagai salah satu UPT PRL mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan Permen KP Nomor 65/PERMEN-KP/2020 Pasal 12, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- b. pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- c. pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- d. pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
- e. pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;



- f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Struktur organisasi LPSPL Sorong sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, sebagaimana berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi LPSPL Sorong

Susunan organisasi Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri atas: Urusan Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT PRL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan



Fungsional diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut dibentuk satuan kerja sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja. Satuan kerja tersebut merupakan unit organisasi nonstruktural di bidang pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang dipimpin oleh koordinator satuan kerja. Koordinator satuan kerja tersebut ditetapkan oleh Dirjen PRL. Berikut lokasi, satuan kerja, dan wilayah kerja LPSPL Sorong berdasarkan Permen KP Nomor 65/PERMEN-KP/2020:

Tabel 1.1 Lokasi satuan kerja dan wilayah kerja LPSPL Sorong.

UPT	Lokasi	Satuan Kerja	Wilayah Kerja
Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL)	Sorong, Provinsi	Ambon	Provinsi Maluku
		-	Provinsi Maluku Utara
	Papua Barat Daya	Merauke	Provinsi Papua Selatan
		-	Provinsi Papua
		-	Provinsi Papua Pegunungan
		-	Provinsi Papua Tengah
		-	Provinsi Papua Barat
		-	Provinsi Papua Barat Daya

Wilayah Kerja LPSPL Sorong sesuai lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2020 seperti terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.2 Wilayah Kerja LPSPL Sorong



Pada tahun 2023, jumlah SDM yang dimiliki LPSPL Sorong mencapai 55 orang yang terdiri dari 30 orang PNS, 1 orang PPPK dan 24 orang tenaga kontrak jasa perorangan dengan komposisi pegawai sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai LPSPL Sorong

No.	Uraian	Tingkat Pendidikan					
		SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat	D3	D4/S1	S2
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-	-	2	2	23	3
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)	-	-	-	-	1	-
3.	Tenaga Kontrak Jasa Perorangan	-	-	11	3	10	1
Jumlah		-	-	13	5	34	3

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2023 adalah:

a. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

b. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran program Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada tahun 2020-2024, rencana kerja dan anggaran LPSPL Sorong tahun 2023, dan penetapan kinerja LPSPL Sorong

c. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

d. BAB IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN 2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra 2020-2024, yang kemudian disusun lebih rinci ke dalam Renstra Unit Eselon I KKP, termasuk Ditjen PRL.

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Presiden menetapkan 5 arahan utama sebagai strategi pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi. Kelima arahan utama ini dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu : (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan kelautan, dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan



perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya. Sebagai tindak lanjut visi dan arahan Presiden serta RPJMN Tahun 2020-2024, disusun Rencana Strategis KKP yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tanggal 26 Juni 2020.

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PRL 2020-2024 adalah “Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”.
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”.
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”.
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Dalam rangka mendukung Misi KKP tersebut, Ditjen PRL mempunyai 3 (tiga) Misi yaitu:

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan Ditjen PRL.



Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Penjabaran dari Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2020-2024, yang didukung oleh Sasaran Program (SP) Ditjen PRL terdiri dari:

- SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat,
- SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan,
- SS-6 Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggungjawab,
- SS-7 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing,
- SS-9 Tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai oleh Ditjen PRL sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program yang dilaksanakan dari pelaksanaan program pengelolaan ruang laut dan program dukungan manajemen. Sasaran Ditjen PRL Tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Renstra Ditjen PRL Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

- a. Sasaran: "Kesejahteraan petambak garam meningkat", dengan Indikator Kinerja: Nilai Tukar Petambak Garam.
- b. Sasaran: "Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat", dengan Indikator Kinerja: Jumlah jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi; Jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan.
- c. Sasaran: "Meningkatnya lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan", dengan Indikator Kinerja: Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan.
- d. Sasaran: "Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat", dengan Indikator Kinerja: Produksi Garam Nasional.
- e. Sasaran: "Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT", dengan Indikator Kinerja: Kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari dan BMKT.



- f. Sasaran: “Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya”, dengan Indikator Kinerja: Komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya.
- g. Sasaran: “Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat”, dengan Indikator Kinerja: Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen PRL (skala 1-5).

2. Program Kualitas Lingkungan Hidup

- a. Sasaran: “Pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan” dengan Indikator Kinerja: Luas kawasan konservasi, Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan.
- b. Sasaran: “Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan” dengan Indikator Kinerja: Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan.
- c. Sasaran: “Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali” dengan Indikator Kinerja: Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih Kembali.
- d. Sasaran: “Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat” dengan Indikator Kinerja: Tingkat Kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai SKPT.

3. Program Dukungan Manajemen

Sasaran: “Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL” dengan Indikator Kinerja: Nilai PMPRB DJPRL, Jumlah Unit Kerja DJPRL berpredikat WBK, Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup Ditjen PRL kurang dari 1 % setiap tahun, Indeks Profesionalitas ASN DJPRL, Nilai PM SAKIP DJPRL, Nilai Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dengan level 3, Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL, Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL, Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik DJPRL, Nilai

indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL.

2.2 Indikator dan Target Kinerja LPSPL Sorong Tahun 2023

Pada tahun 2023 terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama LPSPL Sorong dimana terdapat beberapa indikator yang tidak dipergunakan lagi pada tahun 2023 dan beberapa indikator baru yang dipergunakan pada tahun 2023. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Tahun 2022 yang tidak ditargetkan kembali adalah:

- a. Rekomendasi kebijakan monitoring dan verifikasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Rekomendasi Kebijakan)
- b. Kerjasama, jejaring dan/atau kemitraan konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Kesepakatan)
- c. Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

Sedangkan indikator baru dan/atau yang dilakukan penyesuaian dan dipergunakan pada tahun 2023 adalah:

- a. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen). Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan penyesuaian dari IKU rekomendasi kebijakan monitoring dan verifikasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Rekomendasi Kebijakan). Perubahan atau penyesuaian ini juga merubah satuan target dari rekomendasi kebijakan menjadi dokumen.
- b. Kelompok masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja LPSPL Sorong yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok) yang merupakan IKU baru pada tahun 2023.
- c. Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (kawasan) yang merupakan IKU baru pada tahun 2023.
- d. Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai) yang merupakan IK baru pada tahun 2023.

Pada tahun 2023, Perjanjian Kinerja LPSPL Sorong dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut ditandatangani pada tanggal 9 Januari 2023 yang memuat 10 Indikator Kinerja Utama dan 8 Indikator Kinerja dengan anggaran sebesar Rp. 12.053.366.000 yang mendukung kegiatan perencanaan ruang laut, kegiatan perlindungan

dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, kegiatan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan kegiatan dukungan manajemen internal lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut. Akan tetapi pada halaman IV.A DIPA Nomor: DIPA-032.07.2.477440/2023 dijelaskan bahwa terdapat jumlah dana yang tidak dapat dicairkan sejumlah Rp. 1.965.000.000 yang terdiri dari Rp. 1.630.000.000 dari belanja barang (52) dan Rp. 335.000.000 dari belanja modal (53), sehingga mempengaruhi pelaksanaan beberapa kegiatan. Dokumen perjanjian kinerja LPSPL Sorong mengalami perubahan pada bulan Agustus pasca perubahan kepala LPSPL Sorong.

Pada bulan September 2023, LPSPL Sorong mendapatkan pemanfaatan PNBP dari perolehan PNBP pelayanan jenis ikan di wilayah kerja LPSPL Sorong dan pemanfaatan PNBP dari pelayanan pemanfaatan ruang laut yang diberikan dari perolehan PNBP Direktorat Perencanaan Ruang Laut. LPSPL Sorong mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 2.338.638.000 dengan rincian Rp. 1.650.038.000 diperoleh dari PNBP Direktorat Perencanaan Ruang Laut dan Rp. 688.600.000 diperoleh dari PNBP pelayanan jenis ikan di wilayah kerja LPSPL Sorong. Namun penambahan anggaran tersebut belum tercantum pada dokumen perjanjian kinerja.

Pada triwulan IV Tahun 2023 terdapat perubahan perjanjian kinerja antara LPSPL Sorong dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Adapun beberapa indikator kinerja utama dan indikator kinerja mandatory yang dilakukan perubahan atau penyesuaian sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Utama Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja LPSPL Sorong yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru yang dihapus dari dokumen perjanjian kinerja karena anggaran yang mendukung kegiatan ini di blokir.
- b. Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja LPSPL Sorong yang dihapus dari dokumen perjanjian kinerja karena anggaran yang mendukung kegiatan ini telah direalokasi ke Bendahara Umum Negara.
- c. Indikator Kinerja Mandatory Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LPSPL Sorong targetnya meningkat dari 89 menjadi 93,75.



Data anggaran juga terdapat perubahan pasca anggaran yang terkena *automatic adjustment* direalokasi ke Bendahara Umum Negara. Postur anggaran yang terdapat di dokumen perjanjian kinerja yaitu kegiatan perencanaan ruang laut sebesar Rp. 2.000.038.000, kegiatan perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut sebesar Rp. 3.113.600.000, kegiatan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil Rp. 40.000.000, dan kegiatan dukungan manajemen internal lingkup ditjen pengelolaan ruang laut sebesar Rp. 7.438.366.000. Namun, pada anggaran tersebut masih terdapat blokir sebesar Rp. 375.000.000 pada kegiatan perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut karena ketidaksesuaian rincian output.

Tabel 2.1 Indikator dan Target Kinerja LPSPL Sorong Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	1. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	3
2.	Terwujudnya Kawasan Konservasi yang Ditetapkan di Tingkat Daerah di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	2. Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Daerah)	2
3.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	3. Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kelompok)	3
4.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	4. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	4
5.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	5. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	2
6.	Meningkatnya Nilai PNBP LPSPL Sorong	6. Nilai PNBP LPSPL Sorong (Rp.000)	718.180
7.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LPSPL Sorong	7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	93,75
		8. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	82
		9. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LPSPL Sorong (Nilai)	75
		10. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)	85
		11. Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	75
		12. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)	4



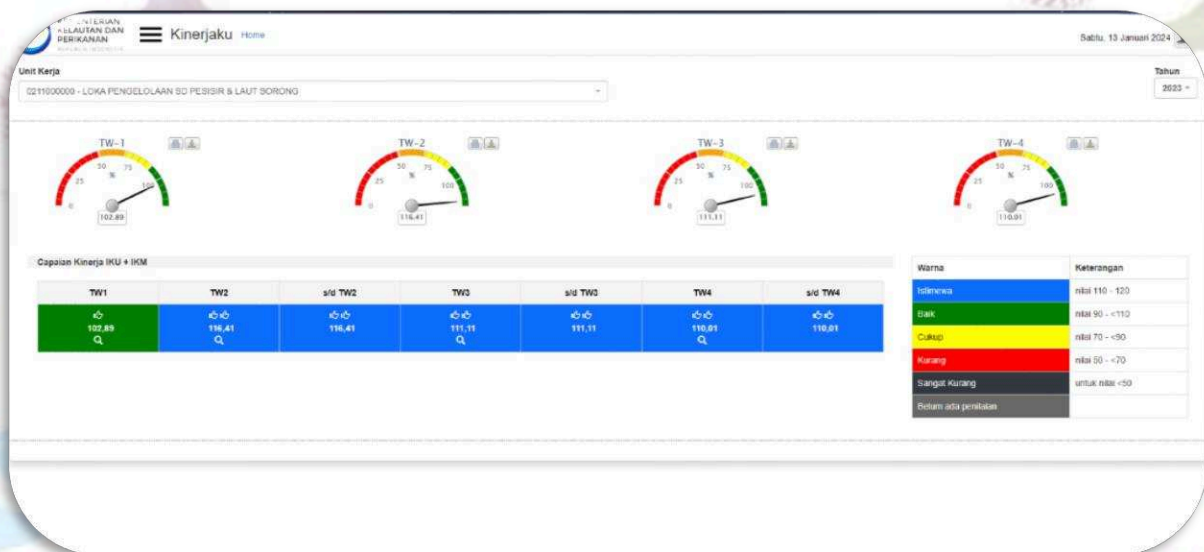
	13.	Persentase Unit Kerja Lingkup LPSPL Sorong yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92
	14.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup LPSPL Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
	15.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LPSPL Sorong (%)	100
	16.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%)	77,5

Lindungi
Kami Yuk



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja LPSPL Sorong dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi IKU/IKM. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja LPSPL Sorong pada Triwulan IV Tahun 2023 adalah **110,01** (kategori Biru=Istimewa), seperti gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1 NKO LPSPL Sorong Tahun 2023.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Mandatory (IKM) serta target dan realisasinya pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 IKU, IKM, Target dan Realisasi Kinerja LPSPL Sorong Tahun 2023

Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong						
IKU/IKM	FREKUENSI	TARGET	TAHUN 2023			
			TARGET	REALISASI	% KINERJAKU	
IKU 1	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	Tahunan	3	3	3	100
Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Kawasan Konservasi yang Ditetapkan di Tingkat Daerah di Wilayah Kerja LPSPL Sorong						
IKU 2	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan	Tahunan	2	2	2	100

	Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Daerah)					
Sasaran Kegiatan 3.						
Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong						
IKU 3	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kelompok)	Triwulanan	3	3	3	100
Sasaran Kegiatan 4.						
Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong						
IKU 4	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	Triwulanan	4	4	7	120
Sasaran Kegiatan 5.						
Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong						
IKU 5	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	Tahunan	2	2	5	120
Sasaran Kegiatan 6.						
Meningkatnya Nilai PNBPLPSPL Sorong						
IKU 6	Nilai PNBPLPSPL Sorong (Rp.000)	Tahunan	718.180	718.180	1.647.742,751	120
Sasaran Kegiatan 7.						
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LPSPL Sorong						
IKM 7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	Semesteran	93,75	93,75	91,83	97,95
IKM 8	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	Tahunan	82	82	92,11	112,33
IKM 9	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LPSPL Sorong (Nilai)	Tahunan	75	75	81,64	108,85

IKM 10	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)	Semesteran	85	85	89,17	104,90
IKM 11	Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	Tahunan	75	75	82,70	110,27
IKM 12	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)	Triwulanan	4	4	4	100
IKM 13	Persentase Unit Kerja Lingkup LPSPL Sorong yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	Triwulanan	92	92	133,3	120
IKM 14	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup LPSPL Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	Triwulanan	75	75	100	120
IKM 15	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LPSPL Sorong (%)	Tahunan	100	100	100	100
IKM 16	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%)	Tahunan	77,5	77,5	100	120

3.1 Sasaran Kegiatan 1 Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong, LPSPL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 1 kedalam 1 (satu) IKU, yaitu dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (dokumen).

3.1.1 IKU 1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi/verifikasi, sosialisasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut. Kegiatan pengendalian pemanfaatan

ruang laut merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang laut, antara lain dapat mengetahui menemukan penggunaan, pemanfaatan serta riwayat perizinan lokasi, dimana pada implementasi Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang menjadi KKPRL.

Cara menghitung capaian pada IKU ini yaitu menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen identifikasi/verifikasi, sosialisasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja LPSPL Sorong yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.2 Capaian IKU 1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong

SK.1	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong									
IKU 1	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong									
Realisasi 2022	Tahun 2023				Tahun 2023		Renstra LPSPL Sorong 2020-2024			
2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2022	Target PK 2023	% Realisasi thd PK	Target s.d 2023	Realisasi s.d 2023	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2020-2024
-	3	3	100%	-	3	100%				

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

1. Capaian IKU Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen) Tahun 2023

Target IKU Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong merupakan IKU baru. Target Kinerja yang ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja LPSPL Sorong tahun 2023 adalah 3 Dokumen, yang periode pelaporannya tahunan. Pada triwulan IV tahun 2023, indikator kinerja ini telah tercapai 3 Dokumen atau 100% dari target pada dokumen perjanjian kinerja. Capaian 3 Dokumen tersebut didapat dari dokumen sosialisasi penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut, dokumen verifikasi pemanfaatan ruang laut, dan dokumen monitoring pemanfaatan ruang laut.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong dengan IKU Dokumen



Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong ini merupakan Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target baru. sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja ini merupakan indikator baru yang ada pada tahun 2023, sehingga belum tercantum dalam dokumen Renstra 2020-2024 dan tidak dapat dibandingkan.

4. **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi anggaran dan efisiensi sumberdaya manusia (SDM) dalam pelaksanaan kegiatan. LPSPL Sorong dalam melaksanakan penilaian teknis memanfaatkan teknologi komunikasi secara *online*, sehingga mengakibatkan efisiensi anggaran, efisiensi anggaran juga didapat dari adanya satuan kerja pada provinsi lain. Efisiensi sumberdaya diakibatkan karena SDM LPSPL Sorong telah mengikuti bimbingan teknis terkait penyelenggaraan KKPRL sehingga dapat diandalkan dalam melaksanakan proses identifikasi, verifikasi/penilaian teknis, dan monitoring kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.

5. **Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala, dan Solusi**

a. **Analisis Keberhasilan**

Ketercapaian target ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya sumberdaya manusia (SDM) LPSPL Sorong telah mengikuti bimbingan teknis terkait penyelenggaraan KKPRL dan sertifikasi pilot drone sehingga kompetensinya menunjang pelaksanaan kegiatan, koordinasi aktif dengan dengan Direktorat Pengelolaan Ruang Laut, serta Pemerintah Daerah dan *stakeholder* terkait.

b. **Analisis Kegagalan/Kendala**

Belum terdapat kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini. Namun karena luasnya wilayah kerja LPSPL Sorong dan adanya keterbatasan jumlah sumberdaya manusia maka masih terdapat kabupaten/kota yang belum dilakukan sosialisasi pemanfaatan ruang laut.



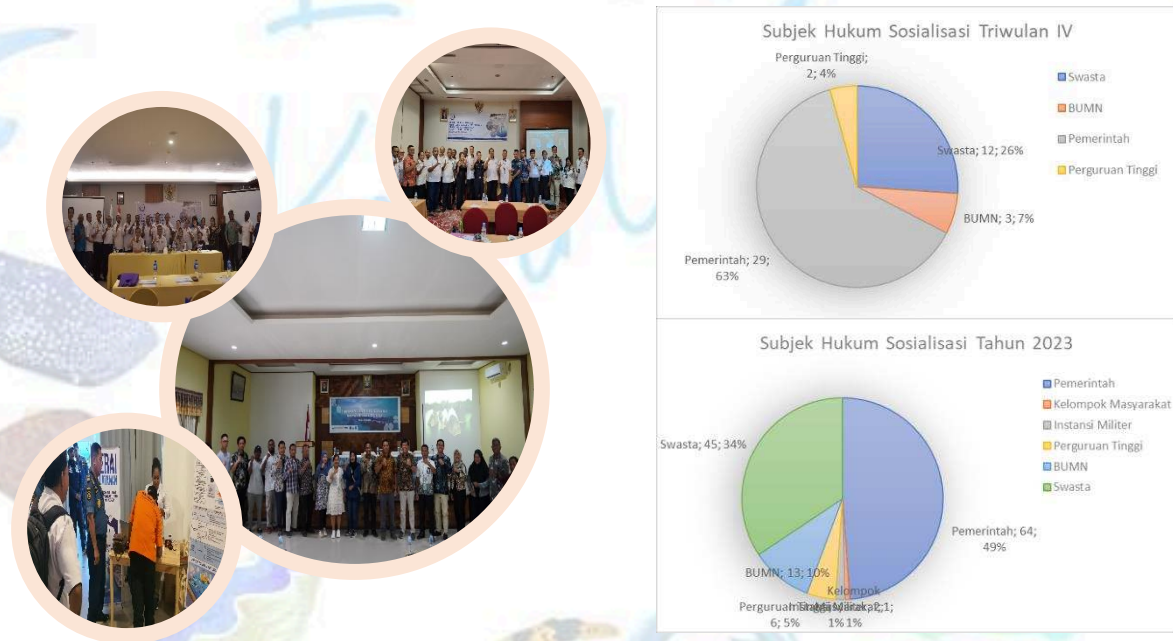
c. Solusi

Belum terdapat kendala sehingga belum terdapat solusi, untuk sosialisasi pada kabupaten/kota yang belum dilakukan sosialisasi akan dilaksanakan atau dianggarkan pada tahun selanjutnya. LPSPL Sorong juga melakukan rekrutmen tenaga ahli pemetaan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan indikator kinerja ini.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKU 1

a. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut

Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk mensosialisasikan regulasi dan kebijakan tentang penyelenggaraan penataan ruang laut, mensosialisasikan tahapan-tahapan pengajuan perizinan KKPRL melalui sistem OSS, dan mengidentifikasi isu serta permasalahan terkait perizinan pemanfaatan ruang laut. LPSPL Sorong melakukan sosialisasi dengan cara berkunjung langsung ke subjek hukum/pelaku pemanfaatan ruang laut yang terdapat di wilayah kerja.



Gambar 3.2 Dokumentasi dan Komposisi Peserta Sosialisasi.

Pada triwulan IV LPSPL Sorong telah melaksanakan sosialisasi di 3 Kabupaten/Kota yang terdapat pada 3 Provinsi diantaranya Kota Manokwari Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya, dan Kabupaten Morotai Provinsi Maluku Utara. Pada triwulan IV, sosialisasi dilakukan kepada 46 subjek hukum yang terdiri dari 12 subjek dari Pelaku Usaha Swasta (26%), 3 subjek BUMN (7%), 29



subjek Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah (63%), dan 2 subjek Perguruan Tinggi (4%).

Pada tahun 2023 LPSPL Sorong telah melakukan sosialisasi kepada 131 subjek hukum pada 12 Kabupaten/Kota di 6 Provinsi Wilayah Kerja LPSPL Sorong. Sosialisasi dilakukan kepada 64 subjek dari Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah (48,85%), 1 subjek Kelompok Masyarakat (0,76%), 2 subjek Instansi Militer (1,53%), 6 subjek Perguruan Tinggi (4,58%), 13 subjek BUMN (9,92%) dan 45 subjek Pelaku Usaha Swasta (34,35%). Dari hasil sosialisasi tersebut, beberapa subjek hukum akan mengajukan perizinan dasar KKPRL dengan pendampingan dari LPSPL Sorong.

b. Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut

Verifikasi merupakan sebagian proses dalam hal pemberian pertimbangan dan rekomendasi agar dokumen KKPRL dapat diterbitkan atau tidak dapat diterbitkan, sehingga pemrakarsa mendapatkan kejelasan status dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendampingan prapendaftaran kepada stakeholder, melakukan verifikasi teknis atau penilaian teknis dokumen permohonan, dan menginventarisasi subjek hukum yang telah memohonkan KKPRL.



Gambar 3.3 Dokumentasi Pendampingan Pra Permohonan dan Verifikasi Teknis.

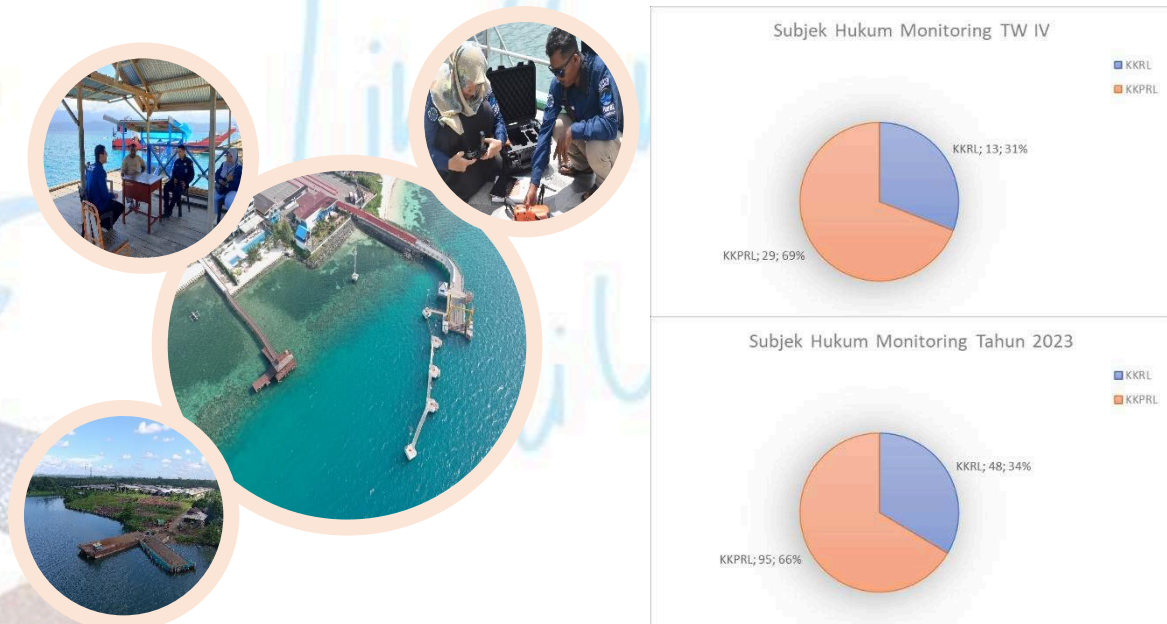
Pada triwulan IV dengan periode bulan Oktober-Desember tahun 2023, LPSPL Sorong telah melaksanakan pendampingan pra pendaftaran berupa konsultasi dan asistensi kepada 3 subjek hukum di wilayah kerja LPSPL Sorong. Selain itu, telah dilaksanakan verifikasi dokumen kepada 7 pemrakarsa.

Pada tahun 2023 LPSPL Sorong telah melaksanakan pendampingan pra pendaftaran berupa identifikasi, konsultasi, dan asistensi kepada 26 subjek hukum.

Selain itu, LPSPL Sorong telah melaksanakan verifikasi dokumen pada 36 pemrakarsa dengan total 89 pengajuan permohonan dengan total luasan pemanfaatan ruang laut yang dimohonkan 2.174,145 hektar. Dengan potensi penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp. 44.690.559.100 dan Insetif 0 senilai Rp. 5.611.753.400

c. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut

Monitoring pemanfaatan ruang laut bermaksud untuk mengetahui kondisi pemanfaatan ruang laut yang pelaku usaha lakukan saat ini. Monitoring dilakukan juga untuk mengidentifikasi isu dan permasalahan di lapangan terkait pemanfaatan ruang laut. Monitoring dilaksanakan dengan kunjungan langsung ke lokasi subjek hukum yang melakukan pemanfaatan ruang laut.



Gambar 3.4 Dokumentasi Kegiatan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut.

Monitoring pada triwulan IV dilaksanakan pada 8 Kabupaten/Kota yang terdapat pada 5 Provinsi diantaranya Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Jayapura. Hasil monitoring yang dilaksanakan yaitu lokasi yang dimonitoring secara keseluruhan sebanyak 36 Subjek hukum yang terdiri dari 42 kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan status 13 kegiatan konfirmasi KKRL (31%) dan 29 kegiatan persetujuan KKPRL (69%).



Pada tahun 2023 telah melaksanakan monitoring pemanfaatan ruang laut pada 17 Kabupaten/Kota pada 6 Provinsi di wilayah kerja LPSPL Sorong. Jumlah lokasi yang dimonitoring secara keseluruhan sebanyak 119 subjek hukum yang terdiri dari 143 kegiatan dengan status 48 kegiatan merupakan konfirmasi KKPRL (33,57%) dan 95 kegiatan merupakan persetujuan KKPRL (66,43%).

d. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut

Kegiatan peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan kemampuan dasar untuk mengoperasikan drone serta mengoperasikan perangkat lunak pemetaan. Hasil dari kegiatan ini yaitu 15 orang/pegawai LPSPL Sorong telah bersertifikat sebagai pilot drone dan 6 orang/pegawai bersertifikat pemetaan dan pengoperasian perangkat lunak sistem informasi geografis.



Gambar 3.5 Dokumentasi Peningkatan Kapasitas SDM LPSPL Sorong.

7. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I tahun 2024 untuk mendukung pencapaian IKU ini, akan dilaksanakan sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang laut pada Kota/Kabupaten di wilayah kerja LPSPL Sorong. Selain itu, LPSPL Sorong akan melaksanakan pendampingan pra pendaftaran seperti identifikasi, konsultasi, dan asistensi serta melaksanakan penilaian teknis terhadap dokumen permohonan oleh pelaku usaha.



8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan sasaran kegiatan terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja LPSPL Sorong dengan IKU dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (dokumen), sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp. 1.926.161.523 atau 98,58% dari anggaran 1.953.838.000 yang dapat dilihat pada tabel 3.3 hingga tabel 3.7. Pagu anggaran yang mendukung indikator kinerja ini sebesar Rp. 1.953.838.000 yang bersumber dari APBN (Rupiah Murni) sebesar Rp. 303.800.000 dan bersumber dari PNBPN sebesar Rp. 1.650.038.000.

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran IKU 1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (dokumen) bersumber dari Rupiah Murni

No.	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)	Blokir (Rp)
	Rekomendasi Kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Rekomendasi Kebijakan)	303.800.000	299.325.787	4.474.213	98,52%	-
a.	Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	137.800.000	136.281.326	1.518.674	98,90%	-
b.	Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut	62.000.000	59.414.958	2.585.042	95,83%	-
c.	Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	104.000.000	103.629.503	370.497	99,64%	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran IKU 1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (dokumen) bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak

No.	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)	Blokir (Rp)
	Rekomendasi Kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Rekomendasi Kebijakan)	874.343.000	855.817.644	18.525.356	97,88%	-
a.	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang Laut Wilayah Kerja	203.400.000	199.588.950	3.811.050	98,13%	-
b.	Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundangan-Undangan	385.400.000	380.730.431	4.669.569	98,79%	-

	Perijinan Pemanfaatan Ruang Laut					
c.	Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut	198.160.000	192.688.730	5.471.270	97,24%	
d.	Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	87.383.000	82.809.533	4.573.467	94,77%	

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran pada Komponen Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak

No.	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)	Blokir (Rp)
	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	530.038.000	529.184.096	853.904	99,84%	
a.	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	530.038.000	529.184.096	853.904	99,84%	

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran pada Komponen Petugas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang Ditingkatkan Kompetensinya bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak

No.	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)	Blokir (Rp)
	Petugas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang Ditingkatkan Kompetensinya	222.990.000	219.168.436	3.821.564	98,29%	
a.	Peningkatan Kompetensi Petugas Penyelenggaraan Penataan Ruang	222.990.000	219.168.436	3.821.564	98,29%	

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran pada Komponen Pemerintah Daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak

No.	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)	Blokir (Rp)
	Pemerintah Daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi	22.667.000	22.665.560	1.440	99,99%	
a.	Dukungan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah / Kawasan Strategis Nasional	22.667.000	22.665.560	1.440	99,99%	

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

9. Rencana Penarikan Dana Triwulan IV TA. 2023

Merujuk pada Rencana Penarikan Dana (RPD) sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA LPSPL Sorong Nomor: SP DIPA-032.07.2.477440/2023 tanggal 27 Desember 2023



(Revisi ke-18) target dan realisasi anggaran bulanan untuk mendukung pencapaian IKU dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja LPSPS Sorong (dokumen) dapat dilihat pada tabel 3.8 hingga 3.12. Pada tabel tersebut dapat kita lihat bahwa target dan realisasi rencana penarikan dana pada triwulan IV terdapat perbedaan target dan realisasi, hal ini disebabkan oleh penyusunan halaman III DIPA pada level komponen. Sehingga kedepannya harus dilakukan penyusunan rencana penarikan dana pada level subkomponen.

Tabel 3.8 Rencana Penarikan Dana IKU 1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja LPSPS Sorong (dokumen) bersumber dari Rupiah Murni

No.	IKU	Pagu (Rp)	2023			
			Triwulan IV			
			Okt	Nov	Des	
Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja LPSPS Sorong (dokumen)		800.000.000				
a.	Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Target	137.800.000	32.781.554	36.061.696	31.727.569
		Realisasi		-	-	600.000
b.	Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut	Target	62.000.000	2.278.004	9.275.764	37.448.062
		Realisasi		244.800	-	4.628.170
c.	Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	Target	104.000.000	3.779.725	13.913.323	27.086.882
		Realisasi		-	-	2.384.650

Sumber Data: LPSPS Sorong, per 31 Desember 2023

Tabel 3.9 Rencana Penarikan Dana IKU 1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja LPSPS Sorong (dokumen) bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak

No.	IKU	Pagu (Rp)	2023			
			Triwulan IV			
			Okt	Nov	Des	
Rekomendasi Kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja LPSPS Sorong (Rekomendasi Kebijakan)						
a.	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang Laut Wilayah Kerja	Target	203.400.000	48.387.287	53.228.948	46.831.544
		Realisasi		75.070.412	50.439.927	13.455.700
b.	Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundangan-Undangan Perijinan Pemanfaatan Ruang Laut	Target	385.400.000	91.683.681	100.857.604	88.735.882
		Realisasi		97.782.111	139.708.322	143.239.998

c.	Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut	Target	198.160.000	7.280.795	29.646.536	119.688.856
		Realisasi		9.314.000	38.922.300	144.452.430
d.	Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	Target	87.383.000	3.175.804	11.690.267	22.758.979
		Realisasi		-	31.784.317	51.025.216

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

Tabel 3.10 Rencana Penarikan Dana pada Komponen Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak

No.	IKU	Pagu (Rp)	2023			
			Triwulan IV			
			Okt	Nov	Des	
Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut						
a.	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	Target	530.038.000	346.000.000	167.800.000	16.238.000
		Realisasi		346.000.000	167.800.000	15.384.096

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

Tabel 3.11 Rencana Penarikan Dana pada Komponen Petugas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang Ditingkatkan Kompetensinya bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak

No.	IKU	Pagu (Rp)	2023			
			Triwulan IV			
			Okt	Nov	Des	
Petugas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang Ditingkatkan Kompetensinya						
a.	Peningkatan Kompetensi Petugas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Target	222.990.000	-	81.286.995	71.563.977
		Realisasi		-	81.286.995	67.742.413

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

Tabel 3.12 Rencana Penarikan Dana pada Komponen Pemerintah Daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak

No.	IKU	Pagu (Rp)	2023			
			Triwulan IV			
			Okt	Nov	Des	
Pemerintah Daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi						
a.	Dukungan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah / Kawasan Strategis Nasional	Target	22.667.000	-	12.813.786	9.853.214
		Realisasi		-	12.813.786	9.851.774

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023



3.2 Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Kawasan Konservasi yang Ditetapkan di Tingkat Daerah di Wilayah Kerja LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Terwujudnya Kawasan Konservasi yang Ditetapkan di Tingkat Daerah di Wilayah Kerja LPSPL Sorong, LPSPL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 2 ini kedalam 1 IKU, yaitu Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong.

3.2.1 IKU 2 Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong

Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah Provinsi yang didampingi percepatan usulan penetapan Kawasan konservasi dapat melalui pendampingan penyusunan rencana zonasi, pendampingan penyusunan rencana pengelolaan, atau pendampingan lain sesuai dengan kondisi kawasan konservasi. Sesuai dengan Permen KP nomor 65 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Teknis diberikan tugas untuk melaksanakan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan.

Teknik menghitung capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong yang didampingi dalam proses percepatan usulan penetapan Kawasan Konservasi-nya.

Tabel 3.13 Capaian IKU 2 Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Daerah)

SK.2	Terwujudnya Kawasan Konservasi yang Ditetapkan di Tingkat Daerah di Wilayah Kerja LPSPL Sorong									
IKU 2	Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Daerah)									
Realisasi 2022	Tahun 2023				Tahun 2023		Renstra LPSPL Sorong 2020-2024			
2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2022	Target PK 2023	% Realisasi thd PK	Target s.d 2023	Realisasi s.d 2023	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2020-2024
3	3	3	100%	(-1)	2	100%				

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023



1. Capaian IKU Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPSPL Sorong (Daerah) Tahun 2023

Target IKU Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPSPL Sorong (Daerah) yaitu 2 Daerah. Pada tahun 2023 capaian indikator ini adalah 2 daerah yang didampingi oleh LPSPSPL Sorong, diantaranya: 1) Pendampingan Pemerintah Daerah dalam Upaya Percepatan Penetapan Kawasan Konservasi Biak Numfor, Provinsi Papua. Pendampingan dilaksanakan sampai pada tahap pengusulan penetapan Calon Kawasan Konservasi Biak Numfor kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua atas nama Gubernur Nomor 522.1/8514/SET. 2) Pendampingan Daerah dalam Upaya Percepatan Penetapan Kawasan Konservasi Pulau Buru, Provinsi Maluku. Pendampingan dilaksanakan sampai pada tahap konsultasi publik II dalam rangka menyusun rencana zonasi Calon Kawasan Konservasi Pulau Buru.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

Capaian kinerja untuk IKU ini pada tahun 2022 yaitu 3 Daerah dari target kinerja 2 Daerah. Daerah yang didampingi pada tahun 2022 dalam percepatan penetapan kawasan konservasi yaitu Provinsi Papua Barat Daya (CKKD Misool Utara), Provinsi Papua Selatan (CKKD Kolepom), dan Provinsi Maluku (CKKD Kepulauan Babar). Sedangkan capaian kinerja untuk IKU ini pada tahun 2023 tercapai 2 Daerah dari target 2 Daerah. Daerah yang didampingi pada tahun 2023 dalam percepatan penetapan kawasan konservasi yaitu Provinsi Papua (CKKD Biak Numfor) dan Provinsi Maluku (CKKD Buru). Pada tahun 2022 dan 2023 IKU ini memiliki target yang sama yaitu 2 Daerah, namun capaian tahun 2023 lebih kecil dari capaian tahun 2022 yaitu 2 Daerah. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 dalam pendampingan percepatan penetapan kawasan konservasi pada beberapa daerah dilakukan bersama mitra NGO (*Non Governmental Organization*).

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang baru ada pada tahun 2022 dan belum tercantum dalam dokumen Renstra 2020-2024, sehingga tidak dapat dibandingkan.



4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Efisiensi anggaran terjadi karena adanya kerjasama pembiayaan dalam melaksanakan aksi mendukung percepatan penetapan kawasan konservasi daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong dengan Pemerintah Daerah. Efisiensi anggaran juga disebabkan LPSPL Sorong memiliki satuan kerja di beberapa Provinsi sehingga meminimalkan belanja perjalanan dinas.

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Sumberdaya manusia LPSPL Sorong yang handal serta dukungan mitra konservasi dan keanekaragaman hayati laut dalam inisiasi, identifikasi, pencadangan dan pengusulan penetapan kawasan konservasi perairan serta koordinasi yang harmonis dengan pemerintah daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong menjadikan IKU 2 ini dapat berprogres dalam mencapai target yang ditentukan.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Kegiatan ini terdapat kendala berupa penentuan waktu pelaksanaan pendampingan, karena harus menemukan titik waktu yang sesuai dengan para stakeholder.

c. Solusi

LPSPL Sorong selalu aktif dalam berkoordinasi dengan stakeholder terkait terutama dengan Pemerintah Daerah. LPSPL Sorong selalu mendorong Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan linimasa yang telah disepakati.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKU 2

a. Pendampingan Percepatan Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Maluku

Pendampingan yang dilaksanakan di Provinsi Maluku yaitu sesuai dengan kondisi kawasan konservasinya. Pendampingan dilakukan pada Calon Kawasan Konservasi Daerah (CKKD) di Perairan Buru, Kabupaten Buru. Pendampingan penetapan kawasan konservasi di Perairan Buru oleh LPSPL Sorong berlangsung sejak tahun 2022 hingga tahun 2023. LPSPL Sorong secara aktif memberikan dukungan



teknis maupun masukan dalam kegiatan koordinasi awal inisiasi, rapat pokja, konsultasi publik I, dan konsultasi publik II.

LPSP Sorong terlibat atau melakukan pendampingan dalam rapat koordinasi awal inisiasi penetapan Kawasan Konservasi Daerah di Perairan Pulau Buru. Rapat awal ini merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai langkah awal sebelum pembentukan tim Kelompok Kerja (POKJA) penyusun dokumen penetapan Kawasan Konservasi Perairan di Pulau Buru. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi stakeholder-stakeholder terkait yang akan menjadi bagian dari tim POKJA tersebut, selain itu juga untuk merumuskan lini masa/timeline proses penetapan KKKPD Buru.

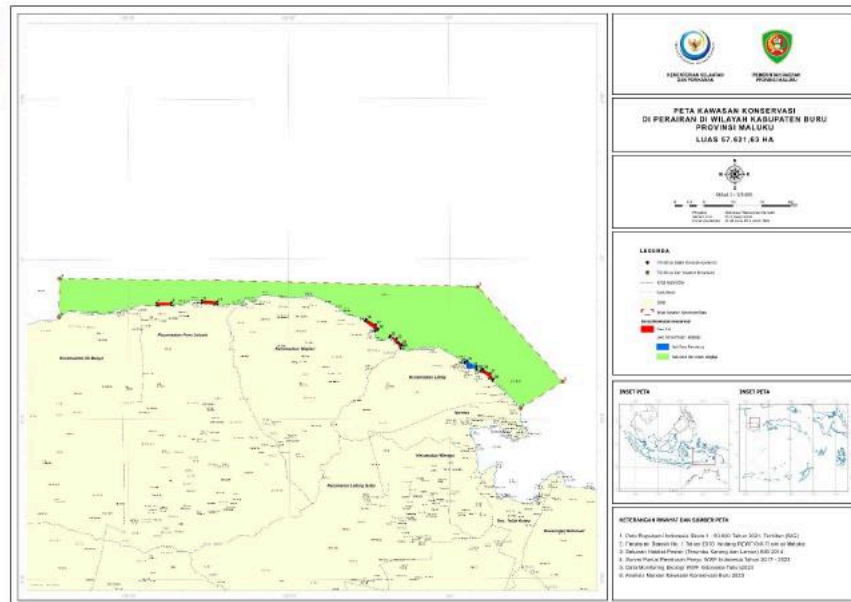


Gambar 3.6 Dokumentasi Pendampingan CKKD Buru.

Konsultasi Publik I dalam rangka penetapan kawasan konservasi di Perairan Buru dilaksanakan pada 10 desa yang termasuk dalam 5 kecamatan yang menjadi area kawasan konservasi. Pada konsultasi publik I disampaikan bahwa luas usulan awal Kawasan Konservasi Buru sebesar 57.760,65 ha yang terdiri dari Zona Inti seluas 699,17 ha, Zona Pemanfaatan Terbatas Sub Zona Pariwisata sebesar 176,19 ha, dan Zona Pemanfaatan Terbatas Sub Zona Perikanan Tangkap sebesar 56.885,29 ha. Zona inti tersebar pada 5 lokasi dengan dasar zona inti 1, 2, dan 3 diperuntukan untuk target konservasi ekosistem pesisir seperti Terumbu karang dan Lamun, sedangkan untuk Zona Inti 4 dan 5 diperuntukan untuk target konservasi pantai peneluran Penyu, khususnya Penyu Belimbing. Hasil dari konsultasi publik I bahwa masyarakat menyetujui dengan usulan yang disampaikan dengan beberapa usulan perubahan seperti penambahan Sub Zona Pariwisata di Desa Lamahang dan Desa Hatawano.



Konsultasi publik II dilaksanakan pada tingkat kabupaten bertujuan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi saran masukan terkait usulan inisiatif calon kawasan konservasi daerah di Kabupaten Buru. Hasil dari konsultasi publik II dituangkan dalam berita acara yang mengakomodir usulan penambahan Sub Zona Pariwisata di Desa Lamahang dan Desa Hatawano.



Gambar 3.7 Peta Usulan CKKD Buru.

Kategori Kawasan Konservasi yang diusulkan adalah kategori Taman dengan target kawasan konservasi adalah ekosistem Terumbu Karang dan Lamun, serta Pantai Peneluran Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*).

b. Pendampingan Percepatan Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Papua

Pendampingan yang dilaksanakan di Provinsi Papua fokus pada Calon Kawasan Konservasi Daerah (CKKD) Biak dengan target bahwa pendampingan dilaksanakan hingga tersusunnya draft rencana zonasi. Pendampingan penetapan kawasan konservasi di Perairan Kabupaten Biak Numfor oleh LPSPL Sorong berlangsung sejak tahun 2021 hingga tahun 2023. LPSPL Sorong secara aktif memberikan dukungan teknis maupun masukan dalam rapat-rapat koordinasi pokja, konsultasi publik tingkat distrik, konsultasi teknis tingkat kabupaten, dan konsultasi publik tingkat provinsi. Kegiatan pendampingan oleh LPSPL Sorong pada tahun 2023 meliputi konsultasi



publik, konsultasi teknis, hingga pada tahap pengusulan penetapan CKKD Biak dari Gubernur Papua kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

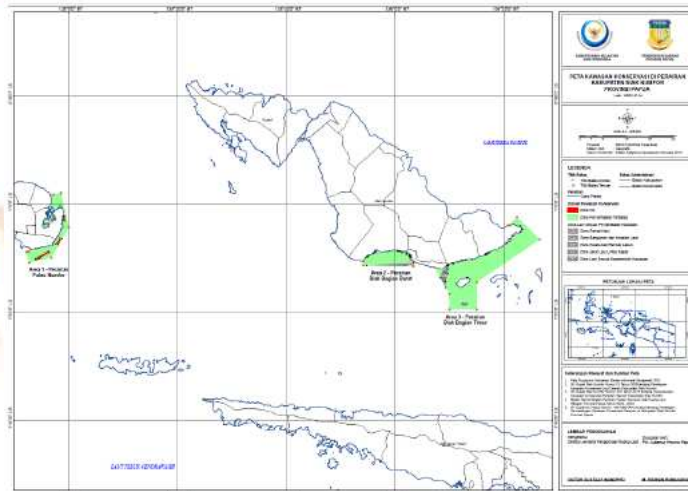
Hasil konsultasi teknis penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi di Perairan Kabupaten Biak Numfor mendapatkan beberapa masukan diantaranya update data terkait ekosistem lamun dan terumbu karang serta keberadaan hiu dalam area kawasan, mengalokasikan zona lainnya untuk alur pelayaran dan kabel/pipa bawah laut, merapikan polygon zonasi/sub zonasi yang mempunyai bentuk yang tidak beraturan, dan perbedaan batas Taman Wisata Perairan Padaido, menunggu konfirmasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan difasilitasi Pemerintah Provinsi Papua dan Kementerian ATR/BPN.



Gambar 3.8 Dokumentasi Pendampingan CKKD Biak Numfor.

Konsultasi publik kedua penyusunan rencana zonasi Calon Kawasan Konservasi di Perairan Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua dilaksanakan pada 4 Distrik di Pulau Biak yaitu Distrik Oridek, Biak Timur, Biak Kota, dan Yendidori serta 3 Distrik di Pulau Numfor yaitu Distrik Poiru, Bruyadori, dan Orkeri. Berdasarkan hasil konsultasi publik kedua, semua peserta masyarakat dari ketujuh Distrik tersebut menyetujui dan mendukung Penyusunan Rencana Zonasi Calon Kawasan Konservasi di Perairan Kabupaten Biak Numfor dengan beberapa poin perbaikan.





Gambar 3.9 Peta Kawasan Konservasi di Perairan Biak Numfor.

Setelah melalui proses perbaikan-perbaikan dokumen dalam setiap forum rapat/konsultasi publik/konsultasi teknis, pada tanggal 27 Juli 2023 Pemerintah Provinsi Papua mengajukan surat usulan penetapan kawasan konservasi di Perairan Kabupaten Biak Numfor dengan kategori taman kepada Menteri Kelautan dan Perikanan seluas 49.062,43 hektar.

c. Kegiatan Pendukung Lainnya

Adapun beberapa kegiatan yang diikuti atau didukung oleh LPSPL Sorong dalam pendampingan daerah diantaranya LPSPL Sorong menghadiri kegiatan peluncuran Kawasan Konservasi di Perairan Pulau Kolepom Kabupaten Merauke, LPSPL Sorong melakukan pendampingan identifikasi dan inventarisasi data calon Kawasan Konservasi Maritim Kabupaten Supiori.

7. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I tahun 2024 untuk mendukung pencapaian IKU ini, akan dilaksanakan pendampingan upaya percepatan penetapan calon kawasan konservasi di Perairan Buru Selatan, Provinsi Maluku. LPSPL Sorong akan melakukan koordinasi awal untuk melaksanakan rapat pokja sebagai inisiasi awal pendampingan.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan sasaran kegiatan terwujudnya kawasan konservasi yang ditetapkan di tingkat daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong dengan IKU

daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja LPSPL Sorong (Daerah), sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp. 241.481.367 atau 96,59% dari pagu anggaran Rp. 250.000.000 yang dapat dilihat pada tabel 3.14.

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran IKU 2 Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Daerah)

No.	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Daerah)	250.000.000	241.481.367	8.518.633	96,59%
a.	Pendampingan Percepatan Penetapan Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil pulau di Maluku	56.832.000	49.555.727	7.276.273	87,20%
b.	Pendampingan Percepatan Penetapan Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil pulau di Papua	149.780.000	149.714.299	65.701	99,96%
c.	Kegiatan dalam rangka Koordinasi/Menghadiri Undangan/Sosialisasi/Event (Daerah/Nasional)	43.388.000	42.211.341	1.176.659	97,29%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

9. Rencana Penarikan Dana Triwulan IV TA. 2023

Merujuk pada Rencana Penarikan Dana (RPD) sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA LPSPL Sorong Nomor: SP DIPA-032.07.2.477440/2023 tanggal 27 Desember 2023 (Revisi ke-18) target dan realisasi anggaran bulanan untuk mendukung pencapaian IKU daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja LPSPL Sorong (Daerah) dapat dilihat pada tabel 3.15. Pada tabel tersebut dapat kita lihat bahwa target dan realisasi rencana penarikan dana pada triwulan IV terdapat perbedaan target dan realisasi, hal ini disebabkan oleh penyusunan halaman III DIPA pada level komponen. Sehingga kedepannya harus dilakukan penyusunan rencana penarikan dana pada level subkomponen.



Tabel 3.15 Rencana Penarikan Dana IKU 2 Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Daerah)

No.	IKU	Pagu (Rp)	2023		
			Triwulan IV		
			Okt	Nov	Des
	Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Daerah)	250.000.000			
a.	Pendampingan Percepatan Penetapan Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil pulau di Maluku	Target	-	10.797.304	13.000.961
		Realisasi	-	31.526.800	6.073.950
b.	Pendampingan Percepatan Penetapan Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil pulau di Papua	Target	-	28.456.156	34.263.862
		Realisasi	-	16.064.972	0
c.	Kegiatan dalam rangka Koordinasi/Menghadiri Undangan/Sosialisasi/Event (Daerah/Nasional)	Target	-	8.243.128	9.925.496
		Realisasi	-	-	42.211.341

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

3.3 Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong, LPSPL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 3 ini kedalam 1 IKU yaitu Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kelompok).

3.3.1 IKU 3 Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kelompok)

Bantuan pemerintah merupakan bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah. Sedangkan bantuan konservasi merupakan bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dalam mendukung Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan konservasi atau jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi.

Tata cara pemberian bantuan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 49 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan

Konservasi Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Teknik menghitung capaian IKU ini dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok masyarakat yang diberikan bantuan konservasi sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 49 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2023.

Tabel 3.16 Capaian IKU 3 Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kelompok)

SK.3	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong									
IKU 3	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kelompok)									
Realisasi 2022	Tahun 2023				Tahun 2023		Renstra LPSPL Sorong 2020-2024			
	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2022	Target PK 2023	% Realisasi thd PK	Target s.d 2023	Realisasi s.d 2023	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2020-2024
2	3	3	100%	(+1)	3	100%	12	10	17	58,82%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

1. Capaian IKU Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kelompok) Tahun 2023

Target IKU Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kelompok) yaitu 3 (Tiga) kelompok. Periode capaian dan periode pelaporan IKU ini adalah triwulanan, pada triwulan IV target capaian yaitu 3 kelompok. Pada triwulan IV telah tercapai 3 kelompok yaitu Pokmaswas Nusa Matan (Nomor BAST: BA.001/LPSPL.1/PRL.440/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023), Pokmaswas Sugiraja Watulu (Nomor BAST: BA.002/LPSPL.1/PRL.440/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023), dan Pokmaswas Tanjung Ngolopopo (Nomor BAST: BA.003/LPSPL.1/PRL.440/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023). Capaian ini telah disampaikan kepada Kepala LPSPL Sorong melalui memorandum oleh penanggung jawab kegiatan.



2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

Periode pencapaian dan pelaporan indikator kinerja ini pada tahun 2023 yaitu triwulanan sedangkan pada tahun 2022 yaitu semesteran. Target indikator kinerja ini pada tahun 2023 yaitu 3 kelompok sedangkan pada tahun 2022 yaitu 2 kelompok. Capaian kinerja IKU ini pada tahun 2022 yaitu 2 kelompok sedangkan pada tahun 2023 yaitu 3 kelompok. Pada tahun 2022 dan tahun 2023 capaian kinerja terhadap perjanjian kinerja yaitu 100%, namun jumlah capaian pada tahun 2023 lebih tinggi, hal ini disebabkan karena target capaian pada tahun 2023 juga lebih tinggi daripada target tahun 2022.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi IKU bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja LPSPL Sorong sampai dengan tahun 2023 adalah 10 kelompok, target capaian pada dokumen Renstra 2020-2024 yaitu 17 kelompok. Sehingga sampai dengan tahun 2023 realisasi capaian indikator ini telah tercapai 58,82%.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi biaya karena memanfaatkan teknologi komunikasi dalam melakukan identifikasi kelompok, sehingga tidak mengeluarkan biaya untuk perjalanan dinas dalam rangka identifikasi calon kelompok penerima bantuan. Efisiensi anggaran juga disebabkan LPSPL Sorong memiliki satuan kerja di beberapa Provinsi sehingga meminimalkan belanja perjalanan dinas.

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Penyaluran bantuan pemerintah sudah mengacu pada petunjuk teknis penyaluran bantuan konservasi tahun 2023 yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 49 Tahun 2022. Serta terdapat peran dari stakeholder terkait yang memudahkan koordinasi identifikasi dan verifikasi calon kelompok penerima bantuan seperti dengan DKP di Kab/Kota maupun Provinsi setempat.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tidak terdapat kendala dalam mencapai indikator kinerja ini pada tahun 2023.



c. Solusi

Tidak terdapat kendala dalam mencapai target kinerja ini, namun guna perbaikan kinerja kedepan, LPSPS Sorong diharapkan lebih cepat dalam melakukan identifikasi calon kelompok penerima bantuan KOMPAK tahun 2024.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKU 3

a. Identifikasi Calon Kelompok Penerima Bantuan

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi dan seleksi kelompok masyarakat konservasi (KOMPAK) yang memiliki ruang lingkup kegiatan pelaksanaan konservasi sumberdaya ikan, yang terkendala pada keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki sehingga perlu dilakukan kegiatan penyaluran pemberian bantuan konservasi dalam melakukan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan/atau pemanfaatan pada kawasan konservasi maupun jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi.



Gambar 3.10 Identifikasi Calon Kelompok Penerima Bantuan.

Hasil identifikasi terdapat 10 (sepuluh) calon kelompok dimana 8 (delapan) calon merupakan usulan tahun 2022 (Pokmaswas Sugiraja Watulu, KUB Wear Wanun, Pokmaswas Nusa Matan, Pokmaswas Mambri, Pokmaswas Wifwoo Misool, Pokmawas Sebele, Pokdarwis Kolorai, Komunitas Masyarakat Pesisir Peduli Lingkungan Eden Mandiri) serta 2 (dua) calon kelompok baru yang diusulkan di tahun 2023 (Pokmaswas Bankit Sehati Desa Aru Burung dan Pokmaswas Tanjung Ngolopopo). Setelah dilakukan seleksi administrasi terhadap proposal usulan kegiatan calon kelompok penerima bantuan konservasi tahun 2023 yang menghasilkan 3 (tiga) calon kelompok

prioritas (Pokmaswas Sugiraja Watulu, Pokmaswas Nusa Matan, Pokmaswas Tanjung ngolopopo).

b. Verifikasi Calon Kelompok Penerima Bantuan

Kegiatan verifikasi merupakan tindaklanjut dari hasil identifikasi calon kelompok penerima bantuan. LPSPSPL Sorong melaksanakan verifikasi lapang bagi calon kelompok prioritas penerima bantuan konservasi TA 2023 (Pokmaswas Sugiraja Watulu, Pokmaswas Nusa Matan, Pokmaswas Tanjung ngolopopo) yang berada di Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua Barat. Verifikasi lapang bertujuan untuk memastikan kelengkapan administrasi dan pendukung, yaitu: Proposal, Form Lampiran Proposal, Rincian barang kebutuhan dan spesifikasinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.



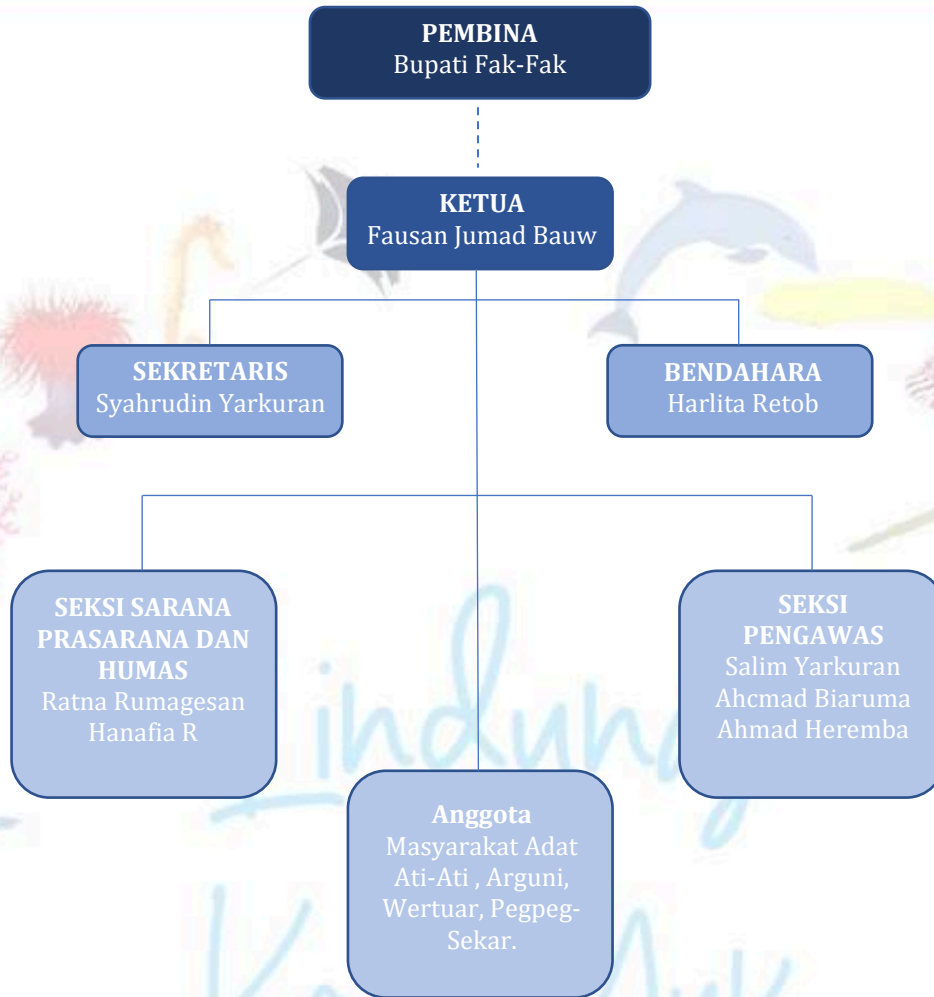
Gambar 3.11 Verifikasi Calon Kelompok Penerima Bantuan.

c. Serah Terima Bantuan KOMPAK

- **Pokmaswas Nusa Matan**

Pokmaswas Nusa Matan merupakan yang terbentuk dari masyarakat Adat Fak-Fak yang berada dalam Kawasan Konservasi Taman Pesisir Teluk Berau dan Teluk Nusalasi Van Den Bosch. Kelompok POKMASWAS Nusa Matan bersekretariat di Jl. J.P Matondang No.38 RT 01, Kampung Gewerpe, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dengan titik kordinat LS $-2.924447608605752^{\circ}$ dan BT $132.31234707189873^{\circ}$. Adapun susunan organisasi atau pengurus Pokmaswas Nusa Matan (lihat gambar 3.9).





Gambar 3.12 Struktur Organisasi Pokmaswas Nusa Matan.

Pokmaswas Nusa Matan berfokus pada kegiatan jaga laut yang dilakukan rutin setiap bulan. Pelaksanaan kegiatan jaga laut dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi tentang konservasi dan biota laut dilindungi serta pendataan hasil tangkapan nelayan dalam Kawasan Konservasi. Adapun sarana-prasarana yang dimiliki oleh Pokmaswasa Nusa Matan dalam mendukung kegiatannya diantara lain:

Tabel 3.17 Sarana Prasarana Kelompok Nusa Matan.

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Sumber	Kondisi Barang
1	Pos Pengawasan	3 Unit	DKP PB	Pos Pengawasan masih kurang toilet dan penerangan

2	Teropong	4 Unit	CII Fakkak	Baik
3	Life Jacket	25 Unit	BAF	Sebagian besar tidak layak pakai
4	Hp Andoid	4 Unit	BAF	3 Unit sudah rusak
5	Rompi	25 Unit	DKP PB	Baik
6	GPS	4 Unit	BAF	3 Unit sudah rusak
7	Radio HT	8 Unit	BAF	6 Unit sudah rusak
8	Laptop	1 Unit	BAF	Baik

Pokmaswas Nusa Matan mengajukan proposal bantuan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan jaga laut melalui patroli, sosialisasi zonasi Kawasan Konservasi, sosialisasi satwa laut dilindungi, pendataan hasil tangkapan nelayan serta beberapa informasi nelayan lainnya agar menjadi suatu basis data yang dapat menunjang pengelolaan Kawasan Konservasi. Selain itu alat-alat yang diajukan juga akan digunakan untuk membuat pelaporan jaga laut. Adapun bantuan yang diajukan untuk mendukung hal tersebut, diantaranya perahu fiber, mesin tempel, dan peralatan sosialisasi serta pemantauan.

Setelah melewati proses identifikasi dan verifikasi oleh LPSPL Sorong, serta persetujuan oleh Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut terhadap hasil identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh LPSPL Sorong, maka Pokmaswas Nusa Matan ditetapkan sebagai penerima bantuan konservasi tahun 2023 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LPSPL Sorong dengan Nomor: 01/SK/LPSP.Sorong/PPK/IV/2023 tanggal 27 April 2023.



Gambar 3.13 Serah Terima Bantuan Kepada Pokmaswas Nusa Matan.





Pokmaswas Nusa Matan menjadi salah satu kelompok yang ditetapkan sebagai penerima bantuan konservasi tahun 2023, sehingga dilakukan serah terima bantuan yang dilaksanakan di Gedung Pelabuhan Perikanan Kabupaten Fakfak pada tanggal 22 Juni 2023. Kegiatan serah terima bantuan kepada Pokmaswas Nusa Matan tertuang dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor: BA.001/LPSPL.1/PRL.440/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 dengan daftar barang yang diserahkan terimakan sebagai berikut:

Tabel 3.18 Daftar Barang yang Diserah Terimakan ke Pokmaswas Nusa Matan

No	Nama Barang/Merk /Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Perolehan (Rp.)	Dokumentasi
1	Bodi Perahu Fiber Panjang 7 Meter Lebar 1 Meter Tinggi 1,2 Meter Ketebalan 7 Lapisan	1	Unit	34.136.940	
2	Mesin Motor Tempel 15 PK Tipe Mesin 2 Silinder Sistem Pelumas Bensin Oli Campur	1	Unit	42.735.000	

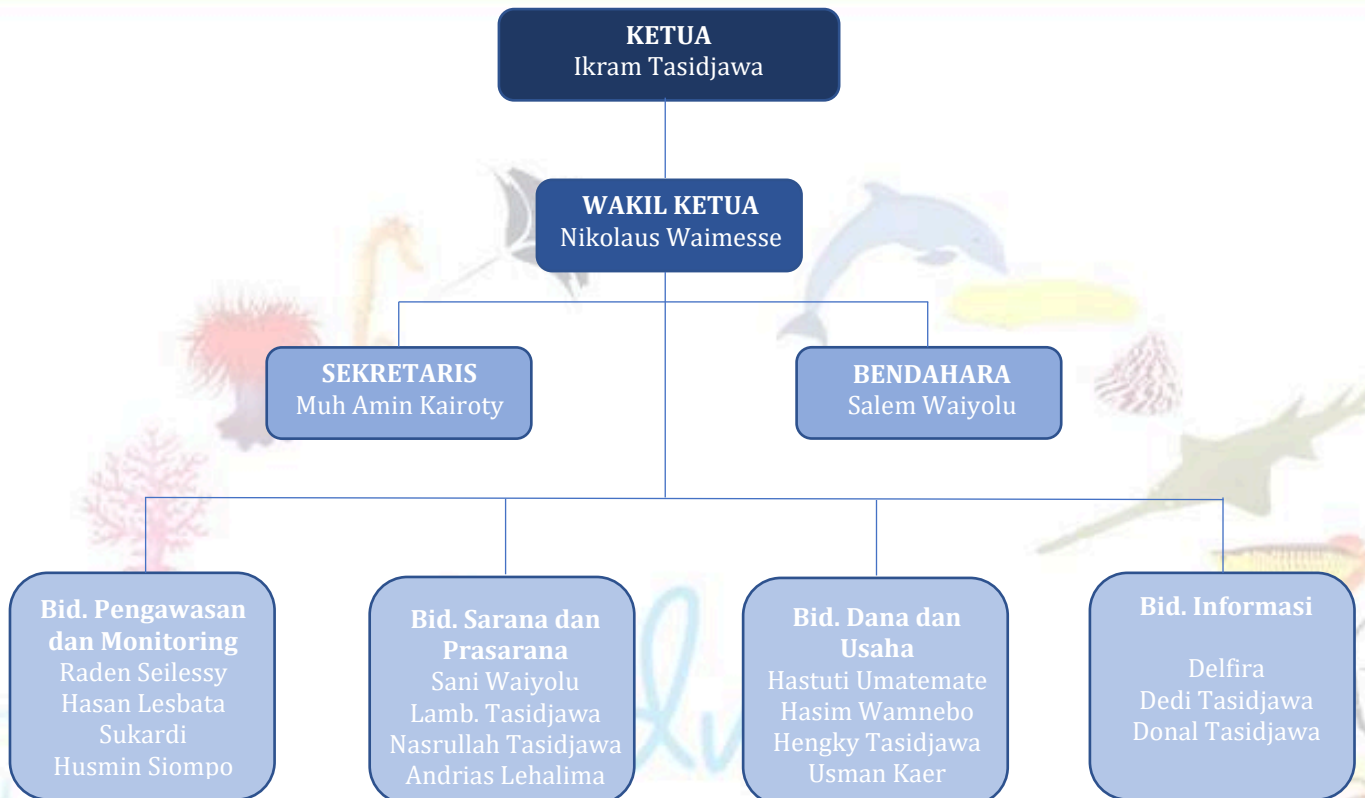


3	GPS Tipe 78S	1	Unit	7.850.475	
4	Laptop Core i5-1135G7 RAM 8 GB SSD 512 NVME 15 FHD W10	1	Unit	12.471.685	
Total Harga Perolehan					97.194.100

- **Pokmaswas Sugiraja Watulu**

Pokmaswas Sugiraja Watulu terbentuk atas dasar kepedulian tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, LSM, serta masyarakat Desa Wamlana, Waspaik, Waekose dan Waenibe terhadap kelestarian ekosistem laut terutama untuk habitat dan pantai peneluran penyu, serta adanya kegiatan penangkapan ikan yang masih menggunakan metode/alat tangkap destruktif yang merusak menyebabkan hasil tangkapan nelayan kecil semakin menurun. Kelompok ini ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku pada tanggal 9 Bulan Maret Tahun 2021 dan telah diperbaharui pada 24 November 2022. Adapun susunan organisasi atau pengurus Pokmaswas Sugiraja Watulu (lihat gambar 3.14).





Gambar 3.14 Struktur Organisasi Pokmaswas Sugiraja Watulu.

Pokmaswas Sugiraja Watulu dibentuk dengan tujuan menjaga dan melestarikan ekosistem laut yang ada diperairan Kecamatan Fena Leisela, khususnya untuk pantai peneluran penyu dan jenis biota laut lainnya yang terancam punah, serta pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan, agar nelayan tidak lagi menggunakan metode/alat tangkap destruktif yang dapat merusak ekosistem laut dengan tujuan agar hasil laut yang ada di wilayah ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat untuk masa sekarang dan akan datang. Dalam menunjang kegiatan tersebut, Pokmaswas memiliki saran prasaran pendukung diantaranya tiga lokasi pos pemantauan yang berasal dari WWF.

Pokmaswas Sugiraja Watulu mengajukan proposal bantuan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan baik dari monitoring pantai peneluran penyu di pesisir Kecamatan Fena Leisela meliputi pendataan sarang dan relokasi sarang serta pengawasan pantai dari ancaman oknum masyarakat yang masih memanfaatkan telur penyu. Adapun bantuan yang diajukan untuk mendukung hal tersebut,

diantaranya kendaraan ATV (*all terrain vehicle*), teropong infrared malam, dan seragam lengan panjang.

Setelah melewati proses identifikasi dan verifikasi oleh LPSP Sorong, serta persetujuan oleh Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut terhadap hasil identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh LPSP Sorong, maka Pokmaswas Sugiraja Watulu ditetapkan sebagai penerima bantuan konservasi tahun 2023 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LPSP Sorong dengan Nomor: 01/SK/LPSP.Sorong/PPK/IV/2023 tanggal 27 April 2023.






Gambar 3.15 Serah Terima Bantuan Kepada Pokmaswas Sugiraja Watulu.



Pokmaswas Sugiraja Watulu menjadi salah satu kelompok yang ditetapkan sebagai penerima bantuan konservasi tahun 2023, sehingga dilakukan serah terima bantuan yang dilaksanakan di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Buru tanggal 26 Juni 2023. Kegiatan serah terima bantuan kepada Pokmaswas Sugiraja Watulu tertuang dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor: BA.002/LPSP.1/PRL.440/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 dengan daftar barang yang diserahkan sebagai berikut:



Tabel 3.19 Daftar Barang yang Diserah Terimakan ke Pokmaswas Sugiraja Watulu

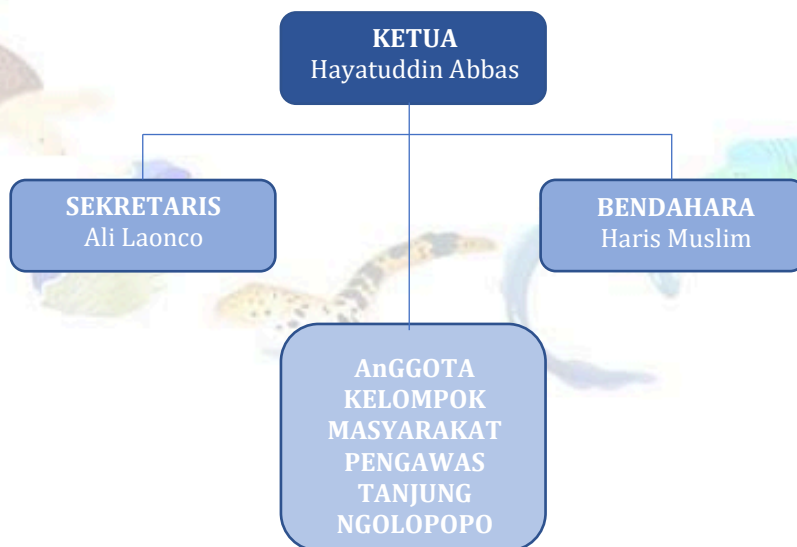
No	Nama Barang/Merk/Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Perolehan (Rp.)	Dokumentasi
1	Motor ATV 150 CC	1	Unit	31.912.500	
2	Motor ATV 125 CC	2	Unit	42.180.000	 



3	Teropong Infrared Malam	1	Unit	2.999.775	
4	Baju Seragam	19	Buah	3.901.650	
Total Harga Perolehan					80.993.925

- Pokmaswas Tanjung Ngolopopo**

PokmaswasTanjung Ngolopopo merupakan kelompok yang ditetapkan dalam SK Kepala Dinas Halmahera Tengah Nomor 523/81/DKP-HB/2022. Kelompok ini berkegiatan melakukan monitoring pesisir dan pulau-pulau serta sosialisasi tentang lingkungan laut. Kelompok berkegiatan di wilayah Patani dan Pulau Mour yang sedang diusulkan sebagai calon kawasan konservasi. Adapun struktur organisasi Pokmaswas Tanjung Ngolopopo (lihat gambar 3.16).



Gambar 3.16 Struktur Organisasi Pokmaswas Tanjung Ngolopopo.

Pokmaswas Tanjung Ngolopopo dalam melaksanakan kegiatan didukung oleh sarana prasarana berupa masker, snorkel, fins, dan perahu kayu yang didapatkan dari pinjaman. Untuk mendukung kegiatan yang akan dilakukan Pokmaswas Tanjung Ngolopopo mengajukan proposal bantuan yang berisi dukungan sarana prasarana berupa Snorkel, Masker, Fins Panjang, Perahu bahan fiber, mesin tempel 15 PK, *Global Positioning System* (GPS), Handy Talky, Kamera Underwater.

Setelah melewati proses identifikasi dan verifikasi oleh LPSPL Sorong, serta persetujuan oleh Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut terhadap hasil identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh LPSPL Sorong, maka Pokmaswas Tanjung Ngolopopo ditetapkan sebagai penerima bantuan konservasi tahun 2023 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LPSPL Sorong dengan Nomor: 01/SK/LPSP.Sorong/PPK/IV/2023 tanggal 27 April 2023.



Gambar 3.17 Serah Terima Bantuan Kepada Pokmaswas Tanjung Ngolopopo.

Pokmaswas Tanjung Ngolopopo menjadi salah satu kelompok yang ditetapkan sebagai penerima bantuan konservasi tahun 2023, sehingga dilakukan serah terima bantuan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 27 Juni 2023. Kegiatan serah terima bantuan kepada Pokmaswas Sugiraja Watulu tertuang dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor: BA.003/LPSPL.1/PRL.440/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 dengan daftar barang yang diserahkan terimakasih sebagai berikut:



Tabel 3.20 Daftar Barang yang Diserah Terimakan ke Pokmaswas Tanjung Ngolopopo

No	Nama Barang/Merk/Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Perolehan (Rp.)	Dokumentasi
1	Body Perahu Fiber Panjang 9 Meter Lebar 1,3 Meter Ketebalan 7 Lapisan	1	Unit	42.180.000	
2	Mesin Motor Tempel 15 PK Merk Yamaha	1	Unit	42.735.000	
3	Fins Panjang	2	Pasang	5.106.000	
4	Masker+Snorkel Merk Speeds	2	Unit	999.000	

5	Handy Talkie Merk Bruno Cx 5 Power	2	Unit	1.731.600	
6	Global Positioning System (GPS)	1	Unit	3.510.375	
7	Kamera Underwater Merk Olympus Tg-6	1	Unit	5.550.000	
Total Harga Perolehan					101.811.975

7. Rencana Aksi Triwulan I TA. 2024

Pada triwulan I tahun 2024 untuk mendukung pencapaian IKU ini, akan dilaksanakan identifikasi calon kelompok penerima bantuan tahun 2024.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan sasaran meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong dengan IKU bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja LPSPL Sorong (Kelompok), sampai dengan triwulan IV



tahun 2023 sebesar Rp. 351.447.639 atau 94,50% dari pagu anggaran Rp. 371.892.000 yang dapat dilihat pada tabel 3.21. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dalam mencapai target kinerja terdapat efisiensi, karena terdapat sisa anggaran dalam mencapai target.

Tabel 3.21 Realisasi Anggaran IKU 3 Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kelompok)

No.	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kelompok)	371.892.000	351.447.639	20.444.361	94,50%
a.	Bantuan KOMPAK 2023	300.000.000	280.000.000	20.000.000	93,33%
b.	Identifikasi Verifikasi Bantuan KOMPAK 2023	32.392.000	32.345.239	46.761	99,85%
c.	Penyerahan Bantuan KOMPAK 2023	39.500.000	39.102.400	397.600	98,99%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

9. Rencana Penarikan Dana Triwulan IV TA. 2023

Merujuk pada Rencana Penarikan Dana (RPD) sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA LPSPL Sorong Nomor: SP DIPA-032.07.2.477440/2023 tanggal 27 Desember 2023 (Revisi ke-18) target dan realisasi anggaran bulanan untuk mendukung pencapaian IKU bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja LPSPL Sorong (Kelompok) dapat dilihat pada tabel 3.22. Pada tabel tersebut dapat kita lihat bahwa sudah tidak terdapat target realisasi karena kegiatan telah selesai.

Tabel 3.22 Rencana Penarikan Dana IKU 3 Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diserahkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kelompok)

No.	IKU	Pagu (Rp)	2023		
			Triwulan IV		
			Okt	Nov	Des
	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPL	371.892.000			



Sorong (Kelompok)					
a.	Bantuan KOMPAK 2023	Target	300.000.000	-	-
		Realisasi		-	-
b.	Identifikasi Verifikasi Bantuan KOMPAK 2023	Target	32.392.000	-	-
		Realisasi		-	-
c.	Penyerahan Bantuan KOMPAK 2023	Target	39.500.000	-	-
		Realisasi		-	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

3.4 Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong. LPSPL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 4 ini kedalam 1 IKU, yaitu IKU 4 Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis).

3.4.1 IKU 4 Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)

Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi adalah jenis ikan yang diintervensi pegelolaannya melalui pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat/pemulihan populasi, atau penanganan biota dilindungi guna menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan keanekaragaman hayati perairan. Target jenis LPSPL Sorong yaitu hiu berjalan, karang, penyu, dan napoleon.

Teknik menghitung capaian IKU ini dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat/pemulihan populasi, atau penanganan biota dilindungi.



Tabel 3.23 Capaian IKU 4 Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)

SK.4	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong									
IKU 4	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)									
Realisasi 2022	Tahun 2023				Tahun 2023		Renstra LPSPL Sorong 2020-2024			
2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2022	Target PK 2023	% Realisasi thd PK	Target s.d 2023	Realisasi s.d 2023	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2020-2024
7	4	7	120%	(=)	4	120%	18	22	23	95,65%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

1. Capaian IKU Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis) Tahun 2023

Target IKU Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong pada tahun 2023 yaitu 4 (Empat) Jenis (Penyu, Hiu Berjalan, Napoleon, dan Karang). Periode capaian dan periode pelaporan IKU ini adalah triwulanan, pada triwulan IV tahun 2023 LPSPL Sorong memiliki target capaian 4 Jenis. Capaian pada triwulan IV tahun 2023 yaitu telah tercapai 7 jenis (Hiu Paus, Hiu Berjalan, Napoleon, Penyu, Karang, Kuda Laut, Dugong), capaian tersebut didukung dari beberapa kegiatan, diantaranya: 1) Monitoring hiu berjalan di Kabupaten Kaimana. 2) Monitoring Napoleon di Misool Kabupaten Raja Ampat. 3) Penyadartahuan jenis ikan dilindungi melalui workshop pengelolaan Hiu Paus. 4) Monitoring Penyu di Pulau Um. 5) Rehabilitasi terumbu karang di Zona Egek MHA Malaumkarta. 6) Monitoring Kuda Laut di Maluku. 7) Survei dan Monitoring Dugong dan Lamun di KKD Lease. Capaian tersebut telah disampaikan penanggung jawab kepada Kepala LPSPL Sorong melalui memorandum.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

Periode pencapaian dan pelaporan indikator kinerja ini pada tahun 2023 yaitu triwulanan sedangkan pada tahun 2022 yaitu tahunan. Target indikator kinerja ini pada tahun 2023 yaitu 4 jenis sedangkan pada tahun 2022 yaitu 7 jenis. Capaian kinerja IKU ini pada tahun



2022 dan tahun 2023 yaitu 7 jenis, namun karena target pada tahun 2023 lebih kecil daripada target tahun 2022 maka persentase capaian tahun 2023 lebih besar daripada tahun 2022. Selain target yang lebih kecil, pada tahun 2023 capaian kinerja juga didukung dengan adanya kegiatan baru dalam pendataan atau survei monitoring pada jenis yang baru selain dari target yang ditetapkan sehingga capaian kerjanya melebihi target yang ditetapkan.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah**

Realisasi IKU jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja LPSPL Sorong sampai dengan tahun 2023 adalah 22 jenis, target capaian pada dokumen Renstra 2020-2024 yaitu 23 jenis. Sehingga sampai dengan tahun 2023 realisasi capaian indikator ini telah tercapai 95,65%.

4. **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

a. Partisipasi aktif sumberdaya manusia LPSPL Sorong, yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pelestarian jenis ikan terancam punah dilakukan oleh SDM LPSPL Sorong yang terlatih dan handal atau tersertifikasi. LPSPL Sorong juga bermitra dengan satker kementerian dan SKPD terkait yang selalu mengedepankan upaya pelibatan masyarakat lokal sebagai bagian dari transfer pengetahuan dan peningkatan pemahaman masyarakat di bidang konservasi.
2. LPSPL Sorong aktif melakukan sosialisasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, terancam punah dan/atau *appendix CITES* kepada masyarakat.
3. LPSPL Sorong terhubung melalui grup jejaring *first responder* yang anggotanya terdiri atas kalangan akademisi, pemerhati lingkungan/NGO, pemerintahan, pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum yang tersebar di wilayah kerja LPSPL Sorong yang secara aktif berbagi informasi terkait konservasi jenis ikan dan konservasi kawasan serta berbagi peran dalam aksi konservasi jenis ikan dan konservasi Kawasan.

b. Efisiensi penggunaan sumberdaya manusia dilakukan melalui kemitraan dalam jejaring *first responder*, kemitraan dengan NGO, pemerintah daerah serta *stakeholder* lainnya serta mendorong peningkatan peran serta aktif masyarakat dan mitra

konservasi keanekaragaman hayati laut. Efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penggunaan peralatan-peralatan survei yang merupakan BMN LPSPL Sorong (perlengkapan scuba, perlengkapan penanganan mamalia laut dan peralatan jenis ikan dilindungi/terancam punah), sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pihak lain (sewa).

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Kapasitas SDM LPSPL Sorong yang handal dan tersertifikasi dalam kegiatan monitoring jenis ikan dan giatnya LPSPL Sorong dalam melakukan sosialisasi, serta pelibatan mitra konservasi keanekaragaman hayati laut yang terjalin harmonis dan dukungan masyarakat dalam melakukan penanganan mamalia laut terdampar.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Pada triwulan IV belum terdapat kendala yang berarti dalam pencapaian target ini.

c. Solusi

Belum terdapat kendala dalam pencapaian target ini sehingga belum terdapat solusi yang dilakukan.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKU 4



Gambar 3.15 Realisasi Jenis LPSPL Sorong Tahun 2023.



a. Monitoring Penyu di Pulau Um – Malaumkarta

Kegiatan monitoring bertujuan untuk mengetahui jumlah sarang, jumlah rata-rata telur pada sarang, dan daya tetas telur hingga produksi tukik. Kegiatan monitoring dilaksanakan di Pulau Um, dimana Pulau Um merupakan pantai peneluran penyu yang memiliki luas pantai sekitar 2,5 Ha.

Monitoring penyu di Pulau Um meliputi monitoring peneluran penyu dan suksesi penetasan telur penyu pada sarang relokasi di Pantai Peneluran Pulau Um. Monitoring peneluran penyu dilaksanakan pada 1-4 April 2023 dengan hasil ditemukannya sebanyak 13 jejak penyu dengan total individu penyu yang ditemukan sebanyak 11 ekor. Jumlah sarang yang ditemukan sebanyak 15 sarang dengan catatan bahwa 2 sarang merupakan sarang palsu. Dari 13 sarang yang terdapat telur 5 diantaranya dilakukan relokasi.

Kegiatan monitoring sukses penetasan telur penyu bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sekaligus mengidentifikasi faktor kegagalan. Evaluasi dilakukan dengan menyampling 12 sarang, dan setelah dilakukan analisa diperoleh angka sukses penetasan berkisar antara 15,38% -95,96%, dengan rata-rata sukses penetasan adalah 80,15 %.



Gambar 3.19 Kegiatan Monitoring Penyu.

Adapun kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja ini yaitu LPSPL Sorong melakukan pendataan potensi pantai peneluran penyu di Kabupaten Buru. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data terkait potensi pantai peneluran penyu. Hasil pendataan menunjukkan bahwa panjang pantai peneluran penyu di Kecamatan Fena Leisela adalah 13,9 km dengan suhu rata-rata pada sarang penyu

belimbing pada kisaran 30°C-31°C. Adapun ancaman alami pada pantai peneluran penyusut diantaranya abrasi dan predator (buaya muara, biawak, kepiting, dan anjing).

b. Monitoring Hiu Berjalan

Monitoring hiu berjalan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas, menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pemanfaatan hiu berjalan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi hiu berjalan di Perairan Kaimana yang merupakan lokasi rekomendasi hasil monitoring pada tahun sebelumnya. Metode yang digunakan dalam monitoring hiu berjalan yaitu snorkeling visual census dan sensus menyusuri garis pantai dengan menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Monitoring hiu berjalan dilaksanakan di perairan Kawasan Konservasi Daerah Kaimana dengan titik spesifik yaitu wilayah pesisir Aeva Resort, Pesisir Avunawala, Pesisir Lavera, dan Selat Faranggawa.



Gambar 3.20 Kegiatan Monitoring Hiu Berjalan.

Tabel 3.27 Hasil pemantauan ikan hiu berjalan di KKD Kaimana.

Individu (ke-)	Tanggal/Waktu	Koordinat		Jenis Kelamin	Panjang (cm)	Berat (gr)	Habitat	Lokasi	Kedalaman (m)
		Latitude (S)	Longitude (E)						
1	12 April/21:18	134°01.027'	3°50.932'	Jantan	70	775	Pasir Berkarang	Pantai Lavera	2,0
2	12 April/22:00	134°00.978'	3°50.882'	-	20	-	Terumbu Karang	Pantai Lavera	2,5
3	12 April/22:08	134°00.987'	3°50.883'	Jantan	88	1795	Pasir Berbatu	Pantai Lavera	1,5
4	13 April/21:24	134°00.812'	3°51.331'	Jantan	69	790	Batu Beralga	Pantai Avunawala	0,7
5	13 April/22:40	134°00.828'	3°51.337'	Jantan	57	310	Batu Beralga	Pantai Avunawala	0,5
6	14 April/01.30	133°58.782'	3°49.968'	Jantan	87	1605	Pasir Berkarang	Pantai Aeva Resort	2,0



Hasil pemantauan yang dilakukan oleh LPSP Sorong pada tahun 2023 yaitu terdata 6 individu hiu berjalan jenis *Hemiscyllium henryi* dengan total area sapuan pemantauan seluas 2,46 hektar dengan panjang lintasan survei 5783 meter, sehingga densitasnya sebesar 2,4 individu/hektar.

c. Monitoring Napoleon

Kegiatan monitoring napoleon bertujuan untuk mengetahui jumlah kepadatan ikan napoleon pada lokasi pengamatan. Metode yang digunakan dalam monitoring ikan napoleon yaitu snorkeling visual census dengan menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Pada tahun 2023 LPSP Sorong melakukan survei monitoring pada lintasan survei yang mirip lintasan survei tahun 2013 yaitu pada wilayah perairan Balbulol, Campedak, Namlol, Harapan Jaya, Wayaban, dan Banyaganan.



Gambar 3.21 Kegiatan Monitoring Napoleon.

Hasil monitoring dengan panjang lintasan survei 29,371 km, dan dicatat perjumpaan ikan Napoleon sebanyak 159 individu. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan populasi ikan Napoleon pada area survei sebesar 114,86%. Untuk menghitung densitas atau kepadatan ikan Napoleon, dilakukan konversi panjang lintasan survei menjadi luas area dengan faktor pengali lebar lintasan survei yakni 10 meter, sehingga luas area pengamatan adalah 293.710 m² atau 29,37 ha. Maka diperoleh nilai kelimpahan ikan Napoleon di wilayah perairan Misool 5,41 ind./Ha.



d. Rehabilitasi Karang

Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki ekosistem terumbu karang di Zona Egek MHA Malaumkarta yang mengalami degradasi. Rehabilitasi yang dilaksanakan dengan cara transplantasi fragmen karang pada media transplantasi yang dikehendaki. Setelah dilakukan monitoring media transplantasi yang diturunkan pada tahun sebelumnya pada triwulan I, disimpulkan bahwa perlunya perbaikan atau penggantian media transplantasi yang lebih kuat untuk menahan beban lingkungan yang terdapat di Zona Egek MHA Malaumkarta.



Gambar 3.22 Kegiatan Transplantasi Karang.

LPSPL Sorong telah menurunkan 50 media yang terbuat dari besi berbentuk *spider web*. Total keseluruhan bibit yang dapat di transplantasi adalah 650 bibit karang yang didominasi dari jenis karang *Acropora sp*. Lokasi penurunan media transplantasi sesuai dengan Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKRL) Nomor: B.400/MEN-KP/VI/2022 yang digunakan sebagai pengembangan *Coral Stok Center*.

e. Monitoring Kuda Laut

Monitoring kuda laut bertujuan untuk mengetahui jumlah kepadatan kuda laut pada perairan Maluku. Kegiatan monitoring kuda laut dilaksanakan di Pulau Seram Laut Kabupaten Seram Bagian Timur.





Gambar 3.23 Kegiatan Monitoring Kuda Laut.

Berdasarkan hasil monitoring diperoleh 25 ekor kuda laut dengan rentang ukuran antara 9 - 13 cm. Jenis kuda laut yang ditemukan adalah *Hippocampus kuda* atau *common seahorse*, seluruh kuda laut ditemukan di ekosistem lamun. Selain dilakukan monitoring kepadatan, LPSPSPL Sorong juga melakukan wawancara kepada warga setempat untuk memperdalam informasi mengenai kuda laut di Seram dan sosialisasi mengenai aturan perlindungan dan pemanfaatan kuda laut.

f. Penanganan biota dilindungi/terancam punah

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai potensi sumberdaya ikan yang dilindungi dan tidak dilindungi yang sangat besar yang tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia. Salah satu biota dilindungi yaitu mamalia laut, mamalia laut yang berhabitat di lingkungan perairan Inonesia antara dari jenis dugong, paus, dan lumba-lumba. Ancaman utama terhadap spesies ini mencakup penangkapan yang tidak disengaja (*bycatch*), terdampar (*stranded*), perburuan (*whaling*), dan rusaknya habitat laut mereka.



Gambar 3.24 Kegiatan Penanganan Mamalia Terdampar.



Pada triwulan IV LPSPL Sorong telah melaksanakan kegiatan penanganan mamalia laut dan biota laut jenis dilindungi terdampar baik penanganan secara langsung maupun penanganan tidak secara langsung. Pada triwulan IV terdapat 5 penanganan diantaranya penanganan secara tidak langsung terhadap Lumba-Lumba terdampar mati di Nabire, penanganan secara tidak langsung terhadap Lumba-Lumba terdampar mati di Aru Tenggara, penanganan secara tidak langsung terhadap dugong terdampar hidup di Kabupaten Sorong, penanganan secara langsung terhadap paus terdampar mati di Maluku Tengah, penanganan secara langsung terhadap lumba-lumba terdampar mati di Kota Sorong, dan penanganan berupa pulbaket pelanggaran jenis pemanfaatan tukik penyu di Kabupaten Raja Ampat. LPSPL Sorong juga melaksanakan bimbingan teknis penanganan mamalia laut terdampar di Bentang Laut Kepala Burung Papua.

Pada tahun 2023 LPSPL Sorong telah melakukan penanganan sejumlah 14 kejadian mamalia laut terdampar mati (5 kejadian biota paus terdampar mati, 5 kejadian dugong terdampar mati, dan 4 kejadian lumba-lumba) dan 2 kejadian penanganan pelanggaran pemanfaatan jenis dilindungi.

g. Penysadartahuan Jenis Dilindungi (Hiu Paus)

Kemunculan hiu paus di beberapa lokasi di Indonesia, khususnya di wilayah perairan Kaimana secara terus menerus, berulang sepanjang tahun menjadi fenomena yang unik. Tidak hanya itu, hiu paus juga sangat jinak dan tidak agresif saat berinteraksi dan muncul di permukaan. Hal ini menjadikan hiu paus memiliki daya tarik dan oleh masyarakat telah dijadikan objek wisata di Kabupaten Kaimana. Saat ini, ikan hiu paus masuk ke dalam Appendiks II CITES dan pada daftar merah IUCN masuk dalam kategori Rentan (*Vulnerable*). Bahkan, oleh Pemerintah Indonesia telah ditetapkan sebagai jenis ikan dilindungi dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan no 18 tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*). Status perlindungan ini karena hiu paus memiliki karakter yang spesifik seperti berumur panjang, fekunditas rendah, jumlah anakan sedikit, lambat dalam mencapai matang kelamin dan pertumbuhannya lambat, sehingga sekali terjadi over eksploitasi, sangat sulit bagi populasinya untuk kembali pulih.



Dengan melihat potensi dan tantangan dalam pengelolaan hiu paus (*Rhincodon typus*), serta sebagai perwujudan dari upaya pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan amanat dari Undang-undang 27 tahun 2007, maka LPSPL Sorong bekerjasama dengan Yayasan Konservasi Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana melaksanakan Workshop Pengelolaan Hiu Paus ditinjau dari aspek perlindungan dan pemanfaatan wisata yang berkelanjutan.



Gambar 3.25 Workshop Pengelolaan Hiu Paus.

Workshop yang diikuti oleh kurang lebih 200 orang tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya: 1) Pengembangan wisata Hiu Paus di Kab. Kaimana perlu dilakukan secara lestari dengan memperhatikan aturan dan juknis terkait pelaksanaan wisata hiu paus yakni Kepdirjen PRL no. 41/2022; 2) Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana terkait pelaksanaan wisata hiu paus berdasarkan Kepdirjen no 41 tahun 2022. Sosialisasi bisa dilakukan dengan menggunakan video dan media komunikasi lainnya agar mudah dipahami oleh publik di Kaimana; 3) Pengelolaan wisata hiu paus di Kab. Kaimana dapat dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, NGO, masyarakat lokal yang ada di Kab. Kaimana, dan perguruan tinggi di wilayah Papua Barat; 4) Sudah cukup lama agregasi hiu paus di Kaimana tetapi belum ada pengelolaan yang memberi dampak langsung terhadap pengembangan ekonomi masyarakat dan daerah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kaimana mendukung BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana membentuk Pokja Pengelolaan Wisata Hiu Paus dengan menjadi tim inti dalam Pokja. Pokja ini merupakan salah satu mandate penting dari RAN Konservasi Hiu Paus Tahun 2021-2025. Ini juga akan menjadi langkah awal yang penting untuk mulai serius melakukan

pengelolaan wisata hiu paus di Kaimana; 5) Pemerintah Kabupaten Kaimana bersama BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana secara bersama-sama perlu formulasi strategi pengelolaan hiu paus di Kaimana dengan tetap berpedoman pada Kepdirjen PRL no 41/2022 dan RAN Konservasi hiu paus 2021-2025; 6) Pemerintah Kabupaten Kaimana bersama-sama dengan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana perlu secara serius membuat roadmap pengembangan ekowisata hiu paus dengan melibatkan para mitra.

h. Sosialisasi Perlindungan Terbatas Ikan Sidat

Sidat (*Anguilla spp*) merupakan jenis ikan bernilai ekonomis tinggi dan banyak diminati oleh pasar internasional. Tingginya permintaan menyebabkan terjadinya peningkatan pemanfaatan jenis ini. Guna menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya sidat, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Kepmen KP No 80 Tahun 2020 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Sidat (*Anguilla spp.*). Bentuk perlindungan terbatas sidat berupa benih semua spesies Ikan Sidat (*Anguilla spp.*) pada stadium glass eel tidak boleh ditangkap setiap bulan gelap tanggal 27-28 Hijriah; *Anguilla bicolor* dan *Anguilla interioris* dewasa dengan berat diatas dua kilogram tidak boleh ditangkap sepanjang waktu; dan *Anguilla marmorata* dan *Anguilla celebesensis* dewasa, dengan berat diatas lima kilogram tidak boleh ditangkap sepanjang waktu.



Gambar 3.26 Sosialisasi Sidat di Negeri Larike.

Pada kegiatan ini LPSPL Sorong memberikan materi guna meningkatkan pemahaman aturan perlindungan sidat di Indonesia serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi sidat dan habitatnya. Selain itu, LPSPL Sorong melakukan peninjauan langsung ke kolam wisata sidat di Negeri Larike untuk mengkonfirmasi

bahwa sidat jenis *Anguilla marmorata* berkembang dengan baik dan berinteraksi positif dengan pengunjung, dalam lingkungan sungai yang alami. Hasil dari kegiatan tersebut LPSPL sorong memberikan saran atau rekomendasi yaitu perlu adanya bahan sosialisasi yang mengedukasi masyarakat dan wisatawan mengenai ikan sidat, perlu adanya penyusunan aturan dasar, kelembagaan dan SOP terkait kegiatan wisata sidat di Larike, dan perlu dilakukan kajian mengenai potensi wisata sidat di Negeri Larike beserta dampaknya terhadap kelestarian sidat dan ekonomi masyarakat setempat.

i. Survei dan Monitoring Dugong dan Lamun di KKD Lease

Penyediaan data merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan kebijakan, oleh karena itu LPSPL Sorong melakukan pendataan populasi dan sebaran dugong serta kondisi Kesehatan ekosistem lamun pada habitat dugong. Monitoring dugong dan lamun dilaksanakan di Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Lease dengan menggunakan metode survei visual dugong secara aerial, survei jejak makan dugong (feeding trail), survei habitat lamun dengan transek, dan survei sosial ekonomi.



Gambar 3.27 Dokumentasi Monitoring Dugong dan Lamun.

Hasil kegiatan ini yaitu tim belum berhasil menemukan dugong sebagai target pengamatan, namun tim mendata terdapat 20 jejak makan (*feeding trail*) dengan sebanyak 9 jenis lamun yang ditemukan pada jejak makan diantaranya *Halodule uninervis*, *Halophila ovalis*, *Halophila minor*, *Syringodium isoetifolium*, *Cymodocea rotundata*, *Thalassia hemprichii*, *Enhalus acoroides*, *Cymodocea serrulata*, dan *Halodule pinifolia*. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam Kawasan Konservasi Kepulauan Lease menunjukkan bahwa mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan, baik sebagai pekerjaan utama

maupun sampingan dengan rerata penghasilan per bulan sebagai nelayan berkisar Rp 1.000.000,00 sampai dengan Rp 3.000.000,00. Sebanyak 91% responden telah mengetahui secara morfologi dan nama dari biota dugong dan lamun, Makanan dugong menurut 33% responden adalah berupa lamun, 29% dari golongan cacing-cacingan (sia-sia) dan 18% berpendapat bahwa makanan dugong adalah kekerangan atau bia. Interaksi responden sebanyak 87% pernah melihat langsung di laut dan sisanya belum pernah. Sebanyak 91% responden merasa tidak ada aktifitas perburuan di desa dan untuk menjaga keberadaan lamun dan dugong mayoritas responden menganggap kegiatan menjaga kebersihan laut merupakan hal yang penting.

7. Rencana Aksi Triwulan I TA. 2024

Pada triwulan I tahun 2024 untuk mendukung pencapaian IKU ini, akan dilaksanakan penanganan biota laut dilindungi yang terdampar yang bersifat insidental, serta direncanakan untuk melaksanakan pendataan dan survei populasi pari manta di Kabupaten Raja Ampat.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan sasaran meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja LPSPL Sorong dengan IKU jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja LPSPL Sorong (jenis), sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp. 648.832.996 atau 99,88% dari pagu anggaran Rp. 650.000.000 yang dapat dilihat pada tabel 3.25. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada triwulan IV tahun 2023 sudah tinggi.

Tabel 3.25 Realisasi Anggaran IKU 4 Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)

No.	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota	650.000.000	648.832.996	1.167.004	99,88%

Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)					
a.	Monitoring Penyu di Pulau UM - Malaumkarta	44.471.000	44.077.100	393.900	99,11%
b.	Monitoring Kuda Laut	28.071.000	28.026.751	44.249	99,84%
c.	Monitoring Hiu Berjalan di Kaimana	72.801.000	72.706.739	94.261	99,87%
d.	Kegiatan dalam rangka Koordinasi/Menghadiri Undangan/Sosialisasi	203.100.000	202.991.169	108.831	99,95%
e.	Monitoring Populasi Ikan Napoleon	70.465.000	70.451.868	13.132	99,98%
f.	Survey dan Monitoring Duyung dan Lamun di KKD Lease-Maluku	149.536.000	149.489.987	46.013	99,97%
g.	Survey Potensi Arwana Di Merauke (Metode Tidak Langsung/Pendugaan Awal)	6.380.000	6.375.200	4.800	99,92%
h.	Rehabilitasi Terumbu Karang di Zona Egek MHA Malaumkarta	44.409.000	44.080.315	328.685	99,26%
i.	Penanganan Biota Laut Dilindungi, Terancam Punah dan/atau Appendix CITES	30.767.000	30.633.867	133.133	99,57%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

9. Rencana Penarikan Dana Triwulan IV TA. 2023

Merujuk pada Rencana Penarikan Dana (RPD) sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA LPSPL Sorong Nomor: SP DIPA-032.07.2.477440/2023 tanggal 27 Desember 2023 (Revisi ke-18) target dan realisasi anggaran bulanan untuk mendukung pencapaian IKU jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja LPSPL Sorong (jenis) dapat dilihat pada tabel 3.26. Pada tabel tersebut dapat kita lihat bahwa target dan realisasi rencana penarikan dana pada triwulan IV terdapat perbedaan target dan realisasi, hal ini disebabkan oleh penyusunan halaman III DIPA pada level komponen. Sehingga kedepannya harus dilakukan penyusunan rencana penarikan dana pada level subkomponen.



Tabel 3.26 Rencana Penarikan Dana IKU 4 Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)

No.	IKU	Pagu (Rp)	2023			
			Triwulan IV			
			Okt	Nov	Des	
	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	650.000.000				
a.	Monitoring Penyus di Pulau UM - Malaumkarta	Target	44.471.000	370.683	2.924.683	2.528.092
		Realisasi		-	-	-
b.	Monitoring Kuda Laut	Target	28.071.000	233.983	1.846.119	1.595.783
		Realisasi		-	-	-
c.	Monitoring Hiu Berjalan di Kaimana	Target	72.801.000	606.823	4.787.835	4.138.600
		Realisasi		-	-	-
d.	Kegiatan dalam rangka Koordinasi/Menghadiri Undangan/Sosialisasi	Target	203.100.000	1.692.913	13.357.087	11.545.844
		Realisasi		4.791.368	37.803.910	25.597.253
e.	Monitoring Populasi Ikan Napoleon	Target	70.465.000	587.351	4.634.206	4.005.796
		Realisasi		-	-	-
f.	Survey dan Monitoring Duyung dan Lamun di KKD Lease-Maluku	Target	149.536.000	1.246.435	9.834.394	8.500.835
		Realisasi		-	-	-
g.	Survey Potensi Arwana Di Merauke (Metode Tidak Langsung/Pendugaan Awal)	Target	6.380.000	53.180	419.586	362.698
		Realisasi		-	-	6.375.200
h.	Rehabilitasi Terumbu Karang di Zona Egek MHA Malaumkarta	Target	44.409.000	1.567.998	-	328.689
		Realisasi		1.568.000	-	-
i.	Penanganan Biota Laut Dilindungi, Terancam Punah dan/atau Appendix CITES	Target	30.767.000	-	5.153.547	5.091.134
		Realisasi		5.153.547	-	4.958.000

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

3.5 Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong, LPSPL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 5 ini kedalam 1 IKU yaitu IKU 5 jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis).



3.5.1 IKU 5 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)

Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau look alike species, pendampingan/sosialisasi pemanfaatan jenis ikan, pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau CITES yang dimanfaatkan. Target jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah Hiu dan Pari di wilayah kerja LPSPL Sorong yaitu Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Maluku, dan Maluku Utara.

Teknik menghitung capaian IKU ini dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan melalui Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau look alike species, Pendampingan/Sosialisasi pemanfaatan jenis ikan dan/atau Pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau CITES yang dimanfaatkan di wilayah kerja LPSPL Sorong dalam kurun waktu 1 Tahun.

Tabel 3.27 Capaian IKU 5 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)

SK.5	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong									
IKU 5	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)									
Realisasi 2022	Tahun 2023				Tahun 2023		Renstra LPSPL Sorong 2020-2024			
2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2022	Target PK 2023	% Realisasi thd PK	Target s.d 2023	Realisasi s.d 2023	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2020-2024
5	2	5	120%	(=)	2	120%	10	18	14	128,57%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

1. Capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis) Tahun 2023

Target IKU jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis) pada tahun 2023 yaitu 2 (Dua) Jenis (Hiu dan Pari). Periode capaian dan periode pelaporan IKU ini adalah tahunan, pada tahun 2023 capaian indikator kinerja ini yaitu 5 jenis (Hiu, Pari, Arwana, Teripang, Anemon). Capaian tersebut



merupakan output dari beberapa kegiatan diantaranya 1) Pelayanan pemanfaatan jenis ikan di wilayah kerja LPSPL Sorong. 2) Pengumpulan data potensi dan status pemanfaatan di wilayah kerja LPSPL Sorong. 3) Pendampingan perizinan dan sosialisasi pemanfaatan jenis.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

Capaian kinerja untuk IKU ini pada tahun 2023 yaitu 5 jenis (Hiu, Pari, Arwana, Teripang, Anemon) dari target kinerja 2 jenis (Hiu, Pari). Tahun 2022, capaian kinerja untuk IKU ini 5 jenis (Hiu, Pari, Arwana, Teripang, Napoleon) dari target kinerja 2 jenis (Hiu, Pari). Sehingga pada tahun 2023 dan tahun 2022 capaian kinerja pada IKU ini sama-sama melebihi target kinerja dengan realisasi capaian 5 jenis.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi IKU jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong pada tahun 2023 yaitu 5 jenis. Pada tahun 2020-2023 indikator kinerja ini telah tercapai 18 jenis, target realisasi pada dokumen Renstra 2020-2024 yaitu 14 jenis. Sehingga sampai dengan tahun 2023 realisasi capaian indikator kinerja ini telah tercapai 128,57%.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi Sumberdaya Anggaran, Manusia, dan Waktu pada Verifikasi *Online*. Adanya SOP pelayanan jenis yang mengatur jumlah dan kategori produk yang akan di BAP di lokasi/gudang dengan jumlah produk yang di BAP di kantor LPSPL Sorong termasuk pelayanan verifikasi online menyebabkan penghematan dari segi waktu dan beban APBN yang ditimbulkan untuk melakukan verifikasi. Selain itu, LPSPL Sorong terhubung dalam jejaring media sosial (WAG) dengan mitra kerja baik pemerintah maupun pelaku usaha sehingga secara aktif dapat memberi informasi ataupun sosialisasi terkait regulasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi, terancam punah dan appendiks CITES di wilayah kerjanya tanpa bertemu/tatap muka langsung sehingga hal ini menghemat biaya koordinasi.



5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Terdapat sosialisasi SOP pelayanan Hiu dan Pari di wilayah kerja LPSPL Sorong kepada pelaku usaha Hiu dan Pari secara berkala, adanya transparansi dalam pelayanan penerbitan SR dan SAJI-DN, pelayanan berbasis aplikasi e-SAJI juga mempermudah dalam melakukan pelayanan, dan selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada para pelaku usaha Hiu dan Pari. Komitmen tersebut tertulis pada Maklumat Pelayanan dan Pakta Integritas. Hal ini juga didukung SDM LPSPL Sorong yang dapat diandalkan/tersertifikasi dalam mengidentifikasi jenis ikan yang dimanfaatkan serta penguasaan penggunaan system aplikasi e-SAJI. Selain itu, nilai indeks kepuasan masyarakat pada triwulan IV pada aplikasi susan KKP adalah 86,57 (kategori baik) yang terdiri dari layanan penerbitan SAJI DN mendapatkan nilai 88,23 (kategori baik) dan layanan penerbitan surat rekomendasi pemanfaatan jenis ikan *look like species* DN mendapatkan nilai 83,78 (kategori baik), hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan LPSPL Sorong dalam melayani masyarakat dalam pemanfaatan jenis ikan.

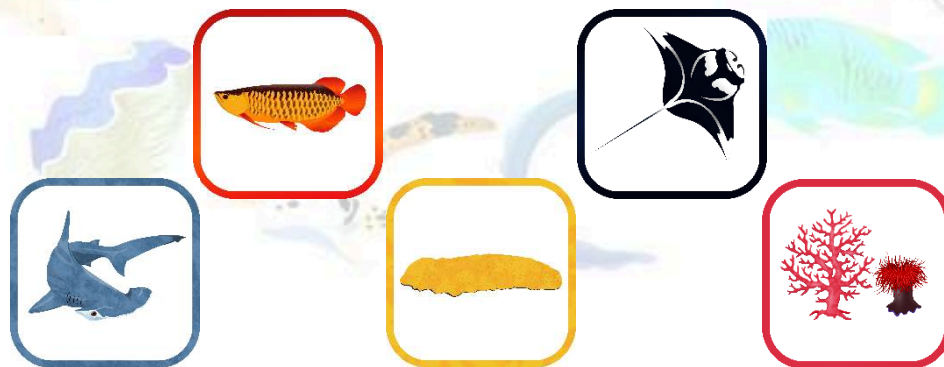
b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tidak ada kendala dalam pencapaian target ini, namun terdapat beberapa perbaikan guna meningkatkan pelayanan publik yang direkomendasikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

c. Solusi

Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKU 5



Gambar 3.28 Jenis yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong.



a. Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang teregister di LPSPL Sorong sampai dengan bulan Desember 2023 yaitu 308 pengusaha yang terdapat pada 7 provinsi dengan komposisi 35 pengusaha di Prov. Papua Barat, 27 Pengusaha di Prov. Papua Barat daya, 35 Pengusaha di Provinsi Papua, 10 pengusaha di Provinsi Papua Tengah, 62 pengusaha di prov Papua Selatan, 88 Pengusaha di Provinsi Maluku dan 51 Pengusaha di Provinsi Maluku Utara.



Gambar 3.29 Jumlah Pelaku Usaha Teregister di Wilayah Kerja LPSPL Sorong.

Pada tahun 2023 jumlah pelaku usaha yang teregister di LPSPL Sorong mengalami peningkatan sebanyak 76 pelaku usaha dari tahun sebelumnya. Total pelaku usaha pada tahun 2022 tercatat sebanyak 236 pelaku usaha dan di tahun 2021 tercatat hanya 151 pelaku usaha. Peningkatan jumlah pelaku usaha ini juga diiringi dengan perluasan jangkauan wilayah kerja dimana sebelumnya pada tahun 2021 hanya menjangkau 22 kabupaten/kota sedangkan saat ini telah menjangkau 29 kabupaten kota.

b. Pemanfaatan Jenis Ikan

Pemanfaatan jenis ikan terdapat dua mekanisme, untuk pemanfaatan jenis ikan *look alike spesies* menggunakan surat rekomendasi sedangkan untuk jenis ikan Appendiks CITES menggunakan surat angkut jenis ikan dalam negeri (SAJI DN). Pada periode tahun 2023 jumlah surat rekomendasi (SR) yang terbit sebanyak 919 dokumen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penerbitan Surat

Rekomendasi Pemanfaatan jenis ikan *Look Alike Species* pada tahun ini meningkat sebanyak 111,3 %.



Gambar 3.30 Jumlah Surat Rekomendasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong.

Surat rekomendasi yang terbit berasal dari beberapa provinsi dengan komposisi 299 dokumen SR terbit pada Provinsi Maluku, 189 dokumen SR terbit pada Provinsi Maluku Utara, 83 dokumen SR terbit pada Provinsi Papua, 61 dokumen SR terbit pada Provinsi Papua Selatan, 42 dokumen SR terbit pada Provinsi Papua Tengah, 123 dokumen SR terbit pada Provinsi Papua Barat, dan 142 dokumen SR terbit pada Provinsi Papua Barat Daya. Jumlah produk *look alike species* di wilayah kerja LPSPL Sorong adalah sebesar 922.885,77 kg dan penyumbang terbesar jumlah pemanfaatan produk pada Provinsi Maluku sebanyak 616.988,11 kg. Komoditas Jenis Ikan look Alike species yang dimanfaatkan dan dilalulintaskan menggunakan dokumen angkut Surat Rekomendasi terdiri dari jenis Hiu, Pari, Teripang dan Anemon.

Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI DN) yang diterbitkan selama tahun 2023 sejumlah 420 dokumen. Jumlah SAJI yang diterbitkan meningkat sebanyak 118,6 % jika dibandingkan dengan dokumen SAJI yang diterbitkan pada tahun 2022. Jenis yang dilalulintaskan menggunakan dokumen SAJI DN yaitu Hiu Appendiks, Pari Appendiks, dan Arwana. Penyumbang terbesar jumlah pemanfaatan produk hiu dan pari appendiks pada Provinsi Maluku sebanyak 74.415,34.



c. Pengumpulan Data Potensi dan Status Pemanfaatan Jenis di Maluku

Kegiatan pengumpulan data potensi dan status pemanfaatan jenis di Maluku dilaksanakan di Dobo Kepulauan Aru. Pada triwulan III telah dilakukan persiapan pengumpulan data potensi dengan koordinasi bersama Bapak Hengky, Bapak Rahul, dan Kapten Kapal yang dilakukan di Hotel Eora.



Gambar 3.31 Kegiatan Koordinasi Persiapan Pendaatan di Provinsi Maluku.

Pengumpulan data potensi di Maluku secara *on board* akan dilaksanakan selama 3 bulan dengan periode mulai bulan Oktober hingga bulan Desember 2023. Pada tahap persiapan ini dilakukan pembahasan mengenai administrasi maupun teknis di atas kapal seperti data apa saja yang akan diambil, bagaimana cara mengambil data, dan kesulitan yang kemungkinan akan didapatkan nantinya. Tim LPSPL Sorong bersama pelaku usaha menyamakan persepsi teknis pengambilan data terkait jumlah ekor yang perlu dilakukan pengukuran morfometrik dan kebutuhan alat tambahan di atas kapal.

d. Pengumpulan Data Potensi dan Status Pemanfaatan Jenis di Papua

Kegiatan pengumpulan data potensi dan status pemanfaatan jenis di Papua bertujuan untuk mengumpulkan data jumlah, sebaran, jenis, ukuran dan jenis alat tangkap ikan hiu atau pari di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. Pengumpulan data potensi menggunakan metode enumerasi di lapangan/di kapal penangkap hiu milik pelaku usaha di Kabupaten Biak Numfor.

Pendataan hiu Appendiks CITES di Kabupaten Biak Numfor yang dilakukan dengan 1 tenaga enumerator/observer di kapal KMN. Usahanto 2 (3 GT) yang melakukan penangkapan hiu di sekitar perairan Kabupaten Biak Numfor dengan alat

tangkap rawai selama 3 bulan dari Oktober – Desember Tahun 2023 Tidak berjalan dikarenakan Kapal observer KMN. Usahanto 2 mengalami kerusakan lambung kapal bagian kanan karena dihantam badai di dekat perairan Manokwari. Selain itu, kurangnya komunikasi antara enumerator/observer dengan pelaku usaha maupun tim LPSPL Sorong terkait kejadian tersebut.

e. Pendampingan Perizinan dan Sosialisasi Pemanfaatan Jenis Ikan

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penyadartahuan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan di wilayah kerja tentang aturan dan regulasi pemanfaatan Jenis Ikan Dilidungi, Appendiks CITES dan/atau *Look Alike Species* serta memfasilitasi pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha pemanfaat Jenis Ikan Dilidungi, Appendiks CITES dan/atau *Look Alike Species* tentang mekanisme dan tata cara pengurusan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI).

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Dobo, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Wasior yang melibatkan sebanyak 25 perusahaan dan/atau perseorangan. Adapun 4 pelaku usaha yang mendapatkan pendampingan identifikasi dan perizinan jenis ikan. Harapannya dari kegiatan ini dapat meningkatkan jumlah pelaku usaha yang teregistrasi di LPSPL Sorong dan yang memiliki SIPJI dapat bertambah sehingga perolehan PNBP juga dapat mengalami kenaikan.

f. Forum Konsultasi Publik

Forum konsultasi publik merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2017. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi standar pelayanan publik LPSPL Sorong serta untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara LPSPL Sorong sebagai penyelenggara pelayanan dan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan sehingga diharapkan diperoleh manfaat yang salah satunya adalah kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun beberapa masalah yang teridentifikasi pada kegiatan ini diantaranya perlu adanya penyesuaian pungutan perdagangan untuk jenis produk non sirip khususnya antara produk kulit dan produk daging serta adanya kesulitan dalam pengawasan terkait jumlah kuota yang dimiliki pelaku usaha. Rekomendasi perbaikan

yang diusulkan yaitu akan dilakukan survei harga produk turunan selain sirip kepada pelaku usaha dan berkoordinasi dengan PSDKP selaku pengawas terkait dengan status kepemilikan kuota pelaku usaha.

g. Bimbingan Teknis ISO 9001:2015

Selain bimbingan jenis ikan, baik verifikator maupun petugas pelayanan perlu memiliki sertifikat standar dalam kaitannya dengan pelayanan, seperti sertifikasi ISO 9001:2015 ataupun sertifikasi lainnya yang dapat menunjang kegiatan pelayanan jenis ikan, sehingga semua bentuk pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan memiliki mutu dan kualitas yang terstandarisasi.



Gambar 3.32 Bimbingan Teknis ISO 9001:2015.

Pada kegiatan ini sebanyak 45 pegawai LPSPL Sorong menerima sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Berbasis ISO 9001:2015 serta Auditor Internal Berbasis Panduan Sistem Manajemen Audit ISO 19011:2018. Sampai saat ini, pemenuhan dokumen standar ISO 9001:2015 masih akan terus dilakukan agar LPSPL Sorong dapat tersertifikasi ISO 9001:2015.

7. Rencana Aksi Triwulan I TA. 2024

Pada triwulan I akan dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung tercapainya IKU ini, diantaranya pelayanan peredaran pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau appendik CITES sebagai rutinitas setiap bulan. Selain itu LPSPL Sorong akan melaksanakan pengumpulan data potensi dan status pemanfaatan jenis di Maluku dan di Papua.



8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan sasaran meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong dengan IKU 5 jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis), sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp. 1.587.985.490 atau 98,64% dari pagu total yang dapat dilihat pada tabel 3.28 hingga tabel 3.30. Pagu anggaran yang mendukung indikator kinerja ini sebesar Rp. 1.609.852.000 yang bersumber dari APBN (Rupiah Murni) sebesar Rp 921.252.000 dan bersumber dari PNBPN sebesar Rp. 688.600.000.

Tabel 3.28 Realisasi Anggaran IKU 5 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis) bersumber dari Rupiah Murni

No.	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)	Blokir (Rp)
	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	671.252.000	651.256.736	19.995.264	97,02%	
a.	Pengumpulan Data Potensi dan Status Pemanfaatan Jenis di Maluku	51.162.000	44.001.800	7.160.200	86%	-
b.	Pengumpulan Data Potensi dan Status Pemanfaatan Jenis di PAPUA	48.838.000	41.638.244	7.199.756	85,26%	
c.	Operasional Pemanfaatan Jenis	350.000.00	344.477.917	5.522.083	98,42%	

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

Tabel 3.29 Realisasi Anggaran IKU 5 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis) bersumber dari PNBPN

No.	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)	Blokir (Rp)
	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	328.600.000	327.141.175	99,55%	1.458.825	
a.	Pendampingan Perizinan, Sosialisasi Pemanfaatan Jenis Ikan yang masuk dalam Daftar appendiks CITES Berdasarkan COP 19 Panama dan Bimbingan Teknis Aplikasi 2-SAJI-PNBPN	221.252.000	221.138.775	113.225	99,95%	-
b.	Pelatihan ISO 9001:2015	107.348.000	106.002.400	1.345.600	98,75%	

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023



Tabel 3.30 Realisasi Anggaran IKU 5 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis) bersumber dari PNPB dan Rupiah Murni

No.	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)	Blokir (Rp)
	Penyediaan Sarana Pendukung Penyelenggaraan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan	610.000.000	609.587.579	412.495	99,93%	
a.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Pemanfaatan Peredaran Jenis Ikan	250.000.000	249.822.926	177.074	99,93%	-
b.	Pengadaan Sarana Pengolah Data Pelayanan dan Peralatan Survei - PNPB	360.000.000	359.764.579	235.421	99,93%	

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

9. Rencana Penarikan Dana Triwulan IV TA. 2023

Merujuk pada Rencana Penarikan Dana (RPD) sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA LPSPL Sorong Nomor: SP DIPA-032.07.2.477440/2023 tanggal 27 Desember 2023 (Revisi ke-18) target dan realisasi anggaran bulanan untuk mendukung pencapaian IKU jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis) dapat dilihat pada tabel 3.31 hingga tabel 3.33. Pada tabel tersebut dapat kita lihat bahwa target dan realisasi rencana penarikan dana pada triwulan IV terdapat perbedaan target dan realisasi, hal ini disebabkan oleh penyusunan halaman III DIPA pada level komponen. Sehingga kedepannya harus dilakukan penyusunan rencana penarikan dana pada level subkomponen.

Tabel 3.31 Rencana Penarikan Dana IKU 5 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis) bersumber dari Rupiah Murni

No.	IKU	Pagu (Rp)	2023			
			Triwulan IV			
			Okt	Nov	Des	
	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)					
a.	Pengumpulan Data Potensi dan Status Pemanfaatan Jenis di Maluku	Target	51.162.000	5.904.964	10.260.344	12.484.491
		Realisasi		-	-	-
b.	Pengumpulan Data Potensi dan Status	Target	48.838.000	5.636.735	9.794.273	11.917.393

	Pemanfaatan Jenis di PAPUA	Realisasi		11.541.699	20.054.617	10.041.928
c.	Operasional Pemanfaatan Jenis	Target	350.000.000	30.456.137	66.429.714	64.107.978
		Realisasi		25.605.021	25.926.199	42.983.835

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

Tabel 3.32 Rencana Penarikan Dana IKU 5 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis) bersumber dari PNBP

No.	IKU	Pagu (Rp)	2023			
			Triwulan IV			
			Okt	Nov	Des	
Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)						
a.	Pendampingan Perizinan, Sosialisasi Pemanfaatan Jenis Ikan yang masuk dalam Daftar appendiks CITES Berdasarkan COP 19 Panama dan Bimbingan Teknis Aplikasi 2-SAJI-PNBP	Target	221.252.000	19.252.804	41.993.447	40.525.761
		Realisasi		24.103.920	82.496.962	53.014.593
b.	Pelatihan ISO 9001:2015	Target	107.348.000	-	89.852.400	17.495.600
		Realisasi		-	89.852.400	16.150.000

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

Tabel 3.33 Rencana Penarikan Dana IKU 5 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis) bersumber dari PNBP dan Rupiah Murni

No.	IKU	Pagu (Rp)	2023			
			Triwulan IV			
			Okt	Nov	Des	
Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)						
a.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Pemanfaatan Peredaran Jenis Ikan	Target	250.000.000	-	228.147.418	21.852.582
		Realisasi		-	179.985.390	69.837.536
b.	Pengadaan Sarana Pengolah Data Pelayanan dan Peralatan Survei -PNBP	Target	360.000.000	-	328.532.282	31.467.718
		Realisasi		-	357.664.579	2.100.000

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023



3.6 Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya Nilai PNBP LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Meningkatnya Nilai PNBP LPSPL Sorong, LPSPL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 6 ini kedalam 1 IKU yaitu IKU 6 Nilai PNBP LPSPL Sorong (Rp.000).

3.6.1 IKU 6 Nilai PNBP LPSPL Sorong (Rp.000)

Penerimaan Negara Bukan Pajak LPSPL Sorong adalah seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya. Kegiatan ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Teknik menghitung capaian IKU ini dengan formulasi sebagai berikut:

Nilai PNBP 2023 = Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya (425629) + Pendapatan Perizinan Lainnya (425259) yang diperoleh dari Satuan Kerja LPSPL Sorong

Penerimaan Negara Bukan Pajak LPSPL Sorong adalah seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya. Kegiatan ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Teknik menghitung capaian IKU ini dengan formulasi sebagai berikut:

Nilai PNBP 2022 = Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya (425629) + Pendapatan Perizinan Lainnya (425259) yang diperoleh dari Satuan Kerja LPSPL Sorong

$$PNBP_{LPSPL\ Sorong} = Saji\ DN + Surat\ Rekomendasi\ DN + Surat\ Rekomendasi\ LN + Denda$$

Dimana:

Saji DN = Pungutan atas dokumen Saji DN ¹⁾ + pungutan perdagangan + pungutan pengambilan ²⁾

Surat Rekomendasi = pungutan atas dokumen rekomendasi + pungutan perdagangan

Denda dikenakan atas pengangkutan jenis ikan yang melebihi volume pada dokumen angkut

keterangan :

1) untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dikenakan tarif 25%



2) dikenakan untuk pengangkutan jenis ikan yang berasal pengambilan dari alam berdasarkan kuota yang dimiliki

Formulasi penghitungan pungutan :

Pungutan pengambilan = jumlah individu x Tarif PNBP x harga patokan jenis ikan

Pungutan perdagangan = volume x Tarif PNBP x harga patokan jenis ikan

Denda = Tarif PNBP x jumlah produk yang tidak sesuai dengan permohonan

Tabel 3.34 Capaian IKU 6 Nilai PNBP LPSPL Sorong (Rp.000)

SK.6	Meningkatnya Nilai PNBP LPSPL Sorong									
IKU 6	Nilai PNBP LPSPL Sorong (Rp.000)									
Realisasi 2022	Tahun 2023				Tahun 2023		Renstra LPSPL Sorong 2020-2024			
2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2022	Target PK 2023	% Realisasi thd PK	Target s.d 2023	Realisasi s.d 2023	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2020-2024
Rp.	Rp.	Rp.	120%	Rp.	Rp.	120%				
1.463.546,940	718.180,000	1.647.742,751		184.195,811	718.180,000					

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

1. Capaian IKU Nilai PNBP LPSPL Sorong (Rp.000) Tahun 2023

Target IKU Nilai PNBP LPSPL Sorong (Rp.000) pada tahun 2023 yaitu Rp. 718.180.000. Periode capaian dan periode pelaporan IKU ini adalah tahunan, berdasarkan realisasi penerimaan pada web <https://spanint.kemenkeu.go.id> dan memorandum ketua tim kerja pengelolaan keuangan dan BMN nomor:107/DJPRL.1/TU.220/I/2024 perihal capaian PNBP lingkup Ditjen PKRL tahun 2023 bahwa pada tahun 2023 realisasi PNBP LPSPL Sorong adalah Rp. 1.647.742.751 atau 229,43% dari target tahun 2023. Nilai PNBP LPSPL Sorong diperoleh dari Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya (425629) + Pendapatan Perizinan Lainnya (425259).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

Periode pencapaian dan pelaporan indikator kinerja ini pada tahun 2022 dan 2023 yaitu tahunan. Pada tahun 2023 capaian PNBP LPSPL Sorong Rp. 1.647.742.751 atau lebih tinggi daripada capaian PNBP LPSPL Sorong tahun 2022 sebesar Rp. 1.463.546.940. Pada tahun 2023 capaian PNBP LPSPL Sorong meningkat sebesar 12,58% dari capaian tahun 2022. Peningkatan pencapaian target kinerja ini didukung kegiatan pendampingan perizinan dan



sosialisasi pemanfaatan jenis pada wilayah remote yang belum pernah dilakukan sosialisasi sehingga pelaku usaha yang teregister di LPSPL Sorong semakin bertambah.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang baru ada pada tahun 2022 dan belum tercantum dalam dokumen dokumen Renstra 2020-2024, sehingga tidak dapat dibandingkan.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi Sumberdaya Anggaran, Manusia, dan Waktu pada Verifikasi Online. Adanya SOP pelayanan jenis yang mengatur jumlah dan kategori produk yang akan di BAP di lokasi/gudang dengan jumlah produk yang di BAP di kantor LPSPL Sorong termasuk pelayanan verifikasi online menyebabkan penghematan dari segi waktu dan beban APBN yang ditimbulkan untuk melakukan verifikasi. Penambahan pelaku usaha pada wilayah remote yang dilakukan pelayanan verifikasi online menyebabkan efisiensi sumberdaya manusia.

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Terdapat sosialisasi SOP pelayanan Hiu dan Pari di wilayah kerja LPSPL Sorong kepada pelaku usaha Hiu dan Pari secara berkala, adanya transparansi dalam pelayanan penerbitan SR dan SAJI-DN, pelayanan berbasis aplikasi e-SAJI juga mempermudah dalam melakukan pelayanan, dan selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada para pelaku usaha Hiu dan Pari. Komitmen tersebut tertulis pada Maklumat Pelayanan dan Pakta Integritas. Hal ini juga didukung SDM LPSPL Sorong yang dapat diandalkan dalam mengidentifikasi jenis ikan yang dimanfaatkan. Keberhasilan dalam mencapai target ini juga didukung oleh bendahara penerimaan negara tersertifikasi dengan nomor register: BNT-06524/185/747/2021. Keberhasilan pencapaian target kinerja ini juga di dukung kegiatan pendampingan perizinan dan sosialisasi pemanfaatan jenis pada wilayah remote yang belum pernah dilakukan sosialisasi.



b. Analisis Kegagalan/Kendala

Kendala pada kegiatan ini yaitu area remote yang sangat luas. Sehingga untuk meningkatkan perolehan PNBP maka diperlukan sosialisasi terkait pemanfaatan jenis ikan di seluruh wilayah kerja LPSPL Sorong.

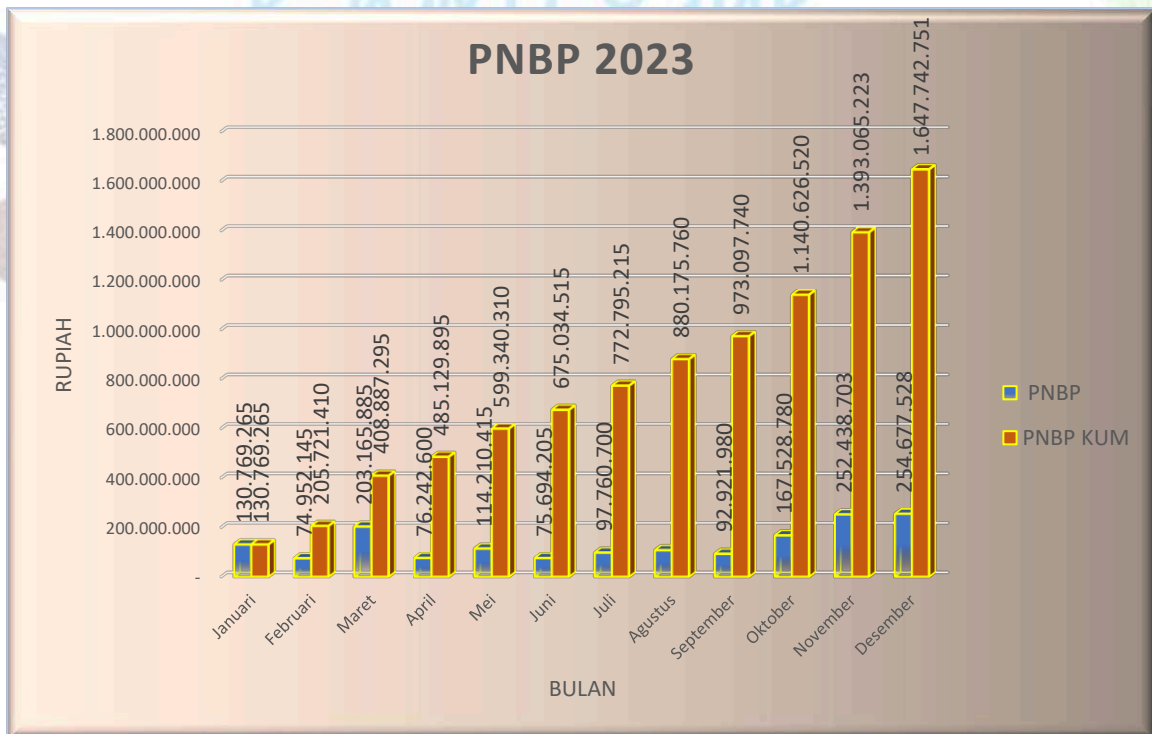
c. Solusi

Karena wilayah remote sangat luas maka perlu penambahan sumberdaya manusia dan titik pelayanan pemanfaatan jenis ikan serta sosialisasi pemanfaatan jenis ikan di seluruh wilayah kerja LPSPL Sorong.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKU 6

a. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satuan Kerja LPSPL Sorong TA 2023

Pada periode tahun 2023 LPSPL Sorong telah melakukan pemungutan PNBP dari kegiatan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya. Kegiatan ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jenis pendapatan yang dipungut berasal dari pendapatan perizinan lainnya (425259) + pendapatan jasa kelautan dan perikanan lainnya (425629).



Gambar 3.33 Grafik Perolehan PNBP Tahun 2023.



7. Rencana Aksi Triwulan I TA. 2024

Pada triwulan I akan dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung tercapainya IKU ini, diantaranya pelayanan peredaran pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau appendik CITES sebagai rutinitas setiap bulan.

8. Realisasi Anggaran

Tidak ada pagu anggaran dalam mendukung capaian indikator kinerja Nilai PNBSP LPSPL Sorong (Rp.000), yang dapat dilihat pada tabel 3.35.

Tabel 3.35 Realisasi Anggaran IKU 6 Nilai PNBSP LPSPL Sorong (Rp.000)

No.	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Nilai PNBSP LPSPL Sorong (Rp.000)	-	-	-	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

9. Rencana Penarikan Dana Triwulan IV TA. 2023

Tidak terdapat anggaran yang melekat untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini, sehingga tidak terdapat perencanaan dalam penarikan dana.

3.7 Sasaran Kegiatan 7 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LPSPL Sorong, maka LPSPL Sorong menjabarkan dalam 10 IKM, yaitu (i) IKM 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai), (ii) IKM 8 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai), (iii) IKM 9 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LPSPL Sorong (Nilai), (iv) IKM 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks), (v) IKM 11 Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai), (vi) IKM 12 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LPSPL Sorong (Dokumen), (vii) IKM 13 Persentase Unit Kerja Lingkup LPSPL Sorong yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%), (viii) IKM 14 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup LPSPL Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%), (ix) IKM 15 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LPSPL Sorong (%), (x) IKM 16 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%).



3.7.1 IKM 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Indikator tersebut antara lain Revisi DIPA (10%), Deviasi Halaman III DIPA (10%), Data Kontrak (10%), Penyelesaian Tagihan (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), Penyerapan Anggaran (20%), dan Capaian Output (25%).

Tabel 3.36 Capaian IKM 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

SK.7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LPSPL Sorong										
IKM 7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)										
Realisasi 2022	Tahun 2023				Tahun 2023		Renstra LPSPL Sorong 2020-2024				
2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2022	Target PK 2023	% Realisasi thd PK	Target s.d 2023	Realisasi s.d 2023	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2020-2024	
94,37	93,75	91,83	97,95%	(-2,52)	93,75	97,95%	91	91,83	91	100,91%	

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

1. Capaian IKM Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai) Tahun 2023

Berdasarkan aplikasi OMSPAN pada <https://spanint.kemenkeu.go.id> dan nota dinas Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 100/SJ.2/TU.210/I/2024 bahwa nilai IKPA LPSPL Sorong pada semester II yaitu 91,83 atau 97,95% dari target kinerja. Periode pencapaian target dan periode pelaporan capaian IKM ini adalah semesteran dengan target semester I adalah 82 dan target semester II adalah 89. Indikator kinerja ini tidak tercapai karena tidak maksimalnya nilai pada aspek kualitas perencanaan anggaran terutama pada komponen deviasi halaman III DIPA. Pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran ada 3 komponen yang perlu ditingkatkan nilainya diantaranya komponen penyerapan anggaran, komponen belanja kontraktual, dan komponen pengelolaan UP dan TUP.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	066	032	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	Nilai	100.00	59.78	88.09	87.14	100.00	95.23	100.00	100.00	91.83	100%	91.83
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.98	17.62	8.71	10.00	9.52	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	79.89		94.09					100.00			

Gambar 3.34 Nilai IKPA Tahun 2023. (Sumber: Aplikasi OMSPAN per 10 Januari 2024)

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup LPSP Sorong pada tahun 2022 yaitu 94,37 dari target 89. Tahun 2023, nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran yaitu 91,83 dari target 93,75. Sehingga nilai IKPA pada tahun 2023 lebih kecil daripada nilai IKPA tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh tidak maksimalnya nilai pada aspek kualitas perencanaan anggaran terutama pada komponen deviasi halaman III DIPA.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Nilai IKPA LPSP Sorong pada tahun 2023 yaitu 91,83, sedangkan target nilai posisi akhir dalam dokumen Renstra 2020-2024 adalah 91. Sehingga capaian nilai IKPA LPSP Sorong pada tahun 2023 telah tercapai 100,91% lebih besar dari target nilai posisi akhir dokumen Renstra 2020-2024. Namun karena adanya perubahan target pada perjanjian kinerja tahun 2023 yang lebih tinggi dari target pada dokumen Renstra 2020-2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target pada dokumen Renstra 2020-2024.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi sumberdaya anggaran. IKPA digunakan dalam mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran. Efisiensi anggaran terlihat bahwa target kinerja telah dilaksanakan namun terdapat sisa anggaran.

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

LPSPL Sorong memiliki komitmen untuk memperbaiki kualitas perencanaan anggaran melalui pelaksanaan revisi DIPA; menjaga kualitas pelaksanaan anggaran melalui monitoring penyerapan anggaran setiap bulan, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP-TUP dan dispensasi SPM serta berusaha meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memaksimalkan capaian output. LPSPL Sorong secara rutin melakukan monitoring capaian output dengan perencanaan dan realisasi anggaran setiap bulannya melalui rapat bulanan.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Nilai pada komponen deviasi halaman III cukup kecil, sehingga nilai IKPA LPSPL Sorong pada tahun 2023 tidak maksimal atau tidak tercapai. Hal ini juga disebabkan karena adanya perubahan target nilai IKPA pada semester II tahun 2023 pada lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Faktor anggaran yang di blokir hingga akhir tahun juga berpengaruh pada penyerapan anggaran.

c. Solusi

Perlu ditingkatkan komitmen dalam pelaksanaan kegiatan atau penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan anggaran.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKM 7

LPSPL Sorong melakukan monitoring penginputan capaian output dan realisasi keuangan dan fisik serta memastikan bobot maksimal sudah terupdate pada aplikasi Omspan. Secara rutin capaian bulanan IKPA disampaikan pada rapat bulanan. Pada triwulan IV telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini diantaranya melaksanakan revisi DIPA dan penyesuaian pada halaman III DIPA. Selain itu, ada beberapa kegiatan pendukung lain diantaranya LPSPL Sorong melaksanakan penyusunan dokumen penganggaran satuan kerja pusat dan UPT lingkup PRL, dan melakukan penyusunan pagu PNBP.



7. Rencana Aksi Triwulan I TA 2024

Pada triwulan I akan dilakukan pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI, melakukan revisi POK dan halaman III DIPA untuk target triwulan I, dan melakukan rekonsiliasi keuangan lingkup satuan kerja DJPKRL.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LPSPL Sorong dengan IKM 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai) berasal dari rekonsiliasi SAI-SIMAK BMN dan perencanaan program dan anggaran. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2023 yaitu Rp. 93.404.000 atau 99,60% dari total pagu Rp. 93.404.000 dapat dilihat pada tabel 3.37.

Tabel 3.41 Realisasi Anggaran IKM 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

No.	IKM	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	93.404.000	93.032.476	371.524	99,60%
a.	Rekonsiliasi SAI - SIMAK BMN	53.404.000	53.255.768	148.232	99,72%
b.	Perencanaan Program dan Anggaran	40.000.000	39.776.708	223.292	99,44%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

9. Rencana Penarikan Dana Triwulan IV TA. 2023

Merujuk pada Rencana Penarikan Dana (RPD) sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA LPSPL Sorong Nomor: SP DIPA-032.07.2.477440/2023 tanggal 27 Desember 2023 (Revisi ke-18) target dan realisasi anggaran bulanan untuk mendukung pencapaian IKM 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai) yang berasal dari rekonsiliasi SAI-SIMAK BMN dan perencanaan program dan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.38. Pada tabel tersebut dapat kita lihat bahwa target dan realisasi rencana penarikan dana pada triwulan IV telah sesuai.



Tabel 3.38 Rencana Penarikan Dana IKM 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

No.	IKM	Pagu (Rp)	2023			
			Triwulan IV			
			Okt	Nov	Des	
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)						
a.	Rekonsiliasi SAI - SIMAK BMN	Target	53.404.000	-	-	5.998.232
		Realisasi		-	-	5.850.000
b.	Perencanaan Program dan Anggaran	Target	40.000.000	-	-	223.292
		Realisasi		-	-	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

3.7.2 IKM 8 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

Dasar Hukum pelaksanaan penilaian kinerja anggaran adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi:

- a. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Pada level satuan kerja, cakupan evaluasi kinerja mencakup Aspek Implementasi.
- b. Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga.
- c. Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

- a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
- b. Baik, apabila NKA >80 - 90;



- c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
- d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
- e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Nilai kinerja anggaran tingkat satuan kerja Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021 dihitung berdasarkan nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja terkait, yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai capaian kinerja anggaran setiap variabel aspek implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat unit eselon I atau satuan kerja yang terdiri atas:

- a. capaian output sebesar 43,5% (empat puluh tiga koma lima persen);
- b. efisiensi sebesar 28,6% (dua puluh delapan koma enam persen);
- c. konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2% (delapan belas koma dua persen); dan
- d. penyerapan anggaran sebesar 9,7% (Sembilan koma tujuh persen)

Capaian NKA tersebut diperoleh dari data target capaian (input) dan realisasi capaian (output) kegiatan dan anggaran yang dimasukkan setiap satker lingkup K/L ke dalam aplikasi SMART yang dikelola oleh Kemenkeu. Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satker kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi SMART dapat diakses melalui link <https://smart.kemenkeu.go.id>.

Tabel 3.39 Capaian IKM 8 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LPSPS Sorong (Nilai)

SK.7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LPSPS Sorong									
IKM 8	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LPSPS Sorong (Nilai)									
Realisasi 2022	Tahun 2023				Tahun 2023		Renstra LPSPS Sorong 2020-2024			
2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2022	Target PK 2023	% Realisasi thd PK	Target s.d 2023	Realisasi s.d 2023	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2020-2024
89,59	82	92,11	112,33%	(+2,52)	82	112,33%	88	92,11	89	103,49%

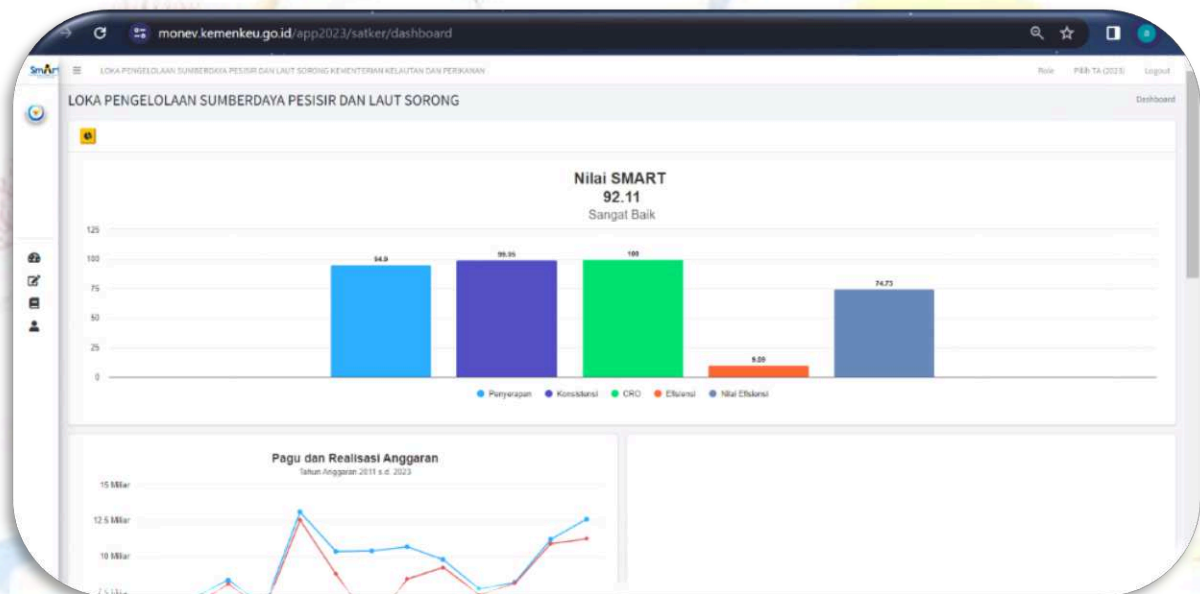
Sumber Data: LPSPS Sorong, per 31 Desember 2023

1. Capaian IKM Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LPSPS Sorong (Nilai) Tahun 2023

Berdasarkan aplikasi DJA SMART pada <https://monev.kemenkeu.go.id/> dan nota dinas Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 84/SJ.2/RC.610/I/2024



bahwa nilai kinerja anggaran LPSPL Sorong pada tahun 2023 yaitu 92,11 atau 112,33% dari target kinerja 82. Nilai 92,11 didapat dari 4 komponen pendukung diantaranya komponen penyerapan dengan nilai 94,9, komponen konsistensi dengan nilai 99,05, komponen capaian rincian output dengan nilai 100, dan komponen nilai efisiensi dengan nilai 74,73.



Gambar 3.35 Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023. (Sumber: Aplikasi DJA SMART 10 Januari 2024)

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LPSPL Sorong tahun 2022 yaitu 89,59 dari target 81. Tahun 2023, capaian nilai kinerja anggaran yaitu 92,11 dari target 82. Sehingga nilai kinerja anggaran pada tahun 2023 lebih besar daripada nilai kinerja anggaran pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena meningkatnya nilai pada komponen nilai efisiensi pada tahun 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Nilai kinerja anggaran LPSPL Sorong tahun 2023 yaitu 92,11, sedangkan target nilai posisi akhir dalam dokumen Renstra 2020-2024 adalah 89. Sehingga capaian nilai kinerja anggaran LPSPL Sorong pada tahun 2022 telah tercapai 103,49% lebih besar dari target nilai posisi akhir dokumen Renstra 2020-2024.



4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi sumberdaya anggaran. Apabila nilai kinerja anggaran baik maka input-output organisasi berjalan baik pula. Input-output meliputi Capaian Keluaran Kegiatan, Efisiensi, Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan, dan Penyerapan Anggaran. Nilai kinerja anggaran akan semakin tinggi seiring dengan tingginya efisiensi dalam pelaksanaan anggaran.

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

LPSPL Sorong secara rutin mengontrol realisasi anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan dan mengisi secara bertahap capaian pada aplikasi SAKTI. Selain itu, SDM LPSPL Sorong telah mengikuti bimbingan teknis terkait mengelola aplikasi SMART DJA. LPSPL Sorong juga melakukan revisi halaman III DIPA untuk meningkatkan nilai konsistensi.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tidak ada kendala pada pencapaian IKM ini, kegagalan mencapai target dapat terjadi apabila organisasi tidak memahami indikator kinerja beserta pengukurannya. Terdapat anggaran yang di blokir hingga akhir tahun yang berpengaruh pada nilai penyerapan anggaran.

c. Solusi

LPSPL Sorong selalu mencapai target dalam pencapaian IKM ini sehingga belum terdapat solusi yang dilakukan karena tidak ada kendala yang menyebabkan kegagalan. Untuk meminimalisir potensi kendala dilaksanakan monitoring berkala dalam pelaksanaan kegiatan.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKM 8

LPSPL Sorong melakukan penginputan capaian output pada aplikasi SAKTI setiap bulan serta monitoring update nilai kinerja anggaran pada aplikasi DJA SMART. Secara rutin nilai kinerja anggaran disampaikan pada rapat bulanan. Pada triwulan IV LPSPL Sorong menginput laporan semester II pada aplikasi DJA SMART.



7. Rencana Aksi Triwulan I TA 2024

Pada triwulan I akan dilakukan penginputan capaian rincian output pada aplikasi SAKTI dan monitoring nilai kinerja anggaran pada aplikasi SMART DJA.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LPSPL Sorong IKM 8 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai) berasal dari perencanaan program dan anggaran. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2023 yaitu Rp. 39.776.708 atau 99,44% dari total pagu Rp. 40.000.000 dapat dilihat pada tabel 3.34.

Tabel 3.40 Realisasi Anggaran IKM 8 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

No.	IKM	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	40.000.000	39.776.708	223.292	99,44%
a.	Perencanaan Program dan Anggaran	40.000.000	39.776.708	223.292	99,44%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

9. Rencana Penarikan Dana Triwulan IV TA. 2023

Merujuk pada Rencana Penarikan Dana (RPD) sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA LPSPL Sorong Nomor: SP DIPA-032.07.2.477440/2023 tanggal 27 Desember 2023 (Revisi ke-18) target dan realisasi anggaran bulanan untuk mendukung pencapaian IKM 8 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai) yang berasal dari perencanaan program dan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.41.

Tabel 3.41 Rencana Penarikan Dana IKM 8 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

No.	IKM	Pagu (Rp)	2023			
			Triwulan IV			
			Okt	Nov	Des	
	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	40.000.000				
a.	Perencanaan Program dan Anggaran	Target	40.000.000	-	-	223.292
		Realisasi		-	-	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023



3.7.3 IKM 9 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LPSPL Sorong (Nilai)

WBK adalah suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Standar penilaian antara lain:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Nilai WBK merupakan hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP. Jika pada tahun anggaran, tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian menggunakan capaian tahun sebelumnya.

Tabel 3.42 Capaian IKM 9 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LPSPL Sorong (Nilai)

SK.7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LPSPL Sorong									
IKM 9	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LPSPL Sorong (Nilai)									
Realisasi 2022	Tahun 2023				Tahun 2023		Renstra LPSPL Sorong 2020-2024			
2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2022	Target PK 2023	% Realisasi thd PK	Target s.d 2023	Realisasi s.d 2023	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2020-2024
81,64	75	81,64	108,85%	(=)	75	108,85%	75	81,64	75	108,85%

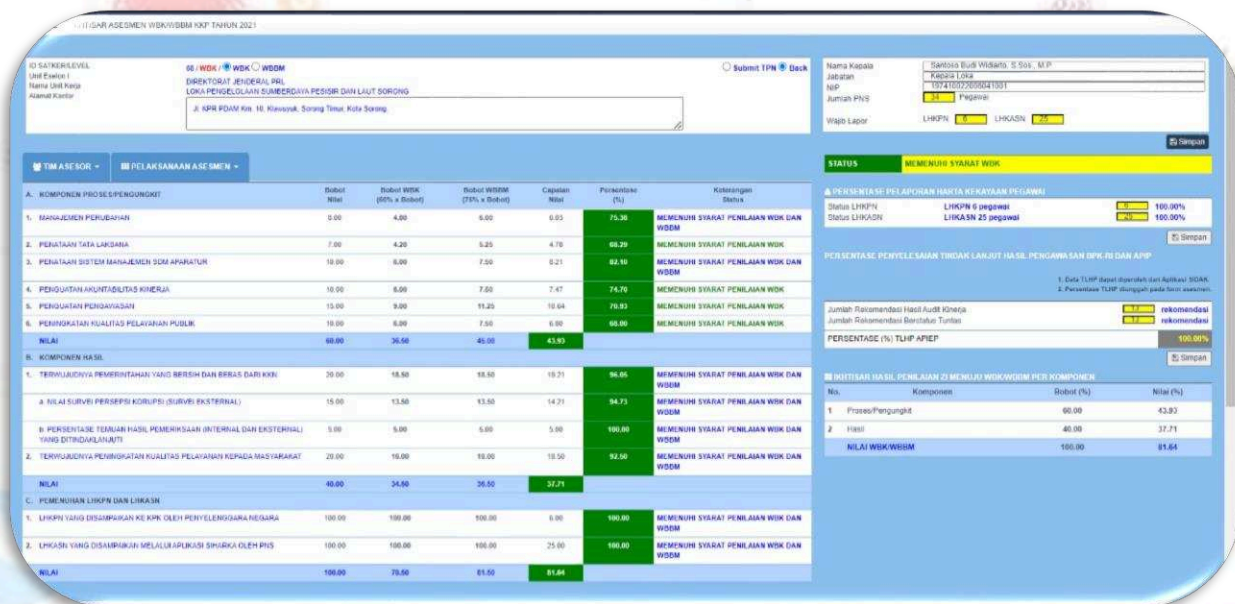
Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

1. Capaian IKM Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LPSPL Sorong (Nilai) Tahun 2023

Perhitungan penilaian WBK dilakukan oleh Inspektorat Jenderal menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. LPSPL Sorong telah melakukan pemenuhan dokumen sesuai dengan LKE dan LKE Reform, namun sampai dengan akhir periode pengukuran tahun 2023, tidak dilakukan penilaian oleh Tim Penilai



Internal (TPI) atau Tim Penilai Nasional (TPN) pada LPSP Sorong. Merujuk pada manual IKU Tahun 2023, jika tidak dilakukan penilaian maka capaian Indikator Kinerja ini menggunakan capaian tahun sebelumnya yaitu 81,64. Hal ini sesuai dengan memorandum dari Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Nomor: 02/DJPKRL.1.4/TU.120/I/2024 perihal capaian indikator kinerja program “Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK”.



Gambar 3.36 Nilai WBK LPSP Sorong (Sumber: Aplikasi ezi.kkp.go.id per 31 Desember 2023).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja LPSP Sorong pada tahun 2023 sama dengan nilai pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 tidak dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI) atau Tim Penilai Nasional (TPN) pada LPSP Sorong.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Nilai WBK LPSP Sorong tahun 2023 yaitu 81,64, sedangkan target nilai posisi akhir dalam dokumen Renstra 2020-2024 adalah 75. Sehingga capaian nilai WBK LPSP Sorong pada tahun 2023 telah tercapai 108,85% lebih besar dari target nilai posisi akhir pada dokumen Renstra 2020-2024.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya ada pada sumberdaya manusia (SDM), dengan kondisi SDM LPSPL Sorong yang terbatas, LPSPL Sorong dapat mencapai target pada tahun sebelumnya. Efisiensi penggunaan anggaran ada pada pemenuhan dokumen WBK dapat memanfaatkan teknologi informasi sehingga meminimalkan belanja perjalanan dinas.

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

LPSPL Sorong memiliki 6 (enam) kelompok kerja yang tertuang pada surat tugas Kepala LPSPL Sorong Nomor: ST.117/LPSPL.1/TU.110/VIII/2023, yang selalu memonitor pelaksanaan kinerja organisasi dalam rangka mencapai predikat WBK sehingga masing-masing komponen penilaian dapat dimonitoring kemajuannya.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Kegagalan mencapai target dapat terjadi apabila tidak ada dokumen terkait proses terbentuknya predikat WBK di organisasi LPSPL Sorong, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang setiap tahapannya harus didokumentasikan dan diarsipkan. Jumlah SDM LPSPL Sorong yang setiap tahunnya berkurang juga membuat tidak maksimalnya pencapaian nilai WBK.

c. Solusi

LPSPL Sorong melakukan pertemuan setiap bulannya dengan seluruh pegawai untuk monitoring status kelengkapan dokumen WBK, sekretaris pembangunan zona integritas memantau dan menghimbau agar setiap kelompok kerja melengkapi dokumen yang belum tersedia, serta mengupdate persentase pemenuhan dokumen yang telah disusun dan diupload.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKM 9

Pada tahun 2023, LPSPL Sorong telah menyusun rencana aksi terhadap pemenuhan dokumen WBK sesuai dengan LKE Reform pada tahun 2022. LPSPL Sorong juga melaksanakan rapat pembahasan progress pembangunan WBK WBBM LPSPL Sorong setiap bulan serta adanya pendampingan oleh Inpektorat Jenderal V terkait keberlangsungan WBK di LPSPL Sorong



7. Rencana Aksi Triwulan I TA 2024

Pada triwulan I tahun 2024 akan dilaksanakan pemenuhan dokumen secara berkala, monitoring kelengkapan dokumen dan menyampaikan persentase pemenuhan dokumen yang telah disusun dan diupload oleh Sekretariat Pembangunan WBK LPSPL Sorong.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan sasaran tata kelola pemerintahan yang baik lingkup LPSPL Sorong IKM 9 nilai unit kerja berpredikat menuju WBK LPSPL Sorong (Nilai) berasal dari zona integritas WBK/WBBM LPSPL Sorong. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2023 yaitu Rp. 24.446.370 atau 99,25% dari total pagu Rp. 24.632.000 yang dapat dilihat pada tabel 3.43.

Tabel 3.43 Realisasi Anggaran IKM 9 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LPSPL Sorong (Nilai)

No.	IK	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LPSPL Sorong (Nilai)	24.632.000	24.446.370	185.630	99,25%
a.	Zona Integritas WBK/WBBM LPSPL Sorong	24.632.000	24.446.370	185.630	99,25%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

9. Rencana Penarikan Dana Triwulan IV TA. 2023

Merujuk pada Rencana Penarikan Dana (RPD) sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA LPSPL Sorong Nomor: SP DIPA-032.07.2.477440/2023 tanggal 27 Desember 2023 (Revisi ke-18) target dan realisasi anggaran bulanan untuk mendukung pencapaian IKM 9 nilai unit kerja berpredikat menuju WBK LPSPL Sorong (Nilai) dapat dilihat pada tabel 3.44. Pada tabel tersebut dapat kita lihat bahwa target dan realisasi rencana penarikan dana pada triwulan IV telah sesuai.

Tabel 3.44 Rencana Penarikan Dana IKM 9 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LPSPL Sorong (Nilai)

No.	IKM	Pagu (Rp)	2023		
			Triwulan IV		
			Okt	Nov	Des
	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LPSPL Sorong (Nilai)	24.632.000			

a.	Zona Integritas WBK/WBBM LPSP Sorong	Rencana	24.632.000	-	-	24.632.000
		Realisasi		-	-	24.446.370

Sumber Data: LPSP Sorong, per 31 Desember 2023

3.7.4 IKM 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSP Sorong (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Teknik perhitungan sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin.
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi: Pendidikan S-3 (Strata-Tiga), Pendidikan S-2 (Strata-Dua), Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat), Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda), Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan Pendidikan di bawah SLTA. Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki, bagi pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional mendapatkan bobot yang sama dengan pejabat fungsional yang telah mengikuti pelatihan fungsional berdasarkan hasil koordinasi Instansi Pengguna dengan Instansi Pembina dan melampirkan bukti berupa surat keterangan/rekomendasi yang selanjutnya dimutakhirkan ke dalam SIASN, dengan formula sebagai berikut:



Tabel 3.45 Kualifikasi tingkat Pendidikan.

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DIII/DI/SLTA sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DIII/DI/SLTA sederajat	25	23	22	21	20	15
			DIII	25	23	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
S2		25	20	15	10	5	1	

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir
 - a. Bagi pegawai negeri sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari akan dinilai secara proposional;



- b. Riwayat pelatihan teknis dan diklat pendukung/seminar/workshop/sejenisnya dapat melalui jalur pelatihan secara klasikal dan/atau nonklasikal, dengan formula sebagai berikut:

Tabel 3.46 Indikator riwayat pengembangan kompetensi

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah Ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

Tabel 3.47 Indikator penilaian prestasi

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10



5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Tabel 3.48 Indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin

Nilai	Keterangan Nilai SKP	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
- Kualifikasi dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
 - Kompetensi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sbb:
 - Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
 - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
 - Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - Kinerja diolah diolah datanya dari aplikasi Kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada aplikasi SIASN BKN dengan nilai Kinerja dari Kategori;



- d. Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang **tidak pernah/pernah** dijatuhi hukuman disiplin selama 1 tahun terakhir dan di update pada aplikasi e-Pegawai.
7. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:
- Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
 - Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
 - Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
 - Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

8. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Displin}$$

$$IPLev 2 = \text{Rerata Nilai IPASN dari seluruh ASN lingkup Level 2}$$

$$IPLev 1 = IPASN \text{ Pejabat Lev 1} + \text{Rerata Nilai IPLev 2}$$

9. Kategori Penilaian IP ASN:

Tabel 3.49 Kategori penilaian IP ASN

Nilai	Kategori
91-100	Sangat Profesional / Sangat Tinggi
81-90	Cenderung Profesional / Tinggi
71-80	Rentan Tidak Profesional / Sedang
61-70	Cenderung Tidak Profesional / Rendah
≤60	Sangat Tidak Profesional / Sangat Rendah

Tabel 3.50 Capaian IKM 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)

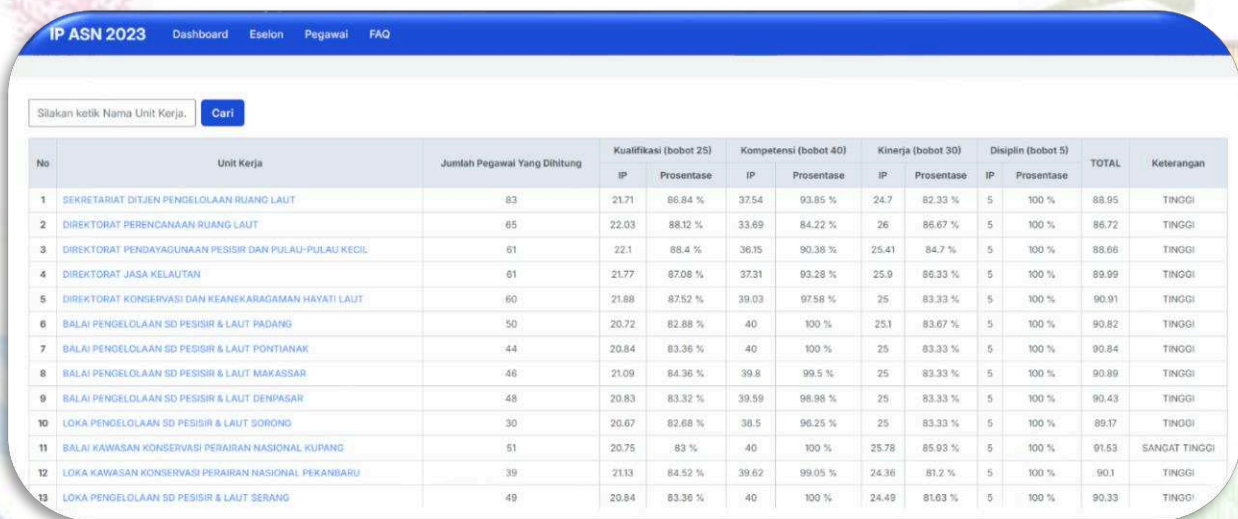
SK.7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LPSPL Sorong									
IKM 10	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)									
Realisasi 2022	Tahun 2023				Tahun 2023		Renstra LPSPL Sorong 2020-2024			
	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2022	Target PK 2023	% Realisasi thd PK	Target s.d 2023	Realisasi s.d 2023	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2020-2024
85,94	85	89,17	104,91%	(+3,23)	85	104,91%	75	89,17	76	117,33%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023



1. Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks) Tahun 2023

Berdasarkan tautan IP ASN pada <http://ropeg.kkp.go.id:4080/#/ip-asn/eselon> dan Surat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor : B.272/DJPKRL.1/KP.720/I/2024 perihal capaian indikator kinerja indeks profesional aparat sipil negara (IP ASN) semester II tahun 2023 lingkup Direktorat Jenderal PKRL, nilai IP ASN LPSPL Sorong pada semester II yaitu 89,17. Periode pencapaian target dan periode pelaporan capaian IK ini adalah semesteran dengan target semester I adalah 76 dan target semester II adalah 85. Pada semester II capaian indeks profesionalitas ASN lingkup LPSPL Sorong yaitu 104,91% dari target kinerja.



No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DIJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	83	21.71	86.84 %	37.54	93.85 %	24.7	82.33 %	5	100 %	88.95	TINGGI
2	DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG LAUT	65	22.03	88.12 %	33.69	84.22 %	26	86.67 %	5	100 %	86.72	TINGGI
3	DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	61	22.1	88.4 %	36.15	90.38 %	25.41	84.7 %	5	100 %	88.66	TINGGI
4	DIREKTORAT JASA KELAUTAN	61	21.77	87.08 %	37.31	93.28 %	25.9	86.33 %	5	100 %	89.99	TINGGI
5	DIREKTORAT KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT	60	21.88	87.52 %	39.03	97.58 %	25	83.33 %	5	100 %	90.91	TINGGI
6	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PADANG	50	20.72	82.88 %	40	100 %	25.1	83.67 %	5	100 %	90.82	TINGGI
7	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PONTIANAK	44	20.84	83.36 %	40	100 %	25	83.33 %	5	100 %	90.84	TINGGI
8	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT MAKASSAR	46	21.09	84.36 %	39.8	99.5 %	25	83.33 %	5	100 %	90.89	TINGGI
9	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT DENPASAR	48	20.83	83.32 %	39.59	98.98 %	25	83.33 %	5	100 %	90.43	TINGGI
10	LOKA PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT SORONG	30	20.67	82.68 %	38.5	96.25 %	25	83.33 %	5	100 %	89.17	TINGGI
11	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG	51	20.75	83 %	40	100 %	25.78	85.93 %	5	100 %	91.53	SANGAT TINGGI
12	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	39	21.13	84.52 %	39.62	99.05 %	24.36	81.2 %	5	100 %	90.1	TINGGI
13	LOKA PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT SERANG	49	20.84	83.36 %	40	100 %	24.49	81.63 %	5	100 %	90.33	TINGGI

Gambar 3.37 Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023. (Sumber: <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2023>, per 31 Desember 2023)

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

Indeks Profesionalitas ASN LPSPL Sorong pada tahun 2022 yaitu 85,94 dari target 83. Tahun 2023, indeks profesionalitas ASN LPSPL Sorong yaitu 89,17 dari target 85. Sehingga capaian indeks profesionalitas ASN LPSPL Sorong pada tahun 2023 lebih besar daripada tahun 2022, hal ini dikarenakan adanya perubahan cara hitung IP ASN.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indeks Profesionalitas ASN LPSPL Sorong pada tahun 2023 yaitu 89,17, sedangkan target nilai posisi akhir dalam dokumen Renstra 2020-2024 adalah 76. Sehingga capaian indeks



profesionalitas ASN LPSP Sorong pada tahun 2022 telah tercapai 117,33% lebih besar dari target nilai posisi akhir pada dokumen Renstra 2020-2024.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi sumberdaya anggaran. Sumberdaya manusia (SDM) LPSP Sorong sebagian besar mengikuti Bimtek/Webinar/Workshop/Seminar/Diklat melalui daring sehingga tidak ada pengeluaran biaya perjalanan yang besar untuk meningkatkan kapasitas SDM LPSP Sorong.

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

1. Kualifikasi: tingkat Pendidikan ASN LPSP Sorong meningkat setiap tahunnya melalui tugas belajar maupun ijin belajar. Berdasarkan pemantauan pada pada laman <http://ropeg.kkp.go.id:4080/#/ip-asn/eselon> nilai kualifikasi LPSP Sorong pada tahun 2023 adalah 20,67.
2. Kompetensi: masing-masing ASN LPSP Sorong memiliki kompetensi beranekaragam yang didapatkan dari Bimtek/Webinar/Workshop/Seminar/Diklat. Kompetensi tersebut diakui dengan penerbitan sertifikat atas kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti dengan minimal pembelajaran 20 jam pembelajaran (JP). Berdasarkan pemantauan pada pada laman <http://ropeg.kkp.go.id:4080/#/ip-asn/eselon> nilai kompetensi LPSP Sorong pada tahun 2023 adalah 38,5.
3. Kinerja: pengisian sasaran kinerja pegawai (SKP) secara individu sudah menggunakan SKP online, sehingga sudah ada rincian target kinerja yang harus dicapai masing-masing individu dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pemantauan pada pada laman <http://ropeg.kkp.go.id:4080/#/ip-asn/eselon> nilai kinerja LPSP Sorong pada tahun 2023 adalah 25.
4. Disiplin: tingkat kehadiran individu telah di monitoring secara berkala oleh kepegawaian sehingga meningkatkan nilai pada indikator ini. Berdasarkan pemantauan pada pada laman <http://ropeg.kkp.go.id:4080/#/ip-asn/eselon> nilai disiplin LPSP Sorong pada tahun 2023 adalah 5.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Indeks IP ASN dapat dilihat pada <http://www.ropeg.kkp.go.id> dan dapat dimonitoring sewaktu-waktu tetapi laman web tersebut hanya bisa terupdate sehari setelah terdapat inputan data baru di e-pegawai, sehingga IP ASN masih harus bergantung dengan inputan dari e-pegawai. Apabila tidak ada input pembaruan data di e-pegawai maka tidak akan ada indeks IP ASN terupdate.

c. Solusi

Untuk mempercepat update data e-pegawai maka masing-masing pegawai mulai tahun 2023 sudah diinstruksikan untuk melakukan update dan monitoring mandiri IP ASN-nya berdasarkan tutorial maupun tautan pengisian sertifikat yang diberikan.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKM 10

Kegiatan pendukung pencapaian target IKM 10 yaitu telah dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melalui bimtek/diklat/workshop bagi para fungsional umum maupun fungsional tertentu pada tahun 2023. Sertifikat hasil bimtek/diklat/workshop di update pada laman e-pegawai KKP.



Gambar 3.38 Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Pegawai LPSPL Sorong.

7. Rencana Aksi Triwulan I TA 2024

Pada triwulan I tahun 2024, pegawai LPSPL Sorong secara mandiri maupun ditugaskan untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis/seminar/workshop. Serta melakukan penginputan sertifikat kompetensi pelatihan secara mandiri oleh masing-masing pegawai untuk mendukung IP ASN pada dimensi kompetensi. Bagian kepegawaian akan melakukan

monitoring secara berkala melalui WA grup bagi pegawai yang belum menginput data sertifikat pada e-pegawai. Masing-masing pegawai akan mulai mengupload Sertifikat Pelatihan Bimtek/Seminar/Workshop pada aplikasi e-pegawai KKP dan pengisian arsip sertifikat secara mandiri pada gdrive yang disiapkan oleh bagian kepegawaian. Bagian kepegawaian juga akan mengupdate terkait jenjang Pendidikan pegawai yang telah selesai melaksanakan tugas belajar. Kepegawaian LPSPL Sorong juga melakukan share informasi terkait kegiatan bimtek maupun seminar.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan sasaran tata kelola pemerintahan yang baik lingkup LPSPL Sorong IKM 10 indeks profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks) berasal dari layanan pengelolaan kinerja pegawai. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2023 yaitu Rp. 78.485.205 atau 98,11% dari total pagu Rp. 80.000.000 yang dapat dilihat pada tabel 3.51.

Tabel 3.51 Realisasi Anggaran IKM 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)

No.	IKM	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)	80.000.000	78.485.205	1.514.795	98,11%
a.	Layanan Pengelolaan Kinerja Pegawai	80.000.000	78.485.205	1.514.795	98,11%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

9. Rencana Penarikan Dana Triwulan IV TA. 2023

Merujuk pada Rencana Penarikan Dana (RPD) sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA LPSPL Sorong Nomor: SP DIPA-032.07.2.477440/2023 tanggal 27 Desember 2023 (Revisi ke-18) target dan realisasi anggaran bulanan untuk mendukung pencapaian IKM 10 indeks profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks) dapat dilihat pada tabel 3.52. Pada tabel tersebut dapat kita lihat bahwa target dan realisasi rencana penarikan dana pada triwulan IV telah sesuai.



Tabel 3.52 Rencana Penarikan Dana IKM 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSP Sorong (Indeks)

No.	IKM	Pagu (Rp)	2023		
			Triwulan IV		
			Okt	Nov	Des
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSP Sorong (Indeks)		80.000.000			
a.	Layanan Pengelolaan Kinerja Pegawai	Target	-	78.485.205	1.514.795
		Realisasi	-	78.485.205	-

Sumber Data: LPSP Sorong, per 31 Desember 2023

3.7.5 IKM 11 Nilai PM SAKIP lingkup LPSP Sorong (Nilai)

Nilai PM SAKIP Lingkup LPSP Sorong dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP diantaranya perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%).

Nilai PM SAKIP LPSP Sorong adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PRL. Kategori nilai PM SAKIP dapat dilihat pada tabel 3.53.

Tabel 3.53 Kategori Nilai PM SAKIP Tahun 2023.

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit



		kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 3.54 Capaian IKM 11 Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

SK.7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LPSPL Sorong									
IKM 11	Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai)									
Realisasi 2022	Tahun 2023				Tahun 2023		Renstra LPSPL Sorong 2020-2024			
2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2022	Target PK 2023	% Realisasi thd PK	Target s.d 2023	Realisasi s.d 2023	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2020-2024
-	75	82,70	110,27%	-	75	110,27%				

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023



1. **Capaian IKM Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai) Tahun 2023**

IKM nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong merupakan IKM Baru. Target kinerja yang ditetapkan sesuai perjanjian kinerja LPSPL Sorong tahun 2023 adalah 75, yang periode pelaporannya tahunan. Berdasarkan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut nomor: B.7124/DJPKRL.1/RC.610/XII/2023 perihal hasil penilaian mandiri evaluasi AKIP tahun 2023 lingkup DJPKRL, bahwa nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong tahun 2023 yaitu 82,70%. Pada tahun 2023 nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong tercapai 110,27% dari target kinerja yang ditetapkan.

2. **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022**

Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LPSPL Sorong dengan IKM Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong merupakan Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target baru. sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah**

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang ada pada tahun 2023, sehingga belum tercantum dalam dokumen Renstra 2020-2024 dan tidak dapat dibandingkan.

4. **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi sumberdaya anggaran. Sebagian kegiatan pendukung dalam progress pencapaian indikator kinerja ini dapat dilakukan secara daring (*online*) sehingga efisiensi pada belanja perjalanan dinas.

5. **Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi**

a. **Analisis Keberhasilan**

Keberhasilan diupayakan melalui kelengkapan dokumen dan setiap perubahan diikuti dengan perubahan dokumen perencanaan maupun dokumen monitoring evaluasi. Penyesuaian dokumen tersebut disesuaikan untuk menjamin akuntabilitas kinerja LPSPL Sorong.



b. Analisis Kegagalan/Kendala

Hasil evaluasi AKIP pada LPSPL Sorong nilainya dapat ditingkatkan jika seluruh pegawai yang tercantum pada surat tugas pengelolaan kinerja memiliki sertifikat bimbingan teknis pengelolaan kinerja.

c. Solusi

Pegawai yang belum memiliki sertifikat bimbingan teknis pengelolaan kinerja agar dapat diikuti dalam kegiatan bimbingan teknis.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKM 11

Evaluasi AKIP dilaksanakan pada 20-23 Juni 2023 di Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar. LPSPL Sorong yang menjadi salah satu UPT yang di evaluasi terkait implementasi AKIP nya. Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh evaluator internal yaitu Setditjen DJPRL yang didampingi oleh Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Evaluasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021.



Gambar 3.39 Dokumentasi Evaluasi AKIP.

Hasil evaluasi menunjukkan belum maksimalnya pada bagian-bagian berikut:

- Bagian perencanaan pada pertanyaan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan, hal ini disebabkan di lingkup DJPKRL terdapat beberapa IKU Baru dan IKU yang tidak digunakan kembali.



- Bagian evaluasi pada pertanyaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai, hal ini disebabkan karena terdapat anggota pengelola kinerja yang belum mengikuti bimbingan teknis pengelolaan AKIP.
- Bagian evaluasi pada pertanyaan Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal, hal ini disebabkan karena nilai rekonsiliasi menurun atau lebih kecil pada tahun 2022 daripada nilai pada tahun 2021.
- Bagian evaluasi pada pertanyaan Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, hal ini disebabkan karena turunnya capaian indikator kinerja pada tahun 2022 atau capaian lebih kecil daripada capaian tahun 2021.

7. Rencana Aksi Triwulan I TA 2024

Pada triwulan I tahun 2024 akan dilaksanakan verifikasi data capaian kinerja triwulan IV tahun 2023, penyusunan laporan kinerja triwulan IV tahun 2023, dan melakukan monitoring evaluasi bulanan.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LPSPL Sorong IKM 11 Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai) berasal dari laporan program dan kegiatan lingkup DJPRL. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2023 yaitu Rp. 113.476.680 atau 99,81% dari total pagu Rp. 113.696.000 dapat dilihat pada tabel 3.55.

Tabel 3.55 Realisasi Anggaran IKM 11 Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

No.	IKM	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	113.696.000	113.476.680	219.320	99,81%
a.	Laporan Program dan Kegiatan lingkup DJPRL	113.696.000	113.476.680	219.320	99,81%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023



9. Rencana Penarikan Dana Triwulan IV TA. 2023

Merujuk pada Rencana Penarikan Dana (RPD) sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA LPSPL Sorong Nomor: SP DIPA-032.07.2.477440/2023 tanggal 27 Desember 2023 (Revisi ke-18) target dan realisasi anggaran bulanan untuk mendukung pencapaian IKM 11 Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai) yang berasal dari laporan program dan kegiatan lingkup DJPRL dapat dilihat pada tabel 3.56. Pada tabel tersebut dapat kita lihat bahwa target dan realisasi rencana penarikan dana pada triwulan IV telah sesuai.

Tabel 3.56 Rencana Penarikan Dana IKM 11 Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

No.	IKM		Pagu (Rp)	2023		
				Triwulan IV		
				Okt	Nov	Des
Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai)			113.696.000			
a.	Laporan Program dan Kegiatan lingkup DJPRL	Target	113.696.000	26.328.700	10.100.733	25.302.460
		Realisasi		26.328.700	10.100.733	25.083.138

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

3.7.6 IKM 12 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan SPIP diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023.



Tabel 3.57 Capaian IKM 12 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)

SK.7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LPSPL Sorong									
IKM 12	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)									
Realisasi 2022	Tahun 2023				Tahun 2023		Renstra LPSPL Sorong 2020-2024			
2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2022	Target PK 2023	% Realisasi thd PK	Target s.d 2023	Realisasi s.d 2023	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2020-2024
4	4	4	100%	(=)	4	100%				

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

1. *Capaian IKM Laporan SPIP yang disusun Lingkup LPSPL Sorong (Dokumen) Tahun 2023*

Periode pencapaian target dan periode pelaporan capaian IKM ini adalah triwulanan, dengan target pada tahun 2023 yaitu 4 Dokumen. Indikator kinerja ini pada tahun 2023 telah tercapai 4 dokumen atau capaiannya 100% yaitu dokumen SPIP triwulan IV tahun 2022, SPIP triwulan I tahun 2023, SPIP triwulan II tahun 2023, dan SPIP triwulan III tahun 2023. Capaian ini telah disampaikan ke Direktur Jenderal PKRL dengan surat nomor: B.35/LPSPL.1/TU.140/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 (SPIP triwulan IV tahun 2022), surat nomor: B.263/LPSPL.1/TU.140/IV/2023 tanggal 14 April 2023 (SPIP triwulan I tahun 2023), surat nomor: B.404/LPSPL.1/TU.140/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 (SPIP triwulan II tahun 2023), dan surat nomor: B.4/LPSPL.1/TU.140/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 (SPIP triwulan III tahun 2023).

2. *Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022*

Periode pencapaian dan pelaporan indikator kinerja ini pada tahun 2022 dan 2023 yaitu triwulanan. Target indikator kinerja ini pada tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu 4 dokumen. Capaian pada tahun 2022 yaitu 4 dokumen atau 100% sama dengan capaian pada tahun 2023.

3. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah*

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang baru ada pada tahun 2022 dan belum tercantum dalam dokumen Renstra 2020-2024, sehingga tidak dapat dibandingkan.



4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi anggaran. Adanya dokumen SPIP ini memudahkan pengendalian secara terpadu terhadap semua kegiatan lingkup LPSPS Sorong yang dilakukan melalui sistem pengendalian yang sudah ada standardisasinya, tanpa perlu langsung ke lapangan maupun penugasan dengan penganggaran. Efisiensi anggaran terjadi karena dalam pencapaian indikator kinerja ini dapat dilakukan secara daring (*online*).

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

LPSPS Sorong melakukan penyusunan laporan SPIP secara rutin bulanan dan triwulanan sehingga selalu tersedia data dan informasi pengendalian terupdate. Selain itu pemenuhan dokumen SPIP terupdate didukung adanya kerjasama dari SDM sesuai tugasnya masing-masing.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tidak ada kendala pada pencapaian target indikator ini, kegagalan mencapai target dapat terjadi apabila tidak ada kerjasama dan komitmen SDM untuk selalu menyediakan data dan informasi organisasi terupdate untuk kebutuhan pengendalian.

c. Solusi

Untuk menghindari kegagalan dalam menyusun dokumen SPIP, maka diperlukan koordinasi dan kerjasama dari beberapa pegawai yang memiliki tugas terkait penyusunan dokumen SPIP.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKM 14

Pada triwulan IV telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini diantaranya pembahasan hasil evaluasi implementasi manajemen risiko (MR) dan asistensi penyusunan MR tahun 2024, pembahasan form pemantauan pengendalian dengan manajemen risiko (MR) periode tahun 2024, dan pemantauan manajemen risiko (MR) periode tahun 2024 lingkup DJPKRL.





Gambar 3.40 Kegiatan Pendukung Penyelenggaraan SPIP Triwulan IV Tahun 2023.

7. Rencana Aksi Triwulan I TA 2024

Pada triwulan I tahun 2024 akan dilakukan penyusunan SPIP triwulan I tahun 2024 dan SPIP rutin bulanan.

8. Realisasi Anggaran

Tidak ada pagu anggaran dalam mendukung capaian indikator kinerja laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen), yang dapat dilihat pada tabel 3.58.

Tabel 3.58 Realisasi Anggaran IKM 12 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)

No.	IKM	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)	-	-	-	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

9. Rencana Penarikan Dana Triwulan IV TA. 2023

Tidak terdapat anggaran yang melekat untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini, sehingga tidak terdapat perencanaan dalam penarikan dana.



3.7.7 IKM 13 Persentase Unit Kerja Lingkup LPSPS Sorong yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan. Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian pada komponen keaktifan (100%) pada aplikasi *Collaboration Office*. Untuk satuan kerja level 2 di pusat pegawai yang wajib dinilai yaitu eselon II dan ketua tim kerja, sedangkan untuk level II unit pelaksana teknis (UPT) sementara yang dinilai yaitu kepala UPT.

Teknik menghitung capaian IKM ini yaitu sebagai berikut:

1. Komponen 1 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur capaian kinerja berdasarkan sistem Manajemen Pengetahuan Level 2 ini, yaitu:
 - a. Keaktifan (bobot 100%): Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi target minimal mendapatkan 3 poin dan poin maksimal yang dapat diterima adalah 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.
2. Pembobotan yang dimaksud adalah:
 - a. Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan poin 0,5;
 - b. Konten berupa infografis dengan poin 1;
 - c. Konten video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan poin 3.
3. Cara mengukur kinerja ini:
 - a. Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (*portal Collaboration Office*)
 - b. Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian:
 - Keaktifan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan;
 - Perhitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan;
 - Pengukuran level II dihitung dari keaktifan Eselon II;



- Setditjen PKRL menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon II.

Tabel 3.59 Capaian IKM 13 Persentase Unit Kerja Lingkup LPSPL Sorong yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

SK.7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LPSPL Sorong									
IKM 13	Persentase Unit Kerja Lingkup LPSPL Sorong yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)									
Realisasi 2022	Tahun 2023				Tahun 2023		Renstra LPSPL Sorong 2020-2024			
2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2022	Target PK 2023	% Realisasi thd PK	Target s.d 2023	Realisasi s.d 2023	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2020-2024
100	92	133,3	120%	(+33,3%)	92	120%	88	133,3	90	120%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

1. *Capaian IKM Persentase Unit Kerja Lingkup LPSPL Sorong yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%) Tahun 2023*

Periode pencapaian target dan periode pelaporan capaian IKM 13 adalah triwulan dengan perhitungan akhir capaian merupakan nilai rata-rata. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal PKRL nomor: B.59/DJPKRL.1/TU.210/I/2024 perihal penyampaian capaian presentase satuan kerja UPT lingkup DJPKRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar triwulan IV tahun 2023 bahwa capaian LPSPL Sorong pada triwulan IV tahun 2023 yaitu 133,3 atau 120% dari target triwulan IV tahun 2023.

2. *Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022*

Periode pencapaian dan pelaporan indikator kinerja ini pada tahun 2022 dan 2023 yaitu triwulanan. Target indikator kinerja ini pada tahun 2022 yaitu 86 sedangkan pada tahun 2023 yaitu 92. Capaian pada tahun 2022 yaitu 100% sedangkan capaian pada tahun 2023 yaitu 133,3%, sehingga capaian tahun 2023 lebih tinggi dari capaian tahun 2022. Peningkatan capaian kinerja pada indikator ini karena adanya perubahan cara hitung pada manual indikator kinerja.



3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah**

Realisasi kinerja IK Persentase Unit Kerja Lingkup LPSPL Sorong yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar pada tahun 2023 yaitu 133,3% sedangkan target nilai posisi akhir dalam dokumen Renstra 2020-2024 adalah 90% sehingga capaian pada tahun 2023 sudah tercapai 120% atau lebih besar dari target nilai posisi akhir pada dokumen Renstra 2020-2024.

4. **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi sumberdaya anggaran. Penyampaian informasi kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja di daerah maupun di pusat dapat diketahui secara singkat melalui aplikasi *Collaboration Office*, cukup mengandalkan gadget atau laptop yang tersambung dengan koneksi internet.

5. **Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi**

a. **Analisis Keberhasilan.**

Keaktifan Kepala LPSPL Sorong yang telah memposting berbagi pengetahuan/informasi berupa hasil kegiatan di laman aplikasi *collaboration office* sekurang-kurangnya 6 kali per triwulan dengan memenuhi kriteria 5W1H.

b. **Analisis Kegagalan/Kendala**

Kegagalan pencapaian target terjadi apabila Kepala LPSPL Sorong belum memenuhi target minimal dalam memposting berita di laman aplikasi *collaboration office*.

c. **Solusi**

Dalam rangka mengantisipasi kegagalan, mengantisipasi capaian tidak maksimal atau tidak sesuai target dengan cara memonitoring setiap bulan jumlah postingan dari Kepala LPSPL Sorong di setiap bulannya, sehingga apabila ada kurang posting dapat segera diatasi pada bulan tersebut.

6. **Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKM 13**

LPSPL Sorong selalu melakukan pemantauan terhadap postingan Kepala LPSPL Sorong pada laman aplikasi *collaboration office* serta melakukan rekapitulasi postingan setiap triwulan. Pada tabel 3.60 dapat kita lihat bahwa kepala LPSPL Sorong aktif melakukan update pada setiap bulan sehingga realisasi indikator kinerja ini maksimal.



Tabel 3.60 Keaktifan Pejabat LPSPL Sorong Posting pada laman aplikasi *collaboration office*.

Pejabat	Oktober	November	Desember	Total
Kepala LPSPL Sorong	3	6	2	11

7. Rencana Aksi Triwulan I TA 2024

Pada triwulan I tahun 2024, Kepala LPSPL Sorong mengupload minimal 2 postingan setiap bulannya pada laman aplikasi *collaboration office* serta operator *collaboration office* LPSPL Sorong melakukan rekapitulasi postingan pada laman *collaboration office* sebagai dasar monitoring capaian IKM 13 pada triwulan I TA 2024.

8. Realisasi Anggaran

Tidak ada pagu anggaran dalam mendukung capaian indikator kinerja persentase unit kerja lingkup LPSPL Sorong yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%), yang dapat dilihat pada tabel 3.61.

Tabel 3.61 Realisasi Anggaran IKM 13 Persentase Unit Kerja Lingkup LPSPL Sorong yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

No.	IKM	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Persentase Unit Kerja Lingkup LPSPL Sorong yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	-	-	-	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

9. Rencana Penarikan Dana Triwulan IV TA. 2023

Tidak terdapat anggaran yang melekat untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini, sehingga tidak terdapat perencanaan dalam penarikan dana.



3.7.8 IKM 14 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup LPSPL Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup LPSPL Sorong merupakan rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 75% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode 1 Oktober 2022 s.d. 31 Desember 2023 atau Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS).

Teknik menghitung capaian IKM ini dengan cara persentase dari jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti LPSPL Sorong dibagi dengan Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada LPSPL Sorong. Dengan catatan sebagai berikut:

1. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun rekomendasi tidak masuk dalam sidak maka tindak lanjut rekomendasi dihitung secara manual oleh Setditjen PRL;
2. Jika tidak ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian sama dengan nilai target;
3. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan capaian 100 sehingga capaian pada kinerjaku 120%.

Tabel 3.62 Capaian IKM 14 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup LPSPL Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

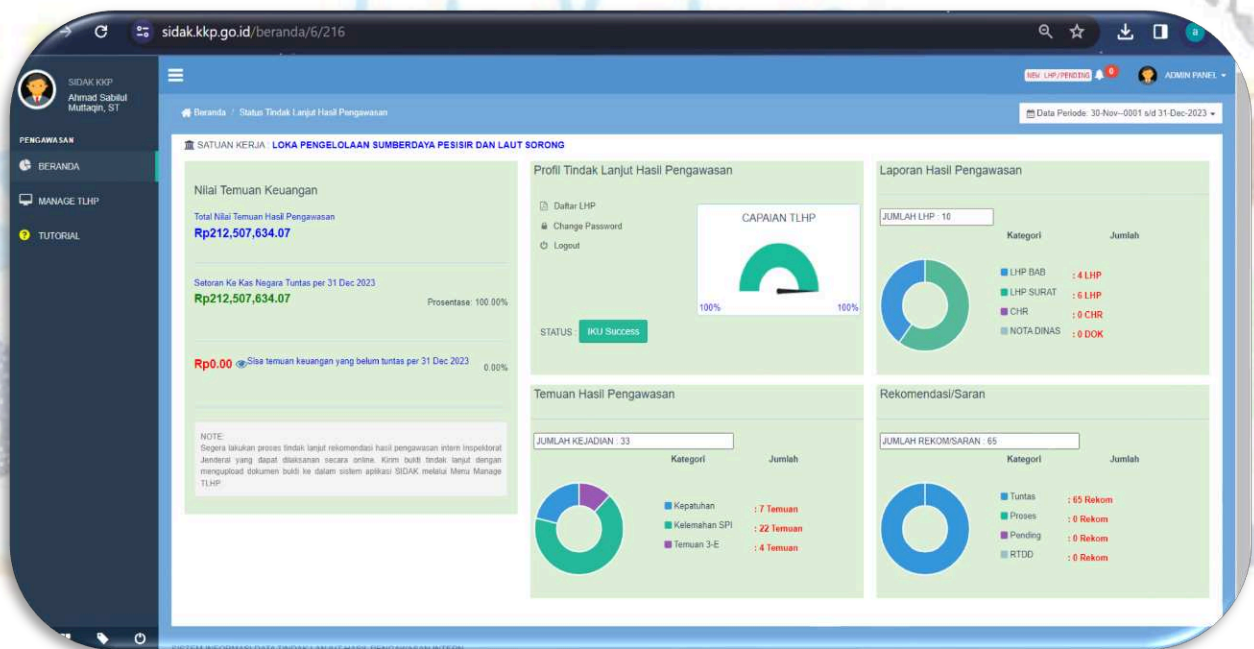
SK.7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LPSPL Sorong									
IKM 14	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup LPSPL Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)									
Realisasi 2022	Tahun 2023				Tahun 2023		Renstra LPSPL Sorong 2020-2024			
2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2022	Target PK 2023	% Realisasi thd PK	Target s.d 2023	Realisasi s.d 2023	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2020-2024
100	75	100	120%	(=)	75	120%	65	100	65	120%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023



1. **Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup LPSP Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%) Tahun 2023**

Periode pencapaian target dan periode pelaporan capaian IKM 14 adalah triwulan dengan perhitungan akhir capaian merupakan nilai posisi akhir. Berdasarkan laman SIDAK yang dibawah naungan Inspektorat Jenderal KKP (<http://sidak.kkp.go.id/hasil-pengawasan/6/216>) dan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut nomor: B.317/DJPKRL.1/HP.470/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 perihal capaian indikator kinerja persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PKRL triwulan IV tahun 2023, LPSP Sorong telah menindaklanjuti 23 dari 23 rekomendasi sehingga capaian IKM persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup LPSP Sorong yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) Triwulan IV Tahun 2023 adalah 100%.



Gambar 3.41 Screenshot aplikasi SIDAK per 31 Desember 2023.

2. **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022**

Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup LPSP Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan pada tahun 2023 yaitu 100% dari target 75%. Sedangkan capaian kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup LPSP Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan



Disampaikan pada tahun 2022 yaitu 100% dari target 70%. Sehingga capaian kinerja pada tahun 2023 sama dengan capaian pada tahun 2022.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong pada tahun 2023 yaitu 100% sedangkan target nilai posisi akhir pada dokumen Renstra 2020-2024 adalah 65% sehingga capaian pada tahun 2023 telah tercapai 120% lebih besar dari target nilai posisi akhir pada dokumen Renstra 2020-2024.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran terjadi karena penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan secara online pada laman sidak.go.id dan koordinasi dilakukan secara daring dengan aplikasi penunjang.

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

LPSPL Sorong selalu memonitoring secara rutin/berkala semua rekomendasi yang dikeluarkan oleh Itjen sehingga selalu ada progress tindaklanjut pada aplikasi SIDAK. Setiap pegawai yang terkait dengan rekomendasi yang dikeluarkan tersebut memiliki tanggungjawab masing-masing dengan fungsi kontrol dari Kepala LPSPL Sorong.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tidak ada kendala pada pencapaian target indikator ini, kegagalan mencapai target dapat terjadi apabila tidak ada koordinasi dan komitmen organisasi untuk memperbaiki kinerja organisasi berdasarkan rekomendasi yang telah ada.

c. Solusi

Belum terdapat solusi yang dilakukan karena tidak ada kendala yang menyebabkan kegagalan. Untuk mengantisipasi atau meminimalisir kegagalan agar dilakukan koordinasi antar pegawai dalam menyelesaikan rekomendasi yang ada.



6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKM 16

Pada triwulan IV, LPSPL Sorong melakukan tindaklanjut terhadap hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 dari Inpektorat Jenderal dengan nomor lembar hasil pemeriksaan (LHP) nomor T.437/ITJ.3/HP.430/IX/2023.

7. Rencana Aksi Triwulan I TA 2024

Pada triwulan I tahun 2024, LPSPL Sorong melakukan monitoring aplikasi SIDAK secara berkala, serta akan menindaklanjuti jika terdapat rekomendasi yang terbit pada triwulan IV tahun 2023.

8. Realisasi Anggaran

Tidak ada pagu anggaran dalam mendukung capaian indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup LPSPL Sorong yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%), yang dapat dilihat pada tabel 3.63.

Tabel 3.63 Realisasi Anggaran IKM 14 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup LPSPL Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

No.	IKM	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup LPSPL Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	-	-	-	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

9. Rencana Penarikan Dana Triwulan IV TA. 2023

Tidak terdapat anggaran yang melekat untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini, sehingga tidak terdapat perencanaan dalam penarikan dana.

3.7.9 IKM 15 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LPSPL Sorong (%)

Temuan LHP BPK LPSPL Sorong yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK LPSPL Sorong Tahun 2022. Teknik menghitung capaian IKM ini dengan cara persentase dari Jumlah Temuan LHP BPK LPSPL



Sorong yang diselesaikan dibagi dengan Jumlah temuan dalam LHP BPK LPSPL Sorong. Dengan catatan bahwa jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan **capaian adalah sama dengan target**.

Tabel 3.64 Capaian IKM 15 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LPSPL Sorong (%)

SK.7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LPSPL Sorong									
IKM 15	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LPSPL Sorong (%)									
Realisasi 2022	Tahun 2023				Tahun 2023		Renstra LPSPL Sorong 2020-2024			
2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2022	Target PK 2023	% Realisasi thd PK	Target s.d 2023	Realisasi s.d 2023	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2020-2024
100	100	100	100%	(=)	100	100%	100	100	100	100%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

1. *Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LPSPL Sorong (%) Tahun 2022*

Periode pencapaian target dan periode pelaporan capaian IKM ini adalah tahunan dengan target adalah 100. Pada tahun 2023, LPSPL Sorong telah telah menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan BPK RI dengan melakukan koreksi pencatatan pada aset BMN. Tindaklanjut tersebut telah disampaikan melalui Surat Keterangan Nomor B.129/LPSPL.1/PRL/PL.920/IV/2022 Tanggal 04 April 2022. Sehingga capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LPSPL Sorong pada tahun 2023 yaitu 100%. Hal ini sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor: B.592/DJPKRL.1/HP.520/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 perihal penyampaian penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas LK KKP Tahun 2022 lingkup UPT Ditjen PKRL bahwa LPSPL Sorong tidak terdapat sisa temuan atau tuntas.

2. *Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022*

Capaian persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup LPSPL Sorong pada tahun 2023 dan 2022 yaitu 100%. Sehingga capaian persentase penyelesaian temuan lingkup LPSPL Sorong sama antara tahun 2023 dengan 2022.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup LPSPL Sorong pada tahun 2023 yaitu 100%, sedangkan target nilai posisi akhir dalam dokumen Renstra 2020-2024 adalah 100%. Sehingga capaian persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup LPSPL Sorong pada tahun 2023 telah tercapai 100% dari target nilai posisi akhir pada dokumen Renstra 2020-2024.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi sumberdaya manusia. LPSPL Sorong memiliki pengelola keuangan (PPK, PBJ, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan) dan bmn yang kompeten dan bersertifikat.

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

LPSPL Sorong segera menindaklanjuti permintaan dokumen dan menyelesaikan temuan dari BPK. Segala tindaklanjut yang dilaksanakan LPSPL Sorong disampaikan secara resmi dan berjenjang.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Pada tahun 2023 belum terdapat kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini, namun kegagalan mencapai target dapat terjadi apabila organisasi tidak kooperatif menindaklanjuti temuan BPK.

c. Solusi

Belum terdapat solusi karena tidak terdapat kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKM 15

LPSPL Sorong melakukan koordinasi terkait penyelesaian temuan BPK RI, hasil pengawasan APIP, dan kerugian negara lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.



7. Rencana Aksi Triwulan I TA 2024

Pada triwulan I LPSPL Sorong melakukan reuiu internal atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran, serta memperbaiki dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan.

8. Realisasi Anggaran

Tidak ada pagu anggaran dalam mendukung capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian temuan LHP BPK Lingkup LPSPL Sorong (%), yang dapat dilihat pada tabel 3.65.

Tabel 3.65 Realisasi Anggaran IKM 15 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LPSPL Sorong (%)

No.	IKM	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LPSPL Sorong (%)	-	-	-	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

9. Rencana Penarikan Dana Triwulan IV TA. 2023

Tidak terdapat anggaran yang melekat untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini, sehingga tidak terdapat perencanaan dalam penarikan dana.

3.7.10 IKM 16 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%)

Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah adalah suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain:

- memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
- memiliki anggaran besar;
- mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
- mendukung pencapaian prioritas nasional;
- merupakan arahan direktif presiden; dan/atau



f. pertimbangan lainnya.

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan fokus pengukuran pemanfaatannya dan jenis bantuan yang akan dinilai tingkat efektivitasnya adalah Bantuan KOMPAK.

Teknik menghitung capaian IK ini yaitu sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Keterangan:

- PT = Pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target
- IG = Integrasi yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah
- AT = Adaptasi yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikanan.

Tabel 3.66 Capaian IKM 16 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%)

SK.7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LPSPL Sorong									
IKM 16	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%)									
Realisasi 2022	Tahun 2023				Tahun 2023		Renstra LPSPL Sorong 2020-2024			
2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2022	Target PK 2023	% Realisasi thd PK	Target s.d 2023	Realisasi s.d 2023	Target s.d 2024	% Capaian thd Renstra 2020-2024
92,5	77,5	100	120%	(+7,5)	77,5	120%	77,5	100	80	120%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

1. Capaian IKM Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%) Tahun 2023

Periode pencapaian target dan periode pelaporan capaian IK Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup LPSPL Sorong (%) adalah tahunan dengan target 77,5%. Berdasarkan memorandum Sekretaris Jenderal Pengelolaan Ruang



Laut nomor: 3027/DJPKRL.1/HP.410/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 bahwa hasil penilaian efektivitas pemanfaatan bantuan pemerintah lingkup LPSP Sorong yaitu 100%. Nilai ini diperoleh dari hasil penilaian efektivitas pemanfaatan bantuan pemerintah pada kelompok Poster Halmahera Dive dan POKMASWAS Hena Berkarya.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

Capaian tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup LPSP Sorong tahun 2023 yaitu 100% dari target 77,5%. Persentase 100% pada tahun 2023 didapat dari rata-rata dari hasil penilaian efektivitas pemanfaatan bantuan pemerintah di Lingkup DJPKRL Tahun 2022 yang meliputi efektivitas bantuan konservasi pada kelompok Poster Halmahera Dive dengan persentase efektivitas sebesar 100% dan efektivitas bantuan konservasi pada kelompok POKMASWAS Hena Berkarya dengan persentase efektivitas sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2022, capaian tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup LPSP yaitu 92,5% dari target 75%. Persentase 92,5% pada tahun 2022 didapat dari rata-rata dari hasil penilaian efektivitas pemanfaatan bantuan pemerintah di Lingkup DJPRL Tahun 2021 yang meliputi efektivitas bantuan konservasi pada kelompok POKMASWAS Lawere dengan persentase efektivitas sebesar 100%, efektivitas bantuan konservasi pada kelompok POKMASWAS Tafamutu dengan persentase efektivitas sebesar 85%, efektivitas bantuan konservasi pada Kelompok Sadar Konservasi Penyu Makimi dengan persentase efektivitas sebesar 85%, dan efektivitas bantuan konservasi pada kelompok POKMASWAS Knasaimos dengan persentase efektivitas sebesar 100%. Sehingga capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 lebih besar daripada tahun 2022.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup LPSP Sorong pada tahun 2023 yaitu 100%, sedangkan target nilai posisi akhir dalam dokumen Renstra 2020-2024 adalah 80%. Sehingga capaian indikator kinerja tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup LPSP Sorong telah tercapai 120% lebih besar dari target nilai posisi akhir pada dokumen Renstra 2020-2024.



4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah efisiensi anggaran. Pencapaian IKM ini terakomodir melalui pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi bantuan pemerintah yang dilakukan terhadap bantuan pemerintah yang diberikan pada 2 (dua) tahun sebelum periode pengukuran, 1 (satu) tahun sebelum periode pengukuran, dan yang diberikan pada tahun yang sama dengan periode pengukuran. Selain itu, LPSPL Sorong memiliki satuan kerja di 4 Provinsi sehingga memperkecil anggaran yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan ini. Dalam berkoordinasi dan melakukan monitoring evaluasi kepada kelompok penerima bantuan ada yang dilakukan secara daring (*online*).

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

LPSPL Sorong melakukan koordinasi dengan kelompok penerima bantuan, mitra kerja pemerintah daerah dan mitra kerja konservasi di wilayah kerja. Koordinasi dilakukan dari mulai identifikasi kelompok calon penerima bantuan, verifikasi dokumen kelompok calon penerima bantuan sampai dengan selesainya penyerahan bantuan kepada kelompok penerima bantuan. Selain koordinasi juga dilakukan pendampingan terhadap kelompok yang telah menerima bantuan, baik secara tatap muka, telepon ataupun melalui pihak pemda terkait.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Pada tahun 2023 belum terdapat kendala dalam mencapai target indikator kinerja ini.

c. Solusi

Belum terdapat solusi yang dilakukan karena tidak ada kendala pencapaian indikator tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup LPSPL Sorong.

6. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKM 16

Pada tahun 2023 LPSPL Sorong telah mempersiapkan dokumen terkait bantuan pemerintah TA 2021 hingga TA 2023 dalam rangka pelaksanaan pengukuran indikator kinerja ini. Dokumen yang dipersiapkan, yaitu Proposal Usulan dan Verifikasi, SK Penetapan Penerima Bantuan, BAST Pemberi dan Penerima, Dokumentasi Kegiatan, Laporan Penerima Bantuan kepada Pemberi Bantuan, Laporan Pemberi Bantuan, Laporan



Monev dan SPK. Selain itu, LPSP Sorong juga melakukan penilaian mandiri kepada kelompok penerima bantuan tahun 2021 hingga tahun 2023.

a. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Tafamutu (2021)

Kelompok ini mendapatkan bantuan pemerintah pada tahun 2021 dengan BAST Nomor: BA.002/LPSP.1/PRL/PL.430/VI/2021. Kegiatan yang dilakukan dalam pemanfaatan bantuan yaitu untuk monitoring kawasan konservasi dan respon cepat penanganan biota laut dilindungi yang terdampar mati dan digunakan sebagai sarana sosialisasi dan pertemuan dalam penilaian EVIKA. Pasca penyerahan Bantuan Pemerintah KOMPAK pada tahun 2021, LPSP Sorong telah melaksanakan pembinaan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi secara rutin kepada Pokmaswas Tafamutu. Pada tahun 2022 nilai efektifitas pada kelompok ini yaitu 85 dengan rincian nilai pencapaian tujuan dengan skor rata-rata 65 dari target skor rata-rata 80, nilai integrasi dengan skor rata-rata 10 dari target rata-rata 10, nilai adaptasi dengan skor rata-rata 10 dari target rata-rata 10.



Gambar 3.42 Monitoring Evaluasi pada Pokmaswas Tafamutu

Sedangkan pada tahun 2023, hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh LPSP Sorong kepada Pokmaswas Tafamutu terjadi peningkatan dibanding hasil penilaian KKE tahun 2022, hal ini dipengaruhi dengan adanya tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan oleh LPSP Sorong dalam monitoring dan evaluasi tahun 2022 atas unsur Pencapaian Tujuan berupa kerusakan 1 unit laptop tersebut ditemukan telah diperbaiki/service dan dimanfaatkan oleh kelompok. Pada tahun 2023 nilai efektifitas



pada kelompok ini yaitu 100 dengan rincian nilai pencapaian tujuan dengan skor rata-rata 80 dari target skor rata-rata 80, nilai integrasi dengan skor rata-rata 10 dari target rata-rata 10, nilai adaptasi dengan skor rata-rata 10 dari target rata-rata 10.

b. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Pulau Ay (2021)

Kelompok ini mendapatkan bantuan pemerintah pada tahun 2021 dengan BAST Nomor: BA.001/LPSPL.1/PRL/PL.430/VI/2021. Kegiatan yang dilakukan dalam pemanfaatan bantuan yaitu untuk menunjang patroli di kawasan konservasi Pulau Ay serta digunakan sebagai sarana untuk pembersihan sampah di pantai dan laut. Nilai efektifitas pada kelompok ini yaitu 100 dengan rincian nilai pencapaian tujuan dengan skor rata-rata 80 dari target skor rata-rata 80, nilai integrasi dengan skor rata-rata 10 dari target rata-rata 10, nilai adaptasi dengan skor rata-rata 10 dari target rata-rata 10. Pada tahun 2023, hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh LPSPL Sorong kepada Pokmaswas Ay yaitu sama dengan hasil penilaian pada tahun 2022 pada skor maksimum 100.



Gambar 3.43 Monitoring Evaluasi pada Pokmaswas Pulau Ay.

c. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Knasaimos (2021)

Kelompok ini mendapatkan bantuan pemerintah pada tahun 2021 dengan BAST Nomor: BA.004/LPSPL.1/PRL/PL.430/VIII/2021. Kegiatan yang dilakukan dalam pemanfaatan bantuan yaitu untuk pengawasan pada kawasan konservasi Seribu Satu Sungai Teonebikia serta digunakan sebagai alat transportasi. Nilai efektifitas pada kelompok ini yaitu 100 dengan rincian nilai pencapaian tujuan dengan skor rata-rata

80 dari target skor rata-rata 80, nilai integrasi dengan skor rata-rata 10 dari target rata-rata 10, nilai adaptasi dengan skor rata-rata 10 dari target rata-rata 10. Pada tahun 2023, hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh LPSPL Sorong kepada Pokmaswas Knasaimos yaitu sama dengan hasil penilaian pada tahun 2022 pada skor maksimum 100.



Gambar 3.44 Monitoring Evaluasi pada Pokmaswas Knasaimos.

d. Kelompok Masyarakat Sadar Konservasi Penyu (POKDAR) Makimi (2021)

Kelompok ini mendapatkan bantuan pemerintah pada tahun 2021 dengan BAST Nomor: BA.003/LPSPL.1/PRL/PL.430/VII/2021. Kegiatan yang dilakukan dalam pemanfaatan bantuan yaitu untuk menunjang kegiatan konservasi penyu yang melakukan aktifitas peneluran di sepanjang Pantai Makimi serta digunakan sebagai alat mencari ikan dan transportasi. Nilai efektifitas pada kelompok ini yaitu 85 dengan rincian nilai pencapaian tujuan dengan skor rata-rata 65 dari target skor rata-rata 80, nilai integrasi dengan skor rata-rata 10 dari target rata-rata 10, nilai adaptasi dengan skor rata-rata 10 dari target rata-rata 10.



Gambar 3.45 Monitoring Evaluasi Pokdar Makimi.



Sedangkan pada tahun 2023, hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh LPSPL Sorong kepada Pokdar Makimi terjadi peningkatan dibanding hasil penilaian KKE tahun 2022, hal ini dipengaruhi dengan adanya tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan oleh LPSPL Sorong dalam monitoring dan evaluasi tahun 2022 atas unsur Pencapaian Tujuan berupa kelompok telah berupaya melakukan pencatatan hasil ekonomi dari pemanfaatan bantuan KOMPAK serta menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan KOMPAK sesuai ketentuan. Pada tahun 2023 nilai efektifitas pada kelompok ini yaitu 100 dengan rincian nilai pencapaian tujuan dengan skor rata-rata 80 dari target skor rata-rata 80, nilai integrasi dengan skor rata-rata 10 dari target rata-rata 10, nilai adaptasi dengan skor rata-rata 10 dari target rata-rata 10.

e. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Hena Berkarya (2022)

Kelompok ini mendapatkan bantuan pemerintah pada tahun 2022 dengan BAST Nomor: 01/LPSPL.1/PRL/PL.430/VI/2022. Kegiatan yang dilakukan dalam pemanfaatan bantuan yaitu untuk mengawasi kelestarian potensi sumberdaya alam yang ada di wilayah perairan Desa Buano. Hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh LPSPL Sorong secara online kepada Pokmaswas Hena Berkarya yaitu nilai efektifitas pada kelompok ini 100 dengan rincian nilai pencapaian tujuan dengan skor rata-rata 80 dari target skor rata-rata 80, nilai integrasi dengan skor rata-rata 10 dari target rata-rata 10, nilai adaptasi dengan skor rata-rata 10 dari target rata-rata 10.

f. Kelompok Poster Halmahera Dive (2022)

Kelompok ini mendapatkan bantuan pemerintah pada tahun 2022 dengan BAST Nomor: 02/LPSPL.1/PRL/PL.430/VI/2022. Kegiatan yang dilakukan dalam pemanfaatan bantuan yaitu penanaman karang serta sosialisasi tentang lingkungan laut di wilayah Desa Guaeria dan seputaran Teluk Jailolo. Hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh LPSPL Sorong secara online kepada kelompok Poster Halmahera Dive yaitu nilai efektifitas pada kelompok ini 100 dengan rincian nilai pencapaian tujuan dengan skor rata-rata 80 dari target skor rata-rata 80, nilai integrasi dengan skor rata-rata 10 dari target rata-rata 10, nilai adaptasi dengan skor rata-rata 10 dari target rata-rata 10.



g. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Nusa Matan (2023)

Kelompok ini mendapatkan bantuan pemerintah pada tahun 2023 dengan BAST Nomor: BA.001/LPSPL.1/PRL.440/VI/2023. Kegiatan yang dilakukan dalam pemanfaatan bantuan yaitu kegiatan sosialisasi tentang konservasi dan biota laut dilindungi serta pendataan hasil tangkapan nelayan dalam Kawasan Konservasi. Hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh LPSPL Sorong secara online kepada Pokmaswas Nusa Matan yaitu nilai efektifitas pada kelompok ini 100 dengan rincian nilai pencapaian tujuan dengan skor rata-rata 80 dari target skor rata-rata 80, nilai integrasi dengan skor rata-rata 10 dari target rata-rata 10, nilai adaptasi dengan skor rata-rata 10 dari target rata-rata 10.

h. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sugiraja Watulu (2023)

Kelompok ini mendapatkan bantuan pemerintah pada tahun 2023 dengan BAST Nomor: BA.002/LPSPL.1/PRL.440/VI/2023. Kegiatan yang dilakukan dalam pemanfaatan bantuan yaitu menjaga dan melestarikan ekosistem laut yang ada diperairan Kecamatan Fena Leisela, khususnya untuk pantai peneluran penyu dan jenis biota laut lainnya yang terancam punah, serta pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan, agar nelayan tidak lagi menggunakan metode/alat tangkap destruktif yang dapat merusak ekosistem laut. Hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh LPSPL Sorong secara online kepada Pokmaswas Sugiraja Watulu yaitu nilai efektifitas pada kelompok ini 97,44.

i. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Tanjung Ngolopopo (2023)

Kelompok ini mendapatkan bantuan pemerintah pada tahun 2023 dengan BAST Nomor: BA.003/LPSPL.1/PRL.440/VI/2023. Kegiatan yang dilakukan dalam pemanfaatan bantuan yaitu melakukan monitoring pesisir dan pulau-pulau serta sosialisasi tentang lingkungan laut. Hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh LPSPL Sorong secara online kepada Pokmaswas Tanjung Ngolopopo yaitu nilai efektifitas pada kelompok ini 79,5.



7. Rencana Aksi Triwulan I TA 2024

Pada triwulan I tahun 2024 akan melakukan perencanaan terhadap monitoring dan evaluasi terhadap kelompok penerima bantuan KOMPAK tahun 2023 (3 kelompok).

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup LPSPL Sorong dengan IKM 16 tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%) berasal dari monev bantuan KOMPAK. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2023 yaitu Rp. 53.091.021 atau 99,97% dari total pagu Rp. 53.108.000 yang dapat dilihat pada tabel 3.67.

Tabel 3.67 Realisasi Anggaran IKM 16 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%)

No.	IK	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%)	53.108.000	53.091.021	16.979	99,97%
a.	MONEV Bantuan KOMPAK 2021 2022	53.108.000	53.091.021	16.979	99,97%

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

9. Rencana Penarikan Dana Triwulan IV TA. 2023

Merujuk pada Rencana Penarikan Dana (RPD) sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA LPSPL Sorong Nomor: SP DIPA-032.07.2.477440/2023 tanggal 27 Desember 2023 (Revisi ke-18) target dan realisasi anggaran bulanan untuk mendukung pencapaian IKM 16 tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%) dapat dilihat pada tabel 3.68.

Tabel 3.68 Rencana Penarikan Dana IKM 16 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%)

No.	IKM	Pagu (Rp)	2023		
			Triwulan IV		
			Okt	Nov	Des
	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%)	53.108.000			

a.	MONEV Bantuan KOMPAK 2021 2022	Target	53.108.000	-	12.000.000	-
		Realisasi		-	-	11.985.162

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Desember 2023

3.8 Akuntabilitas Anggaran

Dalam rangka mendukung kinerja LPSPL Sorong pada tahun anggaran 2023, anggaran yang diberikan Rp. 12.053.366.000 sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja tanggal 9 Januari 2023. Hal ini juga sesuai dengan DIPA Petikan pagu definitif (pagu awal) tahun 2023 dengan Nomor: SP DIPA-032.07.2.477440/2023 tanggal 30 November 2022. Anggaran tersebut mendukung 3 (tiga) program yaitu program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp. 3.275.000.000, program pengelolaan perikanan dan kelautan sebesar Rp. 840.000.000, dan program dukungan manajemen internal lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp. 7.938.366.000. Jika dijabarkan 3 program tersebut menjadi 5 kegiatan yaitu kegiatan perencanaan ruang laut sebesar Rp. 800.000.000, kegiatan perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut sebesar Rp. 2.775.000.000, kegiatan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau - pulau kecil sebesar Rp. 500.000.000, kegiatan pendayagunaan pesisir dan pulau - pulau kecil sebesar Rp. 40.000.000, dan kegiatan dukungan manajemen internal lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp. 7.938.366.000.

Namun anggaran tersebut tidak bisa dicairkan secara keseluruhan, hal ini dijabarkan pada halaman IV A DIPA Petikan terkait blokir. Jumlah anggaran yang tidak dapat dicairkan yaitu Rp. 1.965.000.000 yang terdiri dari belanja barang (52) sebesar Rp. 1.630.000.000 dan belanja modal (53) sebesar Rp. 335.000.000. Jika dijabarkan lebih rinci anggaran yang tidak dapat dicairkan pada kegiatan perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut sebesar Rp. 975.000.000, anggaran yang tidak dapat dicairkan pada kegiatan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau - pulau kecil sebesar Rp. 500.000.000, anggaran yang tidak dapat dicairkan pada kegiatan pendayagunaan pesisir dan pulau - pulau kecil sebesar Rp. 40.000.000, dan anggaran yang tidak dapat dicairkan pada kegiatan perencanaan ruang laut sebesar Rp. 450.000.000.

Pada triwulan III, LPSPL Sorong mendapatkan pemanfaatan PNBPN dari perolehan PNBPN pelayanan jenis ikan di wilayah kerja LPSPL Sorong dan pemanfaatan PNBPN dari



pelayanan pemanfaatan ruang laut yang diberikan dari perolehan PNBPDirektorat Perencanaan Ruang Laut. LPSPL Sorong mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 2.338.638.000 dengan rincian Rp. 1.650.038.000 diperoleh dari PNBPDirektorat Perencanaan Ruang Laut dan Rp. 688.600.000 diperoleh dari PNBPDelayanan jenis ikan di wilayah kerja LPSPL Sorong. Sehingga total Pagu LPSPL Sorong pada triwulan III menjadi Rp. 14.392.004.000.

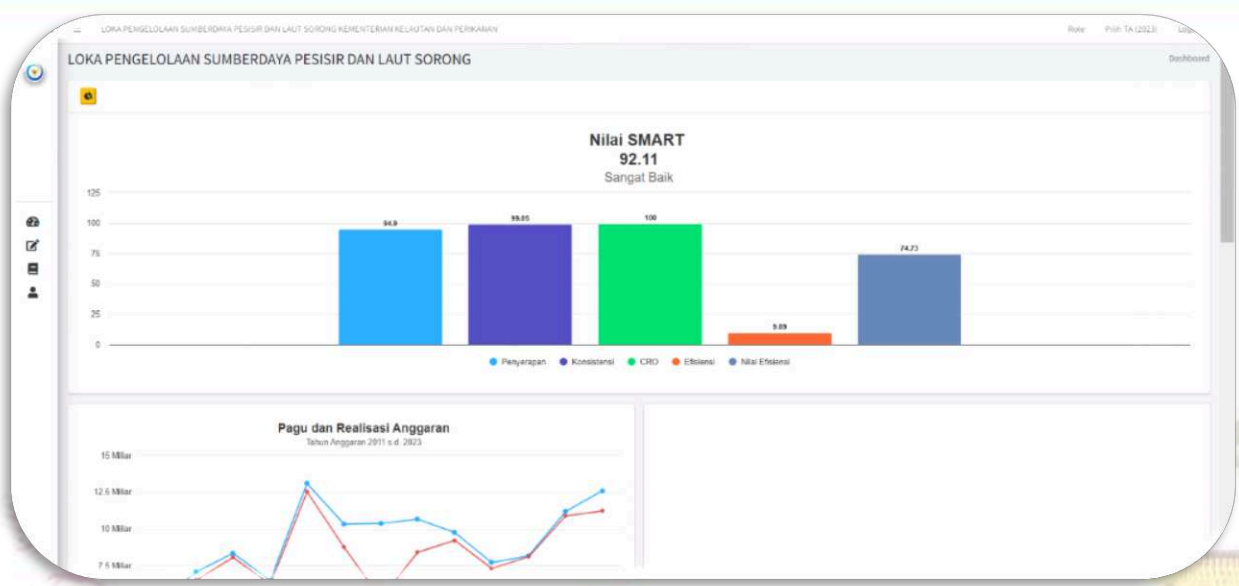
Pada Bulan November terdapat realokasi anggaran yang berdampak *automatic adjustment* dari DIPA LPSPL Sorong ke Bendahara Umum Negara, sehingga pagu anggaran LPSPL Sorong menjadi Rp. 12.593.004.000. Namun, pada DIPA LPSPL Sorong masih terdapat blokir pada kegiatan perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut sebesar Rp. 375.000.000 karena ketidaksesuaian rincian output. Realisasi anggaran pada tahun 2023 yang berdasarkan aplikasi OMSPAN yaitu Rp. 11.950.139.298 atau 94,90% dari anggaran Rp. 12.592.004.000.

3.9 Tindaklanjut Atas Rekomendasi Triwulan III Tahun 2023

LPSPL Sorong pada triwulan III memiliki 2 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti diantaranya 1) Perlu dilakukan penyesuaian rencana penarikan dana (RPD) pada halaman III DIPA, dan 2) Perlu ditingkatkan realisasi anggaran atau percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan selanjutnya.

Untuk poin pertama terkait penyesuaian rencana penarikan dana LPSPL Sorong telah melakukan revisi halaman III DIPA, hal ini dapat dilihat dari nilai konsistensi pada nilai kinerja anggaran. Nilai konsistensi LPSPL Sorong pada tahun 2023 sebesar 99,05 hal ini menunjukkan kesesuaian antara target rencana penarikan dana dengan realisasi anggaran.





Gambar 3.43 Nilai Kinerja Anggaran LPSPL Sorong Tahun 2023.

Namun revisi halaman III DIPA LPSPL Sorong tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Sehingga nilai komponen deviasi halaman III DIPA yaitu 59,78 atau rendah, hal ini menyebabkan nilai IKPA LPSPL Sorong tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	066	032	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	Nilai	100.00	59.78	88.09	87.14	100.00	95.23	100.00	100.00	91.83	100%	91.83
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.98	17.62	8.71	10.00	9.52	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	79.89		94.09			100.00					

Gambar 3.47 Nilai IKPA LPSPL Sorong Tahun 2023.

Untuk poin kedua terkait peningkatan realisasi anggaran atau percepatan pelaksanaan kegiatan, LPSPL Sorong pada triwulan III realisasi anggaran mencapai 47,29% sedangkan pada triwulan IV mencapai 94,90%. Sehingga pada triwulan IV tahun 2023 realisasi anggaran LPSPL Sorong meningkat sebesar 47,61%. Hal ini menunjukkan bahwa pada triwulan IV LPSPL Sorong telah berupaya meningkatkan realisasi anggaran.



3.10 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya

Membandingkan capaian kinerja LPSPL Sorong dengan capaian kinerja Unit Kerja lain bertujuan untuk melihat apakah capaian LPSPL Sorong sudah maksimal atau dapat ditingkatkan lagi dengan mengacu dari capaian unit kerja lainnya.

Tabel 3.69 Membandingkan capaian kinerja LPSPL Sorong dengan Unit Pelaksana Teknis lain pada tahun 2023.

No	Indikator Kinerja	LPSPL Sorong TW IV			LPSPL Serang TW IV		
		Target	Capaian	Kinerjaku	Target	Capaian	Kinerjaku
1	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	3	3	100%	3	3	100%
2	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Daerah)	2	2	100%	2	4	120%
3	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kelompok)	3	3	100%	2	2	100%
4	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	4	7	120%	4	6	120%
5	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan	2	5	120%	4	6	120%

	Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)						
6	Nilai PNBPN LPSPL Sorong (Rp.000)	718.180	1.647.742,751	120%	2.550.000	3.030.253,433	120%
7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	93,75	91,83	97,95%	93,75	94,60	100,91%
8	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	82	92,11	112,33%	82	89,66	109,34%
9	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LPSPL Sorong (Nilai)	75	81,64	108,85%	75	85,68	114,24%
10	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)	85	89,17	104,91%	85	90,33	106,27%
11	Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	75	82,70	110,27%	75	82,95	110,60%
12	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)	4	4	100%	4	4	100
13	Persentase Unit Kerja Lingkup LPSPL Sorong yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92	133,33	120%	92	133,33	120
14	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup LPSPL Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75	100	120%	75	100	120%
15	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LPSPL Sorong (%)	100	100	100%	100	100	100%
16	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPL	77,50	100	120%	77,5	86	110,97%



Sorong (%)							
------------	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan:

-  : Capaian lebih rendah
-  : Capaian lebih tinggi

Dari tabel diatas bahwa terdapat beberapa perbedaan target dan capaian antara LPSPL Sorong dengan LPSPL Serang diantaranya:

- LPSPL Sorong capaiannya lebih tinggi daripada LPSPL Serang pada 2 indikator kinerja yaitu indikator kinerja nilai kinerja anggaran dan indikator kinerja tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah.
- LPSPL Serang capaiannya lebih tinggi daripada LPSPL Sorong pada 5 indikator kinerja yaitu indikator kinerja daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, indikator kinerja nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), indikator kinerja nilai unit kerja berpredikat menuju WBK, indikator kinerja indeks profesionalitas ASN, dan indikator kinerja nilai PM SAKIP.



BAB IV PENUTUP

2.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) LPSPL Sorong pada Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan dalam mencapai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Mandatory (IKM) sebagai berikut:

1. LPSPL Sorong mempunyai 10 indikator kinerja yang capaiannya melebihi target kinerja diantaranya:
 - a. IKU 4 Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong tercapai 7 jenis dari target 4 jenis.
 - b. IKU 5 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong tercapai 5 jenis dari target 2 jenis.
 - c. IKU 6 Nilai PNBPL LPSPL Sorong tercapai Rp. 1.647.742.751 dari target 718.180.000.
 - d. IKM 8 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LPSPL Sorong tercapai 92,11 dari target 82.
 - e. IKM 9 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LPSPL Sorong tercapai 81,64 dari target 75.
 - f. IKM 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong tercapai 89,17 dari target 85.
 - g. IKM 11 Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong tercapai 82,70 dari target 75.
 - h. IKM 13 Persentase Unit Kerja Lingkup LPSPL Sorong yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar tercapai 133,3 dari target 92.
 - i. IKM 14 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup LPSPL Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan tercapai 100 dari target 75.
 - j. IKM 16 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPL Sorong tercapai 100 dari target 77,5.
2. LPSPL Sorong mempunyai 5 indikator kinerja yang capaiannya sama dengan target kinerja diantaranya:
 - a. IKU 1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong tercapai 3 dokumen dari target 3 dokumen.



- b. IKU 2 Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong tercapai 2 daerah dari target 2 daerah.
 - c. IKU 3 Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong tercapai 3 kelompok dari target 3 kelompok.
 - d. IKM 12 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LPSPL Sorong tercapai 4 dokumen dari target 4 dokumen.
 - e. IKM 15 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LPSPL Sorong tercapai 100% dari target 100%.
3. LPSPL Sorong mempunyai 1 indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu IKM 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong. Capaian indikator kinerja ini 91,83 dari target 93,75.
 4. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Mandatory LPSPL Sorong Tahun 2023 adalah **110,01** (kategori Biru=Istimewa).

2.2 Rekomendasi

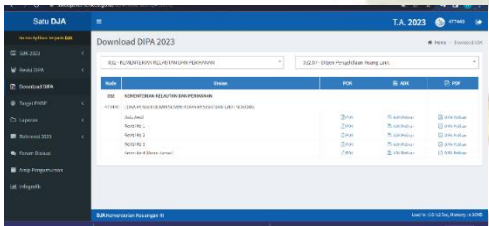
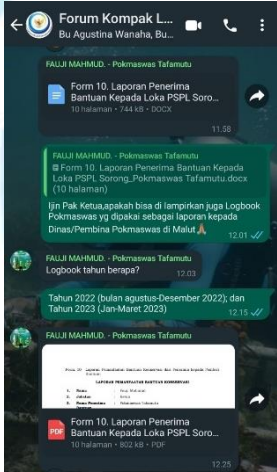
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti terkait kinerja tahun 2023, yaitu:

1. Pada tahun 2023 telah dilakukan upaya penyesuaian rencana penarikan dana namun tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga menyebabkan nilai IKPA LPSPL Sorong tidak tercapai. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk revisi halaman III DIPA pada setiap triwulan dengan waktu yang telah ditentukan DJPB Kemenkeu.
2. Pada tahun 2023 penyusunan rencana penarikan dana pada level komponen sehingga menyebabkan perbedaan realisasi dan rencana penarikan dana pada level subkomponen. Sehingga direkomendasikan menyusun rencana penarikan dana pada level subkomponen.




Adapun rekomendasi pada tahun 2022 dan tahun 2023 (Triwulan I-Triwulan III) yang telah ditindaklanjuti sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tindaklanjuti dari rekomendasi pada periode sebelumnya.

No	Rekomendasi	Periode	Tindaklanjuti
1	Perlunya melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana penarikan dana (RPD) pada halaman III DIPA untuk meningkatkan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran dan nilai kinerja anggaran.	Tahun 2022	LPSPL Sorong pada tahun 2023 telah melakukan revisi rencana penarikan dana secara berkala,, setiap melakukan revisi anggaran dilaksanakan penyesuaian pada halaman III DIPA (RPD) 
2	Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/SJ Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan konservasi tahun 2022, perlu dilakukan pendampingan dan pembinaan pemanfaatan bantuan konservasi untuk keberlanjutan kegiatan dan penggunaan/pemanfaatan Bantuan Konservasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup LPSPL Sorong.	Tahun 2022	LPSPL Sorong membuat WAG sebagai salah satu bentuk pendampingan dalam penyusunan laporan kegiatan kelompok. 
3	Perlu dilakukan penyesuaian rencana penarikan dana (RPD) pada halaman III DIPA, serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana	Triwulan I Tahun 2023	LPSPL Sorong pada triwulan II telah melakukan revisi POK sebanyak 5 kali hal ini dilakukan sekaligus dengan penyesuaian rencana penarikan dana. Hal ini diperkuat dengan nilai konsistensi pada nilai kinerja anggaran sebesar 91.64, namun hal ini berbeda dengan nilai pada komponen deviasi halaman III DIPA pada nilai IKPA. Hal ini disebabkan karena pada deviasi halaman III DIPA memiliki acuan



			rencana penarikan dana pada waktu yang ditentukan.
4	Perlu ditingkatkan realisasi anggaran atau percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan selanjutnya.	Triwulan I Tahun 2023	<p>LPSPL Sorong pada triwulan II realisasinya telah meningkat hingga 37,63% dari realisasi pada triwulan I sebesar 12,10%. Percepatan pelaksanaan kegiatan juga dapat dilihat bahwa beberapa capaian LPSPL Sorong yang melebihi target pada triwulan II tahun 2023 diantaranya IKU 3 Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kelompok) dan IKU 5 Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis).</p>
5	Pada triwulan II tahun 2023 telah dilakukan upaya penyesuaian rencana penarikan dana namun masih terdapat deviasi atau perbedaan antara target dan realisasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian rencana penarikan dana (RPD) pada halaman III DIPA.	Triwulan II Tahun 2023	<p>LPSPL Sorong pada triwulan III telah melakukan revisi POK sebanyak 3 kali hal ini dilakukan sekaligus dengan penyesuaian rencana penarikan dana. Hal ini diperkuat dengan nilai konsistensi pada nilai kinerja anggaran sebesar 97,85 atau meningkat dari triwulan sebelumnya, hal ini juga diperkuat dengan nilai pada komponen deviasi halaman III DIPA pada nilai IKPA yang lebih tinggi dari triwulan sebelumnya.</p>
6	Pada triwulan II telah dilakukan beberapa upaya dalam meningkatkan realisasi penyerapan anggaran namun realisasinya masih relatif rendah sehingga perlu ditingkatkan realisasi anggaran atau percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan selanjutnya.	Triwulan II Tahun 2023	<p>LPSPL Sorong pada triwulan III realisasinya telah meningkat hingga 47,29% dari realisasi pada triwulan II sebesar 37,63%. Realisasi LPSPL Sorong pada triwulan III sebenarnya lebih tinggi dari 47,29%, hal ini karena pada triwulan III pagu LPSPL Sorong bertambah dari pemanfaatan PNBPN. Percepatan</p>

			<p>pelaksanaan kegiatan juga dapat dilihat bahwa beberapa capaian LPSPL Sorong yang melebihi target pada triwulan III tahun 2023 diantaranya IKU 5 Jenis Ikan Terancam PUNAH yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis).</p>
7	<p>Pada triwulan III tahun 2023 telah dilakukan upaya penyesuaian rencana penarikan dana namun masih terdapat deviasi atau perbedaan antara target dan realisasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian rencana penarikan dana (RPD) pada halaman III DIPA.</p>	<p>Triwulan III Tahun 2023</p>	<p>LPSPL Sorong telah melakukan revisi halaman III DIPA, hal ini dapat dilihat dari nilai konsistensi pada nilai kinerja anggaran. Nilai konsistensi LPSPL Sorong pada tahun 2023 sebesar 99,05 hal ini menunjukkan kesesuaian antara target rencana penarikan dana dengan realisasi anggaran.</p> <p>Namun revisi halaman III DIPA LPSPL Sorong tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Sehingga nilai komponen deviasi halaman III DIPA yaitu 59,78 atau rendah, hal ini menyebabkan nilai IKPA LPSPL Sorong tidak mencapai target yang telah ditetapkan.</p>
8	<p>Pada triwulan III telah dilakukan beberapa upaya dalam meningkatkan realisasi penyerapan anggaran namun realisasinya masih relatif rendah karena terdapat penambahan pagu anggaran dari pemanfaatan PNPB sehingga perlu ditingkatkan realisasi anggaran atau percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan selanjutnya.</p>	<p>Triwulan III Tahun 2023</p>	<p>LPSPL Sorong pada triwulan III realisasi anggaran mencapai 47,29% sedangkan pada triwulan IV mencapai 94,90%. Sehingga pada triwulan IV tahun 2023 relisasi anggaran LPSPL Sorong meningkat sebesar 47,61%. Hal ini menunjukkan bahwa pada triwulan IV LPSPL Sorong telah berupaya meningkatkan realisasi anggaran</p>





Lindungi Kamulahuk

LAMPIRAN



Lampiran I. Perjanjian Kinerja LPSPL Sorong TA 2023



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (LPSPL) SORONG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Santoso Budi Widiarto

Jabatan : Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Victor Gustaaf Manoppo

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya
Pesisir dan Laut Sorong



Santoso Budi Widiarto



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (LPSPL)
SORONG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	1.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	3
2.	Terwujudnya Kawasan Konservasi yang Ditetapkan di Tingkat Daerah di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	2.	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Daerah)	2
3.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	3.	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kelompok)	3
		4.	Kelompok masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja LPSPL Sorong yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)	1
4.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	5.	Jenis Ikan Terancam Puna yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	4
5.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	6.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	2



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
6.	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran	7.	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (kawasan)	2
7.	Meningkatnya Nilai PNBP LPSPL Sorong	8.	Nilai PNBP LPSPL Sorong (Rp.000)	718.180
8.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LPSPL Sorong	9.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	89
		10.	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	82
		11.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LPSPL Sorong (Nilai)	75
		12.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)	85
		13.	Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	75
		14.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)	4
		15.	Persentase Unit Kerja Lingkup LPSPL Sorong yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92
		16.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup LPSPL Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		17.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LPSPL Sorong (%)	100
		18.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%)	77,5



Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	800.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	2.775.000.000
3.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	500.000.000
4.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	40.000.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	7.938.366.000
Total Anggaran Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong Tahun 2023		12.053.366.000

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya
Pesisir dan Laut Sorong


Santoso Budi Widiarto

Lampiran II. Perjanjian Kinerja LPSPL Sorong TA 2023 (Revisi 1)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (LPSPL) SORONG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosmini
Jabatan : Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Victor Gustaaf Manoppo
Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Agustus 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya
Pesisir dan Laut Sorong


Rosmini



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (LPSPL)
SORONG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	1. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	3
2.	Terwujudnya Kawasan Konservasi yang Ditetapkan di Tingkat Daerah di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	2. Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Daerah)	2
3.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	3. Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kelompok)	3
		4. Kelompok masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja LPSPL Sorong yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)	1
4.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	5. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	4
5.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	6. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	2



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
6.	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran	7. Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (kawasan)	2
7.	Meningkatnya Nilai PNBP LPSPL Sorong	8. Nilai PNBP LPSPL Sorong (Rp.000)	718.180
8.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LPSPL Sorong	9. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	89
		10. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	82
		11. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LPSPL Sorong (Nilai)	75
		12. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)	85
		13. Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	75
		14. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)	4
		15. Persentase Unit Kerja Lingkup LPSPL Sorong yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92
		16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup LPSPL Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		17. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LPSPL Sorong (%)	100
18.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%)	77,5	



Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	800.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	2.775.000.000
3.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	500.000.000
4.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	40.000.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	7.938.366.000
Total Anggaran Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong Tahun 2023		12.053.366.000

Jakarta, 2 Agustus 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya
Pesisir dan Laut Sorong



Rosmini





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprn@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (LPSPL)
SORONG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosmini

Jabatan : Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Victor Gustaaf Manoppo

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya
Pesisir dan Laut Sorong



Rosmini



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (LPSPL)
SORONG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	1.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	3
2.	Terwujudnya Kawasan Konservasi yang Ditetapkan di Tingkat Daerah di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	2.	Daerah yang difasilitasi Penvusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Daerah)	2
3.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	3.	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Kelompok)	3
4.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	4.	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	4
5.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	5.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	2
6.	Meningkatnya Nilai PNBP LPSPL Sorong	6.	Nilai PNBP LPSPL Sorong (Rp.000)	718.180
7.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LPSPL Sorong	7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	93,75
		8.	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	82



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		9. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LPSPL Sorong (Nilai)	75
		10. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)	85
		11. Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	75
		12. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)	4
		13. Persentase Unit Kerja Lingkup LPSPL Sorong yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92
		14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup LPSPL Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		15. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LPSPL Sorong (%)	100
		16. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPL Sorong (%)	77,5



Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	2.000.038.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	3.113.600.000
3.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	40.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	7.438.366.000
Total Anggaran Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong Tahun 2023		12.592.004.000

Jakarta, 30 November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya
Pesisir dan Laut Sorong



Rosmini



Lampiran III. Penanganan Mamalia Laut Terdampar di Wilayah Kerja LPSPL Sorong



Lampiran IV. Bantuan KOMPAK Tahun 2023 di Wilayah Kerja LPSPL Sorong



POKMASWAS TANJUNG NGOLOPOPO

Desa Wailegi (Kab. Halmahera Tengah - Prov. Maluku Utara)

Koordinat 128° 45' 57,672" E dan 0° 16' 41,628" N

Kegiatan Pengawasan Konservasi

BAST No. BA.003/LPSPL.1//PRL.440/VI/2023

Tanggal 27 Juni 2023

Nilai Bantuan Rp 101.811.975,-

Jenis Bantuan:

1. Body Perahu Fiber 9x1,3 meter (1 unit)
2. Mesin Tempel 15 PK (1 unit)
3. Longfins freediving (2 pasang)
4. Masker & Snorkel (2 unit)
5. HT Bruno Cx 5 Power (2 unit)
6. GPS (1 unit)
7. Kamera Underwater Olympus TG-5 (1 unit)



BANTUAN KOMPAK 2023 DI WILKER LPSPL SORONG

3 *Provinsi*
Kelompok

TOTAL BANTUAN Rp 279.999.300,-



POKMASWAS SUGIRAJA WATULU

Negeri Fena Leisela (Kab. Buru - Prov. Maluku)

Koordinat 126° 32' 6,216" E dan 3° 4' 23,880" S

Kegiatan Pengawasan & Pelestari Penyu

BAST No. BA.002/LPSPL.1//PRL.440/VI/2023

Tanggal 26 Juni 2023

Nilai Bantuan Rp 80.993.225,-

Jenis Bantuan:

1. Motor ATV 150 cc (1 unit)
2. Motor ATV 125 cc (2 unit)
3. Teropong Infrared Malam (1 unit)
4. Baju Seragam (19 buah)



POKMASWAS NUSA MATAN

Kampung Gewerpe (Kab. Fakfak - Prov. Papua Barat)

Koordinat 132° 18' 44,460" E dan 2° 55' 28,020" S

Kegiatan Pengawasan Konservasi

BAST No. BA.001/LPSPL.1//PRL.440/VI/2023

Tanggal 22 Juni 2023

Nilai Bantuan Rp 97.194.100,-

Jenis Bantuan:

1. Body Perahu Fiber 7x1x1,2 meter (1 unit)
2. Mesin Tempel 15 PK (1 unit)
3. GPS Garmin 78S (1 unit)
4. Laptop Core-i5 RAM 8 GB SSD 512 (1 unit)